



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2013**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017, perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2014.
- (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan:
 - a. bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2014 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2014.

Pasal 2

RKPD Tahun 2014 berikut tabel dan matriksnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam merencanakan program dan kegiatannya Tahun 2014, mengacu kepada dokumen RKPD Tahun 2014 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Pasal 4

RKPD Tahun 2014 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017.

Pasal 5

RKPD Tahun 2014 ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Mei 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Mei 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**



H. SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 18.

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Sistematika RKPD	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan	I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-9
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-20
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-27
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	II-37
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah/Isu – isu Strategis	II-84
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-84
2.3.1. Isu Strategis.....	II-87
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Aspek Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2014	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015	III-13

3.2.	Arah Kebijakan Keuangan	III-14
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-14
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-16
3.2.3.	Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	III-18
3.2.4.	Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-18
3.2.5.	Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	III-18
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-3
4.2.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013	IV-4
4.2.1.	Prioritas dan Sasaran Bidang Ekonomi	IV-4
4.2.2.	Prioritas dan Sasaran Bidang Sosial Budaya	IV-5
4.2.3.	Prioritas dan Sasaran Bidang Infrastruktur	IV-6
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah dan Persentase Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Ketinggian Permukaan Tanah (Ha) Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011	II-3
Tabel 2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan dan Intensitas Hujan Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-4
Tabel 2.4.	Luas Penggunaan Tanah Pada Tiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-5
Tabel 2.5.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten HSU Tahun 2010	II-6
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Hulu Sungai Utara Menurut Kelompok Umur dan Sek Rasio Tahun 2010	II-7
Tabel 2.7.	Prosentasi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010	II-8
Tabel 2.8.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-9
Tabel 2.9.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 .	II-11
Tabel 2.10.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	II-12
Tabel 2.11.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)	II-13
Tabel 2.12.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010	II-14
Tabel 2.13.	Perkembangan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku	II-15

Tabel 2.14. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2006 – 2010 Provinsi Kalimantan Selatan	II-16
Tabel 2.15. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2006 – 2010 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-16
Tabel 2.16. Angka Melek Huruf Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-17
Tabel 2.17. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-17
Tabel 2.18. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-18
Tabel 2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-19
Tabel 2.20. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-20
Tabel 2.21. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-21
Tabel 2.22. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-22
Tabel 2.23. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-23
Tabel 2.24. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-24
Tabel 2.25. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-24
Tabel 2.26. Prosentase Daya Serap Tenaga Kerja menurut Lapangan Kerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-25
Tabel 2.27. Angka Konsumsi RT perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-26
Tabel 2.28. Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-27
Tabel 2.29. Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-28

Tabel 2.30. Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010	II-28
Tabel 2.31. Persentase luas Wilayah Produktif Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010.....	II-29
Tabel 2.32. Angka Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-29
Tabel 2.33. Jumlah Demo di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-30
Tabel 2.34. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 – 2010	II-31
Tabel 2.35. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-32
Tabel 5.1. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014	V-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan baik pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, diamanatkan kepada seluruh daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada RKP. Substansi yang termuat dalam RKPD yakni memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Setelah dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD tahun 2014 baik di kecamatan maupun di kabupaten yang membahas tentang prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara serta target kinerja yang disepakati dalam musrenbang tersebut maka hasilnya dituangkan dalam rancangan akhir RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014. Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah akan dijadikan dasar untuk menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2014, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014 untuk dibahas bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 ini juga akan menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam rangka melaksanakan berbagai urusan wajib ataupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Oleh karenanya dokumen RKPD tidak terlepas dari rencana program lima tahunan yang telah disusun melalui RPJMD. Selanjutnya dokumen RKPD akan menjadi acuan bagi seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD pada tahun yang sama, dimana Renja SKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Selain itu penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen RKPD juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mempertimbangkan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 - 2025.

Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, nantinya akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja tahunan kepala daerah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014. Secara terinci bab ini memuat yakni :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2014 dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD sertagaris besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD

Yakni mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 serta Perkiraan Tahun 2014

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang pedoman pelaksanaan dan kaidah pelaksanaannya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2014.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 adalah untuk :

1. Menjabarkan rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014.
3. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat 2° 1' 37" - 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 144° 50' 58" - 115° 50' 24" Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 892,7 km² atau hanya sekitar 2,38 % dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

Sebelah Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah;

Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sei Pandan Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Sungai Tabukan dan Kecamatan Paminggir, Kecamatan Danau Panggang merupakan Kecamatan terluas yang mencakup 25,15 %

dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan Kecamatan Sungai Tabukan mempunyai luas terkecil yaitu hanya 3,28 % dari luas wilayah.

Adapun luas wilayah masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Luas Daerah dan Persentase Luas Daerah Tiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

Kecamatan	Luas Daerah (km²)	Persentase
1. Danau Panggang	224,49	25,15
2. Paminggir	156,13	17,49
3. Babirik	77,44	8,67
4. Sungai Pandan	45,00	5,04
5. Sungai Tabukan	29,24	3,28
6. Amuntai Selatan	183,16	20,52
7. Amuntai Tengah	57,00	6,39
8. Banjarang	41,00	4,59
9. Amuntai Utara	45,09	5,05
10. Haur Gading	34,15	3,83

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kab. HSU, 2012

Topografi Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran hanya berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di daerah Kecamatan Amuntai Utara.

Berdasarkan peta topografi/rupa bumi dengan skala 1 : 50.000, lahan tertinggi mencapai 21 meter dpl terletak di desa Air Tawar kecamatan Amuntai Utara, sedangkan daerah rawa terendah pada ketinggian 0 meter dpl. Selain itu kawasan rawa Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari sinklinorium. Proses-proses pelipatan menyebabkan permukaan tanah mineral menjadi tidak sama tinggi. Sedimen liat tersier menutupi bagian-bagian tertentu daerah rawa sebelah barat laut daerah rawa dan bagian hulu sampai paminggir. Keadaan ini merubah pula keadaan lahan/bentuk lahan secara keseluruhan.

Berdasarkan data kemiringan lereng di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2003, diketahui bahwa seluruh wilayah kawasan rawa terletak di

daerah bertopografi datar (0-2%). Bila memperhatikan karakteristik rawa sebagai wilayah genangan air, maka perlu diperhitungkan hidrologi kawasan rawa dan sistem pengelolaan aliran air sebagai saluran pembuang.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Permukaan Tanah (Ha) Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

Kecamatan	Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut (m)				
	0-7	7-25	25-100	100-500	>500
1. Danau Panggang	13.350	-	-	-	-
2. P a m i n g g i r	21.750	-	-	-	-
3. Babirik	7.400	-	-	-	-
4. Sungai Pandan	6.150	-	-	-	-
5. Sungai Tabukan	1.750	-	-	-	-
6. Amuntai Selatan	17.400	-	-	-	-
7. Amuntai Tengah	8.000	50	-	-	-
8. B a n j a n g	8.950	-	-	-	-
9. Amuntai Utara	3.550	250	-	-	-
10. Haur Gading	2.750	-	-	-	-
Jumlah/ Total	91.050	300	-	-	-

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kab. HSU, 2012

Ketinggian suatu tempat merupakan faktor fisik wilayah yang berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan, baik budidaya pertanian maupun non-pertanian. Ketinggian suatu tempat mempunyai kelereng yang positif dengan kelereng. Semakin tinggi suatu tempat, semakin terjal lerengnya.

Secara Geologis Kabupaten HSU terbagi menjadi dua zona fisiografis yaitu bagian zona pegunungan Meratus di sebelah Timur Laut dan bagian dari zona Cekungan Barito di sebelah Barat Daya. Daerah Rawa yang mendominasi wilayah Kabupaten HSU merupakan bagian dari cekungan Barito (Barito Basin). Sementara secara fisiografis, kawasan rawa merupakan depresi yang terdiri dari deposit aluvium. bahan tanah mineral dapat berupa sedimen yang berasal dari daerah sekitar yang lebih tinggi, atau sedimen

yang lebih muda dibentuk dalam pengaruh air laut. di atas keduanya dapat terisi oleh deposit gambut yang terbentuk kemudian.

Dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89 % adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Balangan yang bertemu di Sungai Negara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading terus ke Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.

Tabel 2.3.
Curah Hujan, Hari Hujan dan Intensitas Hujan Setiap Bulannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hh)
1.	Januari	247,9	18
2.	Pebruari	384,5	16
3.	Maret	359,2	21
4.	April	266,4	19
5.	M e i	203,3	8
6.	Juni	64,8	4
7.	Juli	31,4	3
8.	Agustus	18,9	4
9.	September	98,4	8
10.	Oktober	188,3	10
11.	November	168,4	13
12.	Desember	326,8	19
Jumlah		2.358,3	143
Rata-rata		196,5	11,91

Sumber data : BPS Hulu Sungai Utara 2012

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa sawah dan hutan rawa dengan vegetasi utama galam (*Malaeuca cajaputy*) disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, dan semak belukar. Berikut adalah gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.4.
Luas Penggunaan Tanah Pada Tiap kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

Kecamatan	Pemukiman	Luas Penggunaan Tanah (Ha)							
		Sawah	Kebun Campuran	Perkeb. Kelapa Sawit	Hutan rawa	Rumput rawa	Rawa Monoton	Tubuh Air	Tanah terbuka
Danau Panggang	238,50	2.592,71	-	-	1.281,76	8.071,52	912,02	63,59	783,18
B a b i r i k	241,20	4.628,60	16,82	-	-	1.836,95	-	56,26	-
Sungai Pandan	470,74	4.926,12	-	-	-	1.748,99	-	67,85	-
Amuntai Selatan	396,88	2.096,55	3,22	-	9.380,71	-	-	50,51	1.635,55
Amuntai Tengah	528,24	3.233,56	24,59	17,19	-	4.114,34	-	29,07	-
B a n j a n g	305,60	2.763,27	408,30	3.637,19	-	2.027,18	-	34,95	56,09
Amuntai Utara	302,37	2.590,64	890,96	-	-	-	-	46,79	-
Haur Gading	232,29	1.487,99	248,79	-	890,57	400,56	-	22,89	-
Sungai tabukan	143,11	1.266,70	12,78	-	-	199,33	-	16,24	-
Paminggir	87,34	126,82	-	-	2.026,40	10.703,64	-	263,97	570,69
J u m l a h	2.946,19	25.712,74	1.605,49	3.654,38	13.574,01	29.101,57	919,02	652,16	3.045,49

Sumber data : Bappeda Kab. HSU, 2010(interpretasi dan cek lapangan Citra Alos 2010)

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga akhir tahun 2011 berjumlah sebesar 211.699 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 103.498 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 108.201 jiwa dengan

jumlah rumah tangga sebanyak 53.742 rumah tangga yang tersebar di 219 desa/kelurahan. Secara keseluruhan, perkembangan penduduk mengalami pertumbuhan negatif rata-rata 302 jiwa per tahun, jumlah penduduk tahun 2009 sebesar 216.109 jiwa maka jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2008 sebanyak 216.181 dimana terjadi penurunan jumlah penduduk sebanyak 72 jiwa atau menurun sebesar 0,03 persen

Persebaran penduduk masih menunjukkan adanya ketidakmerataan antar kecamatan dimana Kecamatan Amuntai Tengah yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 854,61 penduduk per km², sedangkan kecamatan lain rata-rata dengan tingkat kepadatan dibawah 500 penduduk per km², kecuali Kecamatan Sungai Pandan dan Kecamatan Sungai Tabukan dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 582,40 Jiwa/Km² dan 474,52 Jiwa/Km².

Tabel 2.5.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten HSU Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
			Laki-Laki	Perempuan	Total	
1.	Danau Panggang	224,49	9.603	10.101	19.704	87,77
2.	Paminggir	156,13	3.787	3.711	7.498	48,02
3.	Babirik	77,44	8.977	9.131	18.108	233,83
4.	Sungai Pandan	45,00	12.719	13.489	26.208	582,40
5.	Sungai Tabukan	29,24	6.742	7.133	13.875	474,52
6.	Amuntai Selatan	183,16	13.085	13.737	26.822	146,44
7.	Amuntai Tengah	57,00	24.193	24.520	48.713	854,61
8.	Banjang	41,00	8.190	8.139	16.329	398,27
9.	Amuntai Utara	45,09	9.422	10.714	20.136	446,57
10.	Haur Gading	34,15	6.780	7.526	14.306	418,92
	Jumlah	892,70	103.498	108.201	211.699	237,14

Sumber : BPS Kab. HSU, 2012

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dengan jumlah penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelaminnya

mencapai 95,749. Komposisi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.6. yang mana menggambarkan kelompok umur 0 – 14 tahun masih cukup tinggi yaitu sebesar 63.147 Jiwa, sedangkan kelompok umur produktif sebanyak 138.021 Jiwa dan kelompok umur 65 + sebanyak 8.515 jiwa .

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Hulu Sungai Utara Menurut Kelompok Umur dan Sex Rasio Tahun 2010

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Sex Rasio
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0 – 4	10.021	9.606	19.627	104,32
5 – 9	11.208	10.551	21.759	106,23
10 – 14	10.980	10.344	21.324	106,15
15 – 19	10.267	10.494	20.761	97,84
20 – 24	8.847	9.185	18.032	96,32
25 – 29	8.615	9.142	17.757	94,24
30 – 34	8.144	8.549	16.693	95,26
35 – 39	7.945	8.447	16.392	94,06
40 – 44	6.905	7.382	14.288	93,55
45 – 49	6.013	6.136	12.149	97,00
50 – 54	4.799	5.344	10.143	89,80
55 – 59	3.174	3.256	6.430	97,48
60 – 64	2.288	3.088	5.376	74,09
65+	3.144	5.371	8.515	59,00
JUMLAH	102.351	106.895	209.246	95,75

Sumber : BPS dan BappedaKab. HSU, 2011

Dengan komposisi penduduk yang demikian dimana angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk sebesar 64,94 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 orang usia tidak produktif, seperti terlihat pada tabel 2.7.

Besar kecilnya angka ketergantungan ini selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan disuatu wilayah karena jika angka tanggungan semakin besar maka makin kecil penduduk produktif yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Tingginya prosentasi penduduk usia muda dapat menjadi beban yang berat bagi penduduk usia produktif, demikian juga dengan besarnya jumlah penduduk berusia muda memerlukan perhatian serius dari pemerintah terutama berkaitan dengan pendidikan yaitu dalam hal penyediaan sarana pendidikan yang murah dan terjangkau.

Tabel 2.7.
Prosentasi Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0 - 14	33,61	28,69	31,06
15 - 64	63,62	66,16	64,94
65 +	2,77	5,14	4,00

Sumber : BPS , Susenas 2011

Tingkat Pendidikan penduduk juga dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk yang secara umum dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara rata-rata lama sekolah sekitar 7,48 Tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Hulu Sungai Utara yang berusia 15 tahun keatas bersekolah selama 7,48 tahun atau setingkat kelas 2 SLTP semester satu.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 67,44 persen masih berpendidikan sampai dengan SD sederajat, proporsi yang cukup tinggi ini membawa konsekwensi antara lain upaya peningkatan kualitas SDM semakin sulit. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, yaitu hanya sebesar 4,50 persen. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat rata-rata pendidikan penduduk mencerminkan tarap intelektualitas daerah, dan daerah-daerah yang sudah relatif maju rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan rata-rata lama sekolah lebih lama dibandingkan dengan daerah yang terbelakang.

Tabel 2.8.
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Hulu Sungai Utara Tahun 2011

No.	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tdk Punya ijazah SD	29,70	34,15	31,99
2	SD Sederajat	37,48	33,34	35,35
3	SLTP Sederajat	14,01	16,69	15,39
4	SMU Sederajat	14,65	11,00	12,77
5	D I - D III	0,39	1,10	0,76
6	Universitas / DIV	3,77	3,72	3,74
	Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS,Susenas 2011

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama pada pembangunan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan peningkatan angka riil pertumbuhan nilai barang dan jasa. Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan 2007 hingga tahun 2011 mencapai 5,738 % pertahun.

a. Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian regional Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dilihat dari sisi besaran nilai nominal PDRB periode 2007-2011 selalu mengalami peningkatan baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2007 PDRB ADHK 2000 mencapai 742.192 milyar rupiah, meningkat menjadi 925.276 milyar rupiah pada tahun 2011. Jika dihitung dengan menggunakan harga berlaku maka nilai nominal PDRB ADHB

mencapai 1.036.134 Milyar rupiah pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 1.788.175 Milyar rupiah pada tahun 2011.

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011 dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB Total ADHK 2000 , yang secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok primer yaitu berkisar 33-35 persen, kelompok sekunder berkisar antara 16-18 persen dan kelompok tersier berkisar antara 48-51 persen.

Setiap kelompok sektor memiliki sektor andalan, yaitu sektor pertanian untuk kelompok sektor primer, industri pengolahan untuk kelompok sektor sekunder dan sektor Perdagangan menjadi andalan sektor tersier. (lihat tabel 2.9 dan 2.10). Kontribusi kelompok sektor primer, sekunder maupun tersier berfluktuasi naik turun. Kelompok primer kecenderungannya menurun, demikian pula untuk kelompok sekunder, namun untuk kelompok tersier tendnya positif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007-2011 selama kurun waktu empat tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan positif , yang besarnya pada kisaran lebih dari 5 persen. Pertumbuhan ini menggambarkan meningkatnya kinerja kegiatan ekonomi di masing-masing sektor, meskipun ada sedikit penurunan pada sektor pertanian.

Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstanperiode tahun 2007-2011 selalu naik untuk semua sektor kecuali pada tahun 2010 untuk sektor pertanian mengalami penurunan. Perkembangan kontribusi sektor menunjukkan tingkat agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya.

Pertumbuhan kontribusi sektor PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan periode 2007-2011 hampir selalu positif , hal ini menggambarkan bahwa kinerja ekonomi di semua sektor cukup baik, kecuali

sektor pertanian yang tumbuh negatif sebesar 0,28 persen pada tahun 2010 dikarenakan karakteristik kegiatan ekonomi sektor pertanian yang memang sangat dipengaruhi oleh iklim dan musim serta sangat rentan terhadap perubahan alam.

Tabel 2.9.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007s.d 2011
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ribuan rupiah)

NO	Sektor	(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	253.295.516	34,13	275.563.276	34,87	291.105.400	34,98	291.279.795	33,47	308.202.044	33,29
2	Pertambangan & Penggalian	149.444	0,02	155.102	0,02	160.147	0,02	168.958	0,02	180.510	0,02
3	Industri Pengolahan	78.011.900	10,51	80.055.090	10,13	82.348.719	9,9	85.422.940	9,82	88.028.123	9,51
4	Listrik, Gas & Air bersih	4.040.932	0,55	4.223.558	0,53	4.391.873	0,53	4.608.907	0,53	4.870.095	0,52
5	Konstruksi	45.302.292	6,1	48.081.208	6,08	52.066.018	6,26	55.828.667	6,42	59.627.224	6,44
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	146.015.355	19,68	154.605.806	19,55	161.047.077	19,35	171.224.418	19,67	182.000.524	19,65
7	Pengangkutan & Komunikasi	52.892.312	7,14	55.202.391	6,98	57.416.287	6,89	61.985.403	7,12	66.069.088	7,14
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	29.015.165	3,91	31.143.824	3,93	33.159.206	3,98	35.080.129	4,04	36.643.671	3,96
9	Jasa-jasa	133.469.262	17,99	141.444.882	17,89	150.334.380	18,06	164.566.310	18,91	180.105.605	19,45
	PDRB	742.192.179	100	790.475.137	100	832.029.106	100	870.165.527	100	925.726.884	100

Sumber : BPS, PDRB HSU

Tabel 2.10.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007s.d 2011
 Atas Dasar Harga Berlaku (ribuan rupiah)

NO	Sektor	(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	323.639.022	31,24	361.683.707	30,95	408.323.850	30,52	488.355.977	31,15	547.019.255	30,59
2	Pertambangan & Penggalian	284.639	0,03	325.999	0,03	428.196	0,03	546.713	0,03	722.997	0,04
3	Industri Pengolahan	105.996.373	10,23	109.512.925	9,37	117.451.466	8,78	142.916.452	9,12	160.009.864	8,95
4	Listrik, Gas, & Air bersih	5.904.383	0,57	6.671.930	0,57	7.342.996	0,54	9.208.860	0,58	11.820.845	0,66
5	Konstruksi	69.403.111	6,70	76.256.795	6,52	86.480.821	6,46	97.284.591	6,21	112.034.736	6,27
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	191.173.591	18,45	204.970.820	17,54	240.020.617	17,94	269.215.633	17,17	311.179.085	17,40
7	Pengangkutan & Komunikasi	82.267.137	7,94	89.667.614	7,67	105.549.075	7,89	117.509.571	6,88	133.601.032	7,47
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	43.233.380	4,17	50.736.193	4,34	57.237.931	4,28	66.137.792	4,22	76.500.774	4,28
9	Jasa-jasa	214.233.301	20,67	268.907.203	23,01	315.197.575	23,56	376.647.066	24,02	435.287.324	23,34
	PDRB	1.036.134.937	100	1.168.733.186	100	1.338.032.527	100	1.567.822.655	100	1.788.175.12	100

Sumber : BPS, PDRB HSU

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 s.d 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

NO	Sektor	2007		2008		2009		2010		2011	
		Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1	Pertanian	180,57	141,32	201,8	153,76	227,82	162,42	272,47	162,52	305,20	171,96
2	Pertambangan & Penggalian	306,9	161,13	351,49	167,23	461,68	172,67	589,47	182,17	779,54	194,63
3	Industri Pengolahan	150,9	111,09	155,95	114,00	167,26	117,27	203,52	121,65	227,87	125,36
4	Listrik, Gas & Air bersih	223,68	153,08	252,76	160,00	278,18	16,38	348,86	174,60	447,82	184,50
5	Konstruksi	240,91	157,25	264,7	1166,90	300,19	180,73	337,69	193,79	388,89	206,98
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran	160,43	122,54	172,01	129,74	201,42	135,15	225,93	143,69	261,14	152,73
7	Pengangkutan & Komunikasi	211,78	136,16	230,83	142,11	271,72	147,81	302,51	159,57	343,93	170,08
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	229,38	153,95	269,19	165,24	303,69	175,93	350,91	186,12	405,89	194,42
9	Jasa-jasa	208,62	129,97	261,86	137,74	306,93	146,39	366,77	160,25	423,87	175,38
	PDRB	184,85	132,41	208,50	141,02	238,70	148,43	279,70	155,24	319,01	165,15

Tabel 2.12.
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara
 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2007sampai dengan Tahun 2011

NO	Sektor	Pertumbuhan									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1	Pertanian	12,00	10,10	11,76	8,79	5,60	5,64	6,55	0,06	6,55	5,81
2	Pertambangan & Penggalian	70,87	2,70	14,53	3,79	31,35	3,25	9,00	5,50	9,00	6,84
3	Industri Pengolahan	1,62	1,55	3,32	2,62	3,12	2,87	8,48	3,73	8,48	3,05
4	Listrik,Gas & Air bersih	9,38	5,96	13,00	4,52	4,88	3,99	23,52	4,94	23,52	5,67
5	Konstruksi	6,59	3,77	9,88	6,13	9,05	8,29	12,49	7,23	12,49	6,80
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7,15	4,38	7,22	5,88	14,54	4,17	12,16	6,32	12,16	6,29
7	Pengangkutan & Komunikasi	14,25	4,87	9,00	4,37	17,45	4,01	8,93	7,96	8,93	6,59
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan	7,84	5,60	17,35	7,34	12,68	6,47	10,06	5,79	10,06	4,46
9	Jasa-jasa	8,64	4,13	25,52	5,98	16,77	6,28	17,26	9,47	17,26	9,44
	PDRB	8,88	5,96	12,80	6,51	10,95	5,26	11,07	4,58	11,07	6,39

Tabel 2.13
Perkembangan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007s.d 2011
Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah)

N O	Hulu Sungai Utara	2007		2008		2009		2010		2011	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Danu Panggang	98.477,61	70.496,80	117.504,04	77.754,43	138.848,524	81.824,00	153.924,982	82.066,398	177.983,23	85.254,079
2	Paminggir	45.032,30	32.529,22	51.932,43	35.282,51	58.616,268	38.006,73	72.378,784	39.280,854	80.386,825	41.575,126
3	Babirik	95.089,14	69.989,76	108.326,24	73.582,15	128.261,204	76.823,99	149.381,093	77.851,057	171.892,912	83.236,512
4	Sungai Pandan	104.270,43	73.958,65	122.572,61	81.222,74	129.678,774	83.408,98	151.526,542	88.975,246	174.822,479	95.156,126
5	Sungai Tabukan	49.243,17	35.085,38	68.056,04	44.894,79	78.808,712	48.452,344	91.579,501	49.156,123	106.019,870	52.324,606
6	Amuntai Selatan	163.140,38	121.400,18	175.920,66	124.853,44	196.387,848	128.461,86	227.127,996	135.265,975	261.558,469	143.093,375
7	Amuntai Tengah	227.784,47	159.531,05	252.122,16	164.534,97	293.691,915	176.743,61	344.332,111	189.380,265	390.841,211	203.690,171
8	Banjang	74.068,58	53.513,02	81.406,78	55.273,88	94.974,526	59.783,54	123.070,113	64.945,429	136.735,908	68.670,176
9	Amuntai Utara	106.687,49	75.033,74	120.310,32	80.432,75	130.958,240	82.615,55	152.183,150	85.112,934	172.152,430	90.170,085
10	Haur Gading	72.341,38	50.654,39	78.938,14	52.643,48	87.807,466	55.872,57	102.318,382	58.131,247	115.782,576	62.556,629
	Kabupaten	1.036.134,94	742.192,18	1.168.733,19	790.475,14	1.338.033	832.029,10	1.567.822,65	870.165,527	1.788.175,91	925.726,884
	Provinsi										
	Nasional										

b. Inflasi

Tabel 2.14.
Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2007 s.d 2011
Provinsi Kalimantan Selatan

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	2,875	5,908	8,768	6,457	7,029	6,240

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di tingkat konsumen yang perhitungannya didasarkan kepada indek harga konsumen. Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang dan jasa mengalami kenaikan pada bulan yang bersangkutan dan sebaliknya jika harga barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah harganya dari bulan sebelumnya maka terjadi deflasi.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Tabel 2.15.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2011
Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Uraian	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	143.511	145.849	148.193	140.578	140.117
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	149.709	152.148	154.577	146.451	145.925
3	Angka melek huruf	95,86	95,86	95,87	95,99	96,02

Pada tabel 15. diatas terlihat perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2007 s.d tahun 2011 terjadi peningkatan dari 95,86 pada tahun 2007 menjadi 96.02 pada tahun 2011, hal ini terlihat dari

perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas berbanding lurus.

Sedangkan angka melek huruf tiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2010 yang tertinggi menurut persentasi ada di Kecamatan Haur Gading yakni sebesar 99,28% dan terendah di Kecamatan Amuntai Utara yakni sebesar 93,43%.

Tabel 2.16.
Angka Melek Huruf Tiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Danau Panggang	15.453	15.803	97.79
2	Paminggir	3.874	3.964	97.73
3	Babirik	10.665	11.075	96.30
4	Sungai Pandan	15.896	16.076	98.88
5	Sungai Tabukan	8.444	8.564	98.60
6	Amuntai Selatan	13.426	13.926	96.41
7	Amuntai Tengah	27.544	28.104	98.01
8	Banjang	9.843	10.163	96.85
9	Amuntai Utara	4.549	4.869	93.43
10	Haur Gading	9.687	9.757	99.28
	Jumlah	119.381	122.301	95.99

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tabel 2.17.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 s.d 2011

NO	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	2/10.000	2/10.000	2/10.000	2/10.000	2/10.000
2	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	5/10.000	6/10.000	6/10.000	6/10.000	7/10.000
3	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	1/10.000	1/10.000	1/10.000	1/10.000	1/10.000

Capaian pembangunan pada peningkatan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak begitu mengalami perkembangan terutama pada jumlah grup kesenian, hal ini dikarenakan tidak adanya gedung kesenian yang representatif untuk bidang seni. Hal tersebut juga berlaku untuk jumlah klub olahraga, walaupun ada peningkatan jumlah klub namun keberadaan gedung olahraga masih tetap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.18.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

NO	Hulu Sungai Utara	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Danau Panggang	1/10.000		6/10.000	/10.000
2	Paminggir	-		7/10.000	1/10.000
3	Babirik	1/10.000		8/10.000	1/10.000
4	Sungai Pandan	2/10.000		8/10.000	1/10.000
5	Sungai Tabukan	-		8/10.000	1/10.000
6	Amuntai Selatan	1/10.000		9/10.000	1/10.000
7	Amuntai Tengah	6/10.000		8/10.000	1/10.000

NO	Hulu Sungai Utara	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
8	Banjang	1/10.000		6/10.000	1/10.000
9	Amuntai Utara	1/10.000		7/10.000	1/10.000
10	Haur Gading	-		6/10.000	1/10.000
	Rata-rata	2/10.000		7/10.000	1/10.000

Pada tabel diatas terlihat perkembangan seni, budaya dan olahraga pada tiap kecamatan dengan jumlah grup kesenian dan klub olahraga terbanyak terdapat pada Kecamatan Amuntai Tengah, ini dikarenakan letak Kecamatan Amuntai Tengah berada di pusat kota. Sedangkan untuk fasilitas gedung baik untuk kesenian maupun olahraga merata di semua kecamatan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Pelayanan Wajib

a. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu pula. Nilai APK di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk jenjang pendidikan SD/MI mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 nilainya melebihi 100, yang berarti bahwa terdapat anak dibawah 7 tahun yang sudah bersekolah SD/MI dan terdapat anak yang berusia lebih dari 12 tahun masih bersekolah ditingkat SD/MI. Hal ini sangat berbeda sekali dengan jenjang pendidikan SMP/MTS, angka partisipasi kasarnya masih relatif kecil, artinya banyak anak usia sekoah SMP/MTS yang tidak bersekolah yang disebabkan bukan karena kekurangan sekolah tetapi karena kurang sadarnya masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM, namun angka APK SMP/MTS dari tahun ke tahun cenderung merangkak naik

Tabel 2.19.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008s/d 2011

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah murid yang bersekolah di SD/MI	30.860	29.998	25.946	29.139
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	27.096	26.594	26.184	28.334
1.3.	APK SD/MI	113,89	112,8	99,09	102,84
2	SMP/MTs				
2.1.	Jumlah murid yang bersekolah di SMP/MTs	5.934	10.602	10.012	10.008
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	14.080	13.688	12.752	11.941
2.3.	APK SMP/MTs	42,15	77,46	78,52	83,81

Sumber : BPS dan Dinas PK

Angka Partisipasi Murni berguna untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk usia sekolah/daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk jenjang pendidikan SD/MI dari Tahun 2007 sampai 2011 mengalami perubahan nilai , yaitu sebesar 95,42 pada Tahun 2007 turun menjadi 94,91 pada tahun 2008 dan 93,19 tahun 2009, kemudian naik lagi menjadi 94,24 pada tahun 2010 dan menurun kembali pada tahun 2011 yaitu 92,85 . Begitu pula Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu sebesar 47,39 pada Tahun 2007 menurun menjadi 35,59 ditahun 2008 meningkat menjadi 65,64 Tahun 2009 dan menurun lagi menjadi 60,67 pada tahun 2010 kemudian meningkat kembali pada tahun 2011 yaitu sebesar 68,62. Idealnya nilai Angka Partisipasi Murni adalah 100, yang berarti semua penduduk yang masuk dalam kelompok umur usia sekolah semuanya bersekolah, demikian juga jika angka APM belum mendekati angka 100 berarti masih banyak anak usia sekolah yang tidak/belum mengenyam pendidikan/sekolah berdasarkan kelompok umur standar. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.20.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Sekolah (APM)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 s.d 2011

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	26.335	25.717	24.783	24.780	24.665
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	27.559	27.096	26.594	25.764	26.564
1.3.	APM SD/MI	95,42	94,91	93,19	94,24	92,85
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	6.649	4.872	5.138	8.604	8.373
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	14.030	13.688	7.827	14.189	11.941
2.3.	APM SMP/MTs	47,39	35,59	65,64	60,67	68,62

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang putus sekolah dan tidak bersekolah berbanding dengan jumlah penduduk usia sekolah tertentu pula. Semakin tinggi angka putus sekolah akan memberikan dampak pada lambatnya peningkatan kualitas SDM, idealnya APS mendekati angka Nol yang berarti bahwa semua penduduk usia sekolah semuanya menikmati sekolah, baik tingkat SD/MI sampai perguruan tinggi. Lihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.21.
Prosentase Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009s/d 2012

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	APS SD/MI	4,44	5,09	6,81	5,76	7,15
2	SMP/MTs					
2.2.	APS SMP/MTs	52,60	64,40	34,35	39,26	31,38

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2007 sampai dengan 2011 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan dari 96,16 pada Tahun 2007 menjadi 102,35 pada Tahun 2011. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs berfluktuatif yaitu pada Tahun 2007 sebesar 39,47 meningkat pada Tahun 2008 yaitu sebesar 42,77 dan kemudian pada Tahun 2009 yaitu sebesar 43,10 dan meningkat lagi menjadi 48,59 pada tahun 2011.

Tabel 2.22.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 s.d 2011

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	265	264	265	267	268
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	27.559	27.096	26.594	25.764	26.184
1.3.	Rasio	96,16	97,43	99,65	101,97	111,52
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	56	60	59	63	62
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	14.189	14.030	13.688	12.759	12.759
2.3.	Rasio	39,47	42,77	43,10	48,59	48,59

Untuk tiap kecamatan memiliki rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama pada jenjang pendidikan SD/MTs, namun terdapat perbedaan pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Kecamatan Paminggir mempunyai ratio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang paling tinggi yaitu 92,6 disusul kemudian oleh Kecamatan Sungai Pandan dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan rasio 60,8 dan 58,0 hal ini dikarenakan kondisi geografis kecamatan-kecamatan tersebut banyak yang aksesibilitas melalui air disamping relatif baiknya persepsi masyarakat tentang pendidikan, sehingga untuk kelompok masyarakat tertentu perlu jumlah sekolah yang lebih banyak, agar masyarakat bisa mendapatkan

haknya dalam bidang pendidikan, dan kebalikannya Kecamatan Banjang ratio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang paling kecil yaitu 31,1 hal ini dikarenakan jarak Kecamatan Banjang ke kota relatif dekat.

Tabel 2.23.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

NO	Hulu Sungai Utara	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Danau Panggang	25	2.763	90,5	8	1.301	61,5
2	Paminggir	13	1.043	124,6	4	432	92,6
3	Babirik	27	2.366	114,1	6	1.206	49,8
4	Sungai Pandan	38	3.246	117,1	10	1.646	60,8
5	Sungai Tabukan	18	1.751	102,8	3	846	35,5
6	Amuntai Selatan	30	3.348	89,6	8	1.543	51,8
7	Amuntai Tengah	47	5.728	82,1	10	2.724	36,7
8	Banjang	27	1.953	138,2	3	905	33,1
9	Amuntai Utara	24	2.313	103,8	4	1.287	31,1
10	Haur Gading	19	1.673	113,6	5	862	58,0
	Jumlah	268	26.148	107,6	61	12.752	51,1

c. Rasio Guru/Murid

Perbandingan jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2007 hingga Tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 99,60 pada Tahun 2007

meningkat menjadi 115,790 pada Tahun 2011. Sedangkan untuk SMP/MTs berfluktuasi ditiap tahunnya, hal ini seperti terlihat di tabel berikut.

Tabel 2.24.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007s.d 2011

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	2.922	3.201	2.999	3.233	3.374
1.2.	Jumlah Murid	29.338	29.771	29.105	29.260	29.139
1.3.	Rasio	99,60	107,52	103,04	110,492	115,790
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	972	1.063	984	1.159	1.113
2.2.	Jumlah Murid	9.897	9.652	9.833	10.077	11.159
2.3.	Rasio	98,2	1.101,33	1.000,71	1.150,14	997,40

Rasio guru terhadap jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI per kecamatan yang tertinggi adalah kecamatan Amuntai Utara dengan rasio sebesar 154, kemudian disusul Kecamatan Haur Gading dan Kecamatan Babirik dengan rasio sebesar 146 dan 121, sedangkan Kecamatan Paminggir rasio gurunya adalah terkecil yaitu sebesar 89. Untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs rasio guru tertinggi adalah Kecamatan Haur Gading sebesar 1.439, disusul Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Sungai Pandan dengan rasio guru terhadap murid sebesar 1.412 dan 1.120. Sedangkan untuk Kecamatan Amuntai Utara rasionya adalah yang terkecil yaitu sebesar 669.

Tabel 2.25.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

NO	Hulu Sungai Utara	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Danau Panggang	287	3.237	88,66	110	1.084	1.014
2	Paminggir	139	1.338	103,89	61	432	1.412
3	Babirik	330	2.733	120,75	118	1.360	867

NO	Hulu Sungai Utara	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
4	Sungai Pandan	431	3.994	107,91	192	1.714	1.120
5	Sungai Tabukan	203	1.884	108,91	49	459	1.067
6	Amuntai Selatan	425	3.547	119,82	132	1.196	1.103
7	Amuntai Tengah	687	6.031	113,91	226	2.419	934
8	Banjang	288	2.336	114,60	52	535	971
9	Amuntai Utara	337	2.367	153,88	95	1.418	669
10	Haur Gading	247	1.692	145,98	78	542	1.439
	Jumlah	3.374	29.159	115,79	1.113	11.159	997

Di Hulu Sungai Utara pada tahun 2011 dalam setiap 1.000 siswa SD/MI terdapat 116 orang guru SD/MI, sedangkan dalam setiap 10.000 siswa SMP/MTs terdapat 997 orang guru SMP/MTs.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Salah satu langkah pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah memperluas kesempatan kerja, namun demikian besarnya kesempatan kerja tergantung dari kondisi dunia usaha, langkah pemerintah lebih banyak pada pengambilan kebijakan agar mampu memberi iklim kondusif bagi dunia usaha. Sektor primer tidak menjadi lagi sektor dominan bagi penyerapan tenaga kerja, sektor ini hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 32,82 persen, diduga penyebabnya adalah kondisi iklim yang berubah-ubah sehingga probabilitas keberhasilannya berkurang dan mulai melirik sektor lain yang lebih prospektif, misalnya sektor industri dan sektor jasa. Dan ini terbukti bahwa sektor Industri dan Jasa menyerap tenaga kerja sebesar 26,29 persen dan 40,88 persen. Kemampuan penyerapan tenaga kerja tiap sektor berbeda tergantung dari elastisitas kesempatan kerja dan koefisien tenaga kerjanya.

Tabel 2.26.
 ProsentasePenduduk15 Tahun Keatas Yang Bekerja
 Menurut Sektor dan Jenis Kelamin.
 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

NO	Sektor	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	35,63	29,01	32,82
2	Industri	19,06	36,16	26,29
3	Jasa	45,31	34,86	40,88
	Jumlah	100	100	100

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT perkapita)

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk dilihat dari segi ekonomi.

Pengeluaran rata-rata per kapita pertahun Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2008 hingga Tahun 2011 berfluktuatif seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Angka Konsumsi RT perkapita
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2011

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penduduk	216.181	218.108	209.246	211.699
2.	Jumlah Rumah Tangga	53.679	55.345	53.742	54.430
3.	Ratio (1/2)	4,028	3,94	3,89	3,89
4.	Pengeluaran Perkapita	626.090	630.850	632,920	635,190
5.	Total Pengeluaran Rumah Tangga	2.521,89	2.485,549	2.462,058	2.470,880

Sumber : BPS HSU, KDA, diolah.

2. Nilai Tukar petani

Hulu Sungai Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani. Secara konseptual nilai tukar petani adalah mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. Di sini petani dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen, semakin tinggi NTP semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Adapun nilai tukar petani di Kabupaten Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2011

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	112,67	125,54	135,98	142,35
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	117,69	119,55	126,43	131,49
3.	Rasio	95,74	105,01	107,56	108,26

Sumber : BPS HSU

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen tunggal terbesar dari pengeluaran keseluruhan aktual, tetapi ada yang menentukan jumlah yang ingin dibelanjakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsinya dan berapa banyak yang ingin mereka tabung. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah pendapatan sisa rumah tangga. Dengan meningkatnya pendapatan sisa, rumah tangga mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. Umumnya pada rumah tangga dengan tingkat pendapatan tinggi, porsi konsumsi makanan semakin berkurang seiring dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Hal ini disebabkan konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi non makanan. Dengan demikian porsi konsumsi makanan dan non makanan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk atau rumah tangga. Total pengeluaran rumah tangga non pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2007 hingga Tahun 2011 mengalami peningkatan dari 34,44 persen pada Tahun 2007 menjadi 39,21 persen pada Tahun 2011, seperti terlihat di table 2.29 berikut.

Tabel 2.29.
Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 s.d 2011

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan	34,44	44,18	44,18	34,82	39,21
2.	Total Pengeluaran	100	100	100	100	100
3.	Rasio	0,34	0,44	0,44	0,34	0,39

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak potensi untuk mengembangkan/meningkatkan produksi, utamanya sektor pertanian melalui perluasan lahan/ekstensifikasi. Hal ini karena dari potensi lahan yang ada, baru 36,73 persen luas wilayah budidaya yang sudah dimanfaatkan sementara luas wilayah untuk budidaya seluas 86.617,59 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan baru termanfaatkan seluas 31.820,72 ha.

Tabel 2.30.
Persentase luas Wilayah Produktif
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

NO	Uraian	2010
1.	Luas Wilayah produktif (ha)	31.820,72
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (ha)	86.617,59
3.	Rasio 1 : 2 (%)	36,73

Tabel 2.31.
Persentase luas Wilayah Produktif (Ha) Tiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010

NO	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Danau Panggang	1.792,07	13.342,96	0,134
2	Paminggir	-	18.308,32	-
3	Babirik	3.162,41	7.034,85	0,45
4	Sungai Pandan	5.259,24	5.814,76	0,97
5	Sungai Tabukan	1.188,83	1.824,61	0,65
6	Amuntai Selatan	1.553,34	15.720,94	0,097
7	Amuntai Tengah	7.209,56	7.905,96	0,91
8	Banjang	9.046,15	9.206,02	0,99
9	Amuntai Utara	1.907,07	3.811,47	0,50
10	Haur Gading	731,01	3.647,64	0,20
	Jumlah	31.820,72	86.617,59	0,36

c. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Iklim investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Indikator yang berguna dalam menggambarkan tingkat keamanan masyarakat adalah indikator angka kriminalitas, semakin rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan. Selain itu investasi yang masuk ke suatu daerah juga bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing suatu daerah berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan di pengaruhi oleh berbagai variabel diantaranya regulasi, perbankan, stabilitas (keamanan/ kriminalitas), perijinan dan hotel. Investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung tingkat resiko yang rendah (keamanan) dan iklim investasi yang kondusif diantaranya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*High Cost*). Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2007 sampai dengan 2011 berfluktuatif yaitu sebesar 0,09 pada tahun 2007 naik turun hingga menjadi sebesar 3,92 pada tahun 2011.

Tabel 2.32.
Angka Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 s.d 2011

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	14	12	7	30
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	2	2	2	0	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	1	3	1	2
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	13	10	7	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	50	69	65	43
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	1	1	6
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal/1 Thn	2	80	97	81	83
9.	Jumlah Penduduk	214.191	216.181	218.109	209.246	211.669
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,09	3,73	4,49	3,87	3,92

Sumber : Polres HSU

2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demo di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Tahun 2008 sampai dengan 2011 kecenderungannya terjadi penurunan, Jumlah demo pada tahun 2008 terjadi sebanyak 6 kali menurun menjadi 3 kali pada tahun 2011.

Tabel 2.33.
Jumlah Demo di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2008 s.d 2011

No	Uraian	2008	2009	2010	2011
1	Bidang Politik	3	5	2	3
2	Ekonomi	3	2	1	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	6	7	3	3

Sumber : Polres HSU

d. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.34.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2006 s.d 2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	64.482	64.066	63.532	62.710	31,06
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	8.979	9.114	9.310	8.515	4,00
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	73.461	73.180	72.842	71.225	35,06
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	140.730	143.000	145.267	131.677	64,94
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	52,19	51,17	50,21	51,60	53,99

Sumber : BPS HSU

Dari tabel di atas rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 berfluktuatif dari sebesar 52,19 pada tahun 2007 menurun menjadi 51,17 pada tahun 2008 kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 50,21 pada tahun 2009 dan naik lagi menjadi 51,60 pada tahun 2010, kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 53,99 pada tahun 2011.

Tabel 2.35. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja								Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	9	10		
2		3	4	5	6	7	8				
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
	PDRB ADH Konstan (dlm ribuan)	697.545.445	742.192.179	790.475.137	832.029.106	870.165.527	925.726.884				
	PDRB ADH Berlaku (dln ribuan)	931.081.558	1.036.134.937	1.168.733.186	1.338.032.527	1.576.822.655	1.778.175.912				
	Perkembangan PDRB ADHK		132,41%	141,02%	148,42%	161,97%					
	Perkembangan PDRB ADHB		184,85%	208,50%	231,33%	242,74%					
	Pertumbuhan PDRB ADHK	4,06%	5,96%	6,51%	5,25%	4,33%	6,39%				
	Pertumbuhan PDRB ADHB	8,08%	8,88%	12,80%	10,95%	11,07%	14,05%				
	Inflasi		2,875 %	5,908 %	8,768 %	6,457 %	7,029 %				
1.2.	Kesejahteraan Sosial										
	Angka melek huruf	95,86	95,86	95,86	95,87	95,99	96,02				
1.3.	Seni Budaya dan Olahraga										
	Jumlah grup kesenian/10.000 pend	2	2	2	2	2	2				
	Jumlah klub olahraga/10.000 pend	3	3	5	5	5	7				
	Jumlah gedung olahraga/10.000 pend	1	1	1	1	1	1				
2	PELAYANAN UMUM										
2.1.	Pelayanan Wajib										
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI		113,89	113,89	112,80	99,09	102,84				
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs		56,80	42,15	77,46	78,52	83,81				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja									Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2006	2007	2008	2009	2010	2011					
	Angka Partisipasi Murni SD/MI		95,42	94,91	93,19	94,24	92,5					
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs		47,39	35,59	65,64	60,67	68,62					
	Angka Putus Sekolah SD/MI		4,44	5,09	6,81	5,76						
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS		52,60	64,40	34,35	39,36						
	Rasio Ketersediaan Sekolah& Penduduk Usia Sekolah SD/MI		96,16	97,43	99,65	101,97	111,52					
	Rasio Ketersediaan Sekolah& Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs		39,47	42,77	43,10	48,59	48,59					
	Rasio Guru/Murid SD/MI	85,28	99,60	107,52	88,438	110,42	115,790					
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	100,42	98,2	1.101,33	1.000,71	1.150,14	997,40					
2.2.	Layanan Urusan Pilihan (Rasio Daya Serap Tenaga Kerja)											
	Sektor Primer				41,42	41,42	32,82					
	Sektor Sekunder				21,12	21,12	26,29					
	Sektor Tersier				37,45	37,45	40,88					
3	DAYA SAING DAERAH											
3.1	Kemampuan Ekonomi Daerah											
	Angka Konsumsi RT Perkapita			626.090	630.850	632.920	635.190					
	Nilai Tukar Petani			95,74	14,76	107,56	108,26					
	Konsumsi RT Non Pangan	0,35	0,34	0,45	0,33	0,34	0,39					
3.2.	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur											
	Luas Wilayah Produktif	47,88	47,88	50,23	66,27	37,73	36,73					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2006	2007	2008	2009	2010	2011			
3.3.	Iklm Berinvestasi									
	Angka Kriminalitas		0,09	3,73	4,49	3,87	3,92			
	Jumlah Demontasi			6	7	3	3			
3.4.	Sumber Daya Manusia									
	Tingkat Ketergantungan	52	52,19	51,17	50,21	51,60	53,99			

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 ditetapkan 6 prioritas daerah beserta berbagai sasaran yang diinginkan yang tercakup dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang memperoleh porsi anggaran dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012. Prioritas daerah dimaksud meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3. Optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan Kualitas Keagamaan, sosial dan budaya
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana
6. Pengembangan wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup.

Atas dasar prioritas daerah tersebut di atas, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2012 terarah pada program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai prioritas daerah tersebut serta sasaran yang diinginkan. Dalam evaluasi terhadap capaian prioritas daerah dan sasaran pembangunan tahun 2012 terarah pada penyerapan alokasi anggaran. Hal ini karena untuk melihat capaian kinerja makro dibutuhkan ketersediaan data-data dari Badan Pusat Statistik tahun 2012 yang hingga disusunnya dokumen RKPD Tahun 2014 ini belum tersedia.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan, baik urusan wajib maupun pilihan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengalokasikan anggaran berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari dana APBD maupun APBN (berupa DAK dan Tugas Pembantuan). Pada tahun 2012, dana APBD yang dialokasikan untuk semua urusan yang dilaksanakan oleh semua unit kerja/SKPD adalah untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Secara terinci realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2012 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada pada setiap SKPD dapat dirincikan sebagai berikut :

1) Urusan Wajib Pendidikan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, BAPPEDA serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang secara keseluruhan memiliki alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 209.353.902.225 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 50.757.481.020. Total yang direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan sebesar Rp. 243.628.127.936,- atau sebesar 93,66% dari total anggaran. Penyerapan anggaran tinggi yang berarti sebagian besar program dan kegiatan dapat dilaksanakan, baik APBD murni maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk urusan wajib pendidikan yang ada di BAPPEDA dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah realisasinya hampir 100% karena alokasi anggarannya kecil dengan program dan kegiatan yang tidak banyak.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yakni :

A. Dinas Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja langsung urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 50,417,036,820,- dan terealisasi sebesar Rp. 44,899,599,207,- atau 89,06%. Alokasi tersebut dijabarkan dalam 11 program dan 76 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 93,68%. Berbagai program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6. Pendidikan anak usia dini;
7. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
8. Pendidikan menengah;
9. Pendidikan non formal;
10. Pendidikan luar biasa;
11. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Beberapa masalah dalam pada Dinas Pendidikan diantaranya adalah masih terbatasnya dana APBD untuk melaksanakan seluruh program yang menjadi kewajiban di bidang pendidikan dan masih rendahnya tingkat Pengetahuan Sumber Daya Aparatur terhadap aturan dan pelaksanaan peraturan, dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

B. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Urusan pendidikan pada SKPD ini hanya ada satu program yaitu Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan jumlah anggaran Rp. 216.823.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 216.804.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran. Program ini untuk meningkatkan minat dan budaya baca di masyarakat, diantaranya dengan sosialisasi dan peningkatan mutu perpustakaan, baik sarana dan prasarannya maupun jumlah dan kualitas bukunya.

2) Urusan Wajib Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh 2 SKPD yakni Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai. Total alokasi anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 71.640.309.723,2 dengan realisasi sebesar Rp. 64.418.123.019,- atau 89,92%. Dari kedua SKPD tersebut realisasi terbesar pada Rumah Sakit Umum

Daerah Pembalah Batung. Adapun program dan kegiatan pada masing-masing SKPD tersebut sebagai berikut :

A. Dinas Kesehatan

Total alokasi anggaran untuk urusan kesehatan yang disediakan adalah sebesar Rp. 45.300.397.223,- dengan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.555.265.123,-. Realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 16.415.368.165,- atau 79,85%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2012 terdiri dari 25 program dan 85 kegiatan. Berbagai program dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan capaian kinerja (output dari Program dan Kegiatan) Dinas Kesehatan sebesar 76,25%. Beberapa Program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi dan sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan makanan dan minuman
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan rumah jabatan/dinas
 - b. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - e. Pengadaan meubeller
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 - b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
 - c. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
 - b. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
 - c. Revitalisasi sistem kesehatan
 - d. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
 - e. Peningkatan kesehatan masyarakat
 - f. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
 - g. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
 - h. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
 - i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan
 - a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan
 - b. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
7. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
 - a. Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
 - b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
 - c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

- b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
 - c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
 - b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
 - c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- a. Fogging sarang nyamuk
 - b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
 - c. Pelayanan dan pencegahan penyakit menular
 - d. Peningkatan imunisasi
 - e. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- a. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
 - b. Peningkatan kualitas dan akreditasi RS/Puskesmas
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin
- a. Pelayanan sunatan massal
 - b. Penanggulangan ISPA
 - c. Penanggulangan penyakit cacung
 - d. Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- a. Pembangunan posyandu

- b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
 - g. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
 - b. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
 16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - a. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 18. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - a. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
 19. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
 - b. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu
 20. Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat
 - a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Luncuran sisa DAK)

Beberapa permasalahan di Dinas Kesehatan menyangkut urusan wajib kesehatan adalah Peningkatan jumlah kematian Ibu dibanding tahun

sebelumnya, masih banyak bidan desa yang belum tinggal di desa karena alasan tempat tinggal berakibat pelayanan tidak optimal, kasus gizi buruk masih ditemukan dengan kondisi kronis serta penyakit penyerta, manajemen Puskesmas yang belum berjalan dengan baik, masih rendahnya cakupan masyarakat yang memiliki akses air minum berkualitas (sarana air bersih) yaitu 64,42% dari target MDGs dan RPJM 76%, dan masalah-masalah lainnya yang perlu mendapat perhatian.

B. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung

Program dan kegiatan urusan wajib kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai selama tahun anggaran 2012 terdiri dari mencakup 7 program dan 23 kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan bahan logistik kantor
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - b. Pengadaan meubeleur
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
 - b. Peningkatan kualitas dan akreditasi RS
- 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 - a. Belanja alat-alat kesehatan rumah sakit
 - b. Pengadaan mebeuleur rumah sakit
 - c. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
- 7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
 - b. Pemeliharaan ruttin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah batung realisasi anggarannya cukup tinggi dengan capaian di atas 90%, hanya ada 2 kegiatan yang capaiannya sangat kecil yaitu yaitu kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dan (14,93%) dan kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS (6,50%).

3) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan ini dilaksanakan oleh empat SKPD, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA), serta Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota. Adapun rincian kegiatan serta anggaran untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran pada Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 2.168.482.200,- dengan realisasi sebesar 1.879.832.552,- atau

86,70%. Dana yang tersedia tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 19 kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a. Pemantauan kualitas lingkungan
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - c. Pengkajian dampak lingkungan
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
 - e. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana prasarana LH (DAK)
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
 - a. Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - b. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - a. Pengujian emisi kendaraan bermotor
 - b. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
7. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Secara umum program dan kegiatan pada SKPD ini dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup bagus, namun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, sehingga capaian realisasi anggaran kurang dari 90%. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup. Kegiatan tidak dilaksanakan karena melibatkan beberapa sektor terkait sedangkan alokasi dana yang disediakan sangat kecil, hanya sebesar Rp.7.420.300 sehingga tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Kegiatan Pengujian Emisi kendaraan bermotor yaitu melaksanakan pengukuran udara ambien di beberapa tempat seperti tempat usaha / kegiatan, lingkungan perkantoran dan beberapa ruas jalan protokol untuk lingkungan pemukiman yang arus lalu lintas kendaraan cukup tinggi. Kegiatan ini tidak terlaksana karena pihak ketiga Laboratorium yang terakreditasi pelaksana pemeriksaan dan pengujian kualitas udara mengalami kerusakan beberapa alat ukur udara sehingga tidak dapat melakukan penjadwalan kegiatan.

Beberapa permasalahan pada SKPD ini adalah belum optimalnya penjadwalan pemeriksaan kualitas udara oleh pihak ketiga, terbatasnya alokasi dana anggaran beberapa kegiatan serta kurangnya SDM teknis dalam bidang lingkungan hidup.

B. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)

Urusan lingkungan hidup pada Bagian Perekonomian dan SDA hanya bersifat koordinasi dengan alokasi anggaran yang kecil, yaitu sebesar Rp. 48.225.000,- dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 20.189.775,- atau hanya sebesar 41,86%. Adapun capaian kinerja yang bisa dilaksanakan hanya sebesar 42,00%. Program dan kegiatannya adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup

C. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran untuk urusan Lingkungan Hidup yang disediakan pada SKPD ini sebesar Rp. 64.200.000,- dengan realisasi sebesar 90,07% dari alokasi anggaran dan output kinerja 100%. Program dan kegiatannya adalah :

1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - a. Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mengintegrasikan KLHS dengan Rancangan awal RPJMD HSU 2013-2017.

D. Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota

Anggaran untuk urusan LH yang disediakan pada Dinas ini sebesar Rp. 2.353.280.000,- untuk mendanai 2 program dan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
2. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - a. Penataan RTH

Realisasi anggaran yang dapat dicapai dari program dan kegiatan di atas sebesar Rp. 2.236.740.000,- atau 95,05%. Untuk program pengelolaan persampahan realisasi keuangan maupun kinerja tidak sampai 100%, sedangkan untuk pengelolaan RTH kinerjanya mencapai 100%.

4) Urusan wajib bidang Pekerjaan Umum

Urusan ini dilaksanakan oleh empat SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BAPPEDA. Total alokasi anggaran (Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung) untuk urusan pekerjaan umum ini sebesar Rp. 106.847.586.670,- dengan realisasi Rp. 95.612.196.402,- atau 89,48%. Adapun rincian kegiatan serta anggaran untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota

Hanya ada satu program dan 2 kegiatan untuk urusan pekerjaan umum di Dinas Pasar Kebersihan dan Tata Kota yaitu :

1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - a. Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Alokasi anggaran yang ada sebesar Rp. 152.790.000,- dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 75.970.000,- atau 49,72% dengan capaian kinerja hanya sekitar 50%.

B. Dinas Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan umum memiliki anggaran yang paling besar diantara urusan lain dan SKPD lain. Alokasi anggaran untuk 2012 adalah sebesar Rp. 107.193.520.670,- dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 103.397.116.470,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.796.404.200,-. Total Realisasi yang dapat dicapai sebesar Rp. 96.216.166.827,- atau 89,76%, dimana realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 93.233.165.583,- atau 90,17% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.983.001.244,- atau 78,57%. Terdapat 13 program dan 29 kegiatan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan alat tulis kantor
 - b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - c. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan tanah
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3. Program pengaturan jasa konstruksi
 - a. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
 - a. Pembangunan turap/talud/bronjong
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
 - d. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
 - e. Rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan irigasi (DAK)
 - f. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi (Luncuran DAK)
6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - a. Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana air minum (DAK dan Luncuran sisa DAK)
7. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - a. Pembangunan/peningkatan infrastruktur
 - b. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana pemerintahan (DAK dan luncuran sisa DAK)
8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
 - b. Peningkatan Prasarana Transportasi perdesaan (DAK)
9. Program peningkatan jalan dan jembatan
 - a. Peningkatan ruas jalan (DAK)
10. Program pemeliharaan jalan dan jembatan
 - a. Pemeliharaan ruas jalan dan jembatan
11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
12. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- a. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
 - b. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Realisasi output dari program dan kegiatan di atas hampir semuanya mencapai 100%. Capaian kinerjanya bagus, namun perlu dilihat outcome dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan target dan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat.

Beberapa permasalahan di Dinas ini adalah kurangnya tenaga teknis serta kualitas dan kemampuan staf yang tidak merata.

5) Urusan wajib Penataan Ruang

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota serta Sekretariat Daerah. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 754.680.000,-. Realisasi anggaran yang dicapai selama tahun 2012 sebesar Rp. 635.069.948,- sehingga persentase anggaran yang terserap adalah sebesar 84,15%. Secara ringkas realisasi urusan wajib penataan ruang berdasarkan pelaksanaannya menurut program dan kegiatan pada masing-masing SKPD adalah :

A. Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota

Alokasi anggaran yang disediakan untuk Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota kecil hanya sebesar Rp. 65.270.000,- dan terserap sebesar Rp. 55.909.673,- atau 94,20% yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan, yaitu :

- 1. Program Pemanfaatan Ruang
 - a. Fasilitasi perijinan IMB dan reklame

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Anggaran Penataan Ruang yang disediakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditahun anggaran 2012 sebesar Rp. 592.460.000,- dan terealisasi Rp. 511.368.750,- atau 86,31%, yang meliputi 3 program dan 6 kegiatan, yaitu :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
 - a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
 - b. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
 - c. Survey dan Pemetaan

Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 454.285.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 400.377.125,- atau 88,13%.

2. Program Pemanfaatan Ruang
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 16.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.893.575,- atau 82,21% dari total anggaran.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - a. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
 - b. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 121.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.098.050,- atau 80,06% dari total anggaran.

Capaian kinerja pada urusan penataan ruang yang dialokasikan di BAPPEDA seluruh realisasi fisiknya 100%, kecuali kegiatan Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak terlaksana.

6) Urusan wajib Perencanaan Pembangunan

Urusan ini dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah. Total anggaran untuk urusan perencanaan pembangunan adalah Rp. 7.461.694.700,- dengan alokasi terbesar pada Bappeda. Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.146.683.396,- atau 83,28%.

Adapun program dan kegiatan pembangunan beserta alokasi dan realisasi anggarannya berdasarkan SKPD pelaksana adalah sebagai berikut :

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Anggaran perencanaan pembangunan yang disediakan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun anggaran 2012 untuk membiayai 11 program dan 38 kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada dalam program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 893,328,000,- dan realisasi sebesar Rp. 823,416,418,- atau 92,17%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan seluruh kegiatan ini sebesar Rp. 237,495,000,- dan direalisasi sebesar Rp. 167,904,935,- atau sebesar 70,70%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal; dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 84,234,500,- atau sebesar 84,23%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 74,327,000,- dan realisasi sebesar Rp. 51,505,175,- atau 69,30%.
5. Program Pengembangan Data/Informasi
 - a. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.860.000,- dan direalisasi sebesar Rp. 41,985,100,- atau 84,21%.
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan ini sebesar Rp. 80.100.000,- dengan realisasi Rp. 50,307,775,- atau sebesar 62,81%.
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana; dengan anggaran Rp. 50,088,500,- dan realisasi Rp. 27,853,000,- atau sebesar 55,61%.
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan rancangan RPJMD
 - b. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

- c. Penetapan RPJMD
- d. Penyusunan rancangan RKPD
- e. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- f. Penetapan RKPD
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
- h. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 566,796,400,- dengan realisasi sebesar Rp. 410,157,750,- atau 72,36%.

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
- b. Penyusunan indikator ekonomi daerah
- c. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
- d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
- e. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 829,325,000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 663,952,850,- atau 80,06%.

10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; dengan alokasi Rp. 410.000.000,- dan direalisasi sebesar Rp. 347,860,150,-. Capaian realisasi anggaran sebesar 84,84%.

Secara keseluruhan capaian kinerja Bappeda untuk urusan perencanaan pembangunan hampir 100%, yang artinya tugas pokok dan fungsi Bappeda telah dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran yang tersedia cukup kecil, yaitu untuk program dan 2kegiatan hanya sebesar Rp. 7.445.000,-. Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Data/Informasi
 - a. Pengumpulan, updating, dan analisa data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

C. Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan dan Bagian Pemerintahan)

Urusan wajib Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Bagian Pembangunan. Program dan kegiatan untuk masing-masing bagian meliputi :

- Bagian Pemerintahan
 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - a. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Koordinasi penyusunan LKPJ
- Bagian Pembangunan :
 1. Program Pengembangan Data/Informasi
 - a. Pengumpulan, updating, dan analisa data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
 2. Program Kerjasama Pembangunan
 - a. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7) Urusan wajib Perumahan

Urusan ini dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. 1.778.217.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.631.326.900,- atau sebesar 91,74%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Dinas Pekerjaan Umum

Anggaran untuk urusan perumahan di Dinas Pekerjaan Umum digunakan untuk mendanai Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan Penyediaan sarana penyehatan dan sanitasi lingkungan (DAK). Capaian kinerja dengan output 100%.

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Dana yang dialokasikan untuk Program Pengembangan Perumahan dengan 2 Kegiatan, yaitu Kegiatan penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan serta kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan dana sebesar Rp. 265,337,500,- dan realisasi sebesar Rp. 190,404,900,- atau 71,76% dan capaian kinerja 100%.

C. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman sebesar Rp. 109.400.000,- dengan realisasi Rp. 108.390.000,- atau 99,07% dengan capaian output 100%.

8) Urusan wajib Perhubungan

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota. Anggaran yang tersedia untuk belanja urusan perhubungan (BL dan BTL) sebesar Rp. 7.146.403.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.272.363.841,- atau 87,77%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Terdapat 5 program dan 16 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

- d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
 - b. Pengadaan mebeleur
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - a. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan (Luncuran DAK)
 - b. Pembangunan sarana/prasarana angkutan sungai
 - c. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana prasarana perhubungan di perdesaan (DAK)
 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatannya : Rehabilitasi dan Pemeliharaan traffic light, warning light dan rambu – rambu lalu lintas sebesar
 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
 - b. Penciptaan disiplin dan pemeliharaan keberhasilan di lingkungan terminal
 - c. Pengendalian disiplin angkutan sungai dan pemeliharaan kebersihan alur sungai
 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
 - b. Pengadaan marka jalan
 - c. Pengadaan sarana prasarana dan peningkatan keselamatan transportasi darat (DAK)

B. Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota

Program yang dilaksanakan oleh SKPD ini hanya satu yakni Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas berupa kegiatan pengadaan

alat-alat penerangan jalan dengan anggaran sebesar Rp. 68.245.000,- dan realisasi sebesar Rp. 67.025.000,- atau sebesar 98,20%.

9) Urusan wajib Pertanahan

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan. Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib bidang Pertanahan ini yakni :

1. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 - a. Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

10) Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ada 5 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan guna pelaksanaan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil ini yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan meubeleur
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penataan administrasi Kependudukan
 - a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
 - b. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
 - c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
 - d. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
 - e. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
 - f. Pengembangan data base kependudukan
 - g. Penyusunan kebijakan kependudukan
 - h. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
 - i. Sosialisasi kebijakan kependudukan
 - j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini dialokasikan anggaran (BL dan BTL) sebesar Rp. 5.791.982.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.681.100.467,- atau 80,82%. Untuk Belanja Langsung dana yang tersedia sebesar Rp. 3.927.598.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.218.676.987,- atau sekitar 82%. Terdapat beberapa kegiatan yang memiliki capaian realisasi keuangan dan kinerja yang kurang dari 50,00% yaitu kegiatan yang berupa kegiatan penunjang.

Adapun beberapa permasalahan pada urusan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, Masih kurangnya tenaga registrasi yang khusus menangani data kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat Kelurahan / Desa, dll.

11)Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana untuk bidang pemberdayaan perempuan di Tahun Anggaran 2012 yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - a. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
 - a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
 - b. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
 - c. Pembinaan pengelolaan desa P2W-KSS

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Capaian output untuk semua kegiatan hampir 100%, sehingga kinerja pencapaian output dinilai cukup bagus.

12) Urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, KPLH, Dinas Koperindag, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, BP4KKP, BPMPD dan Kecamatan. Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 3.073.596.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.831.696.700,-. Capaian realisasi anggaran sebesar 92,13%.

Terdapat 8 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga di tahun 2012 ini, yaitu :

1. Program Keluarga Berencana
 - a. Pelayanan KIE
 - b. Pembinaan keluarga berencana
 - c. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
 - d. Pengolahan data dan pelaporan
 - e. Penyediaan dukungan operasional program KB nasional
 - f. Peningkatan kerjasama mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian
 - g. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana prasarana KB (DAK)
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
 - b. Pelayanan KB medis operasi
4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
 - a. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

5. Program Peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
 - a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
7. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
 - a. Pembentukan BKB-posyandu terpadu percontohan
8. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
 - a. Pembinaan teknis, pelatihan, permodalan dan pemasaran kelompok
 - b. Pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (Catur Bina) serta posyandu

Untuk capaian realisasi keuangan maupun kinerja, terdapat beberapa kegiatan yang memiliki capaian realisasi di bawah 50,00%. Bahkan untuk kegiatan dari dana DAK capaian kinerjanya hanya 20,00% karena kegiatan pengadaan Mobil dan sepeda motor untuk operasional KB yang tidak bisa dilaksanakan.

13) Urusan wajib Sosial

Ada tiga SKPD yang melaksanakan urusan ini, yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan urusan wajib Sosial secara keseluruhan sebesar Rp. 5.359.762.400,- dan yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 4.289.134.754,- atau 80,02%. Adapun program dan kegiatan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ada 8 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan urusan wajib Sosial.

Program-program tersebut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
5. Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan Anak Terlantar
7. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dari keseluruhan program tersebut, beberapa program memiliki realisasi capaian input maupun output yang kurang maksimal (berada di kisaran 50,00%), bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, seperti Penyusunan data by name by address PMKS. Beberapa masalah yang ada dalam urusan ini adalah karena kurangnya tenaga profesional di bidang penanganan masalah sosial, akibatnya penanganan belum maksimal dilaksanakan, data yang belum akurat dan bersifat by name by address, baik data penyandang cacat, fakir miskin dan PMKS lainnya, serta masalah lainnya.

14) Urusan wajib Ketenagakerjaan

Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini memiliki anggaran untuk melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp. 320.532.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 270.077.750,- atau sebesar 84,26%. Berbagai program yang dilaksanakan dalam merealisasikan tujuan pada urusan wajib Tenaga Kerja ini adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
 - b. Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
 - b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
 - b. Survey kebutuhan hidup layak pekerja

Program pertama dan kedua memiliki capaian kinerja yang cukup tinggi yaitu di atas 80%, sedangkan program yang ketiga hanya sekitar 56%. Adapun permasalahan pada urusan ini antara lain adalah kurang optimalnya hasil pelatihan karena belum terpadu dengan pemberdayaan serta pengantar model kerja.

15) Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Ada tiga SKPD yang melaksanakan urusan ini, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan SDA. Anggaran yang tersedia untuk belanja keseluruhan sebesar Rp. 4.506.444.000,-. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp. 3.861.276.540,- (85,68%). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Dana yang ada digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 26 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan gedung kantor

- b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
- a. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
 - b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
 - d. Sosialisasi HAKI kepada UMKM
 - e. Achievement Motivation Training (AMT) UKM
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
 - b. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
 - c. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- a. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - b. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
 - c. Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Untuk urusan koperasi dan UKM ini capaian output kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan cukup bervariasi. Pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi terdapat kegiatan-kegiatan yang punya realisasi sangat kecil di bawah 10%.

B. Dinas Perikanan dan Peternakan

Untuk urusan koperasi dan UKM di SKPD ini ada satu program yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif dengan kegiatan Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan usaha kecil menengah.

C. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)

Terdapat dua program dan dua kegiatan pada SKPD ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.962.500,-. Realisasi yang bisa dicapai sebesar Rp. 56.362.900,- atau 85,45%. Program dimaksud adalah :

1. Program Penciptaan Iklim UKM Yang Kondusif
 - a. Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UKM; dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 48.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.858.375 atau 14,05%.
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
 - a. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM, dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- namun tidak ada realisasi.

16) Urusan wajib Penanaman Modal

Urusan ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Anggaran yang tersedia untuk belanja keseluruhan urusan sebesar Rp. 49.375.000,-. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp. 44.851.700,- atau 90,84%. Hanya ada satu program dan satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk urusan penanaman modal ini yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

17) Urusan wajib Kebudayaan

SKPD yang melaksanakan adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 507.205.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 482.345.800,- atau 95,10% dari seluruh anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - a. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
 - b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
 - c. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

18) Urusan wajib Pemuda dan Olahraga

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Secara keseluruhan persentase kinerja urusan ini mencapai 100%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2012 meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - a. Pembinaan organisasi kepemudaan
 - b. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

- c. Fasilitasi kegiatan kepemudaan
- 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - a. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
 - b. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
 - c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga
 - d. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
- 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

19) Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini dilaksanakan oleh banyak SKPD, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan dan Kecamatan. Alokasi anggaran yang tersedia untuk belanja urusan ini adalah sebesar Rp. 11.198.991.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.986.471.734,- atau sebesar 87,40%. Program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditahun anggaran 2012 meliputi program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
- 4. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Pengendalian keamanan lingkungan
- 5. Program peningkatan pemberantasan pekat
 - a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 2. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Pengendalian keamanan lingkungan
- 3. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

C. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi 4 program dengan 4 kegiatan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 322.125.000,- dan yang direalisasikan sebesar Rp. 85.701.000,- atau sebesar 57,65 %. Program dan kegiatan yang dilaksanakan yakni :

1. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan
 - a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Seminar, talk show, diskusi wawasan peningkatan kebangsaan
3. Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu
 - a. Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan Pemilu di Daerah
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Penyuluhan kepada masyarakat

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan kurang maksimal karena kurangnya personel serta sarana-prasarana yang menunjang untuk pelaporan dan kegiatan dilapangan

20) Urusan wajib Pemerintahan Umum

Urusan ini dilaksanakan oleh DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu, Sekretariat DPRD, BKD, Inspektorat, Dinas Pendapatan, serta seluruh Kantor Kecamatan lingkup kabupaten Hulu Sungai Utara. Total anggaran untuk bidang pemerintahan umum yang dilaksanakan sebesar Rp. 186.692.363.415,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.368.790.715,- atau sebesar 71,97%.

Berbagai program yang dilaksanakan pada urusan wajib bidang Pemerintahan Umum ini berdasarkan SKPD pelaksana meliputi :

A. Sekretariat Daerah

Berbagai program dan kegiatan yang ada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing bagian dengan capaian kinerja yang rata-rata tinggi kecuali pada bagian aset yang kurang dari 50%.

B. Kantor Kecamatan

Urusan wajib bidang pemerintahan Umum juga dilaksanakan oleh seluruh kantor Kecamatan meliputi sepuluh kantor Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Utara. Program yang dilaksanakan oleh kantor Kecamatan umumnya 1 sampai 3 program, meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kecamatan yang hanya melaksanakan satu program yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah Kecamatan Sungai Tabukan, Paminggir, Haur Gading, dan Amuntai Tengah. Yang melaksanakan dua jenis program meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yakni Kecamatan Amuntai Utara, Babirik, Danau Panggang, Amuntai Selatan dan Sungai Pandan. Untuk kecamatan yang melaksanakan tiga jenis program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, serta Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur hanya Kecamatan Banjar.

C. Kantor Pelayanan Terpadu

Anggaran yang disediakan pada Kantor Pelayanan Terpadu untuk menyelenggarakan urusan wajib bidang Pemerintahan Umum sebesar Rp.703.380.500 dan terealisasi sebesar Rp. 658.932.970 (91,72 %). Terdapat 5 program dan 14 kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan cukup bagus yaitu mendekati 90%. Program-program yang dilaksanakan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
5. Program Penataan Peraturan perundang-Undangan

D. Badan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan urusan wajib bidang pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah meliputi program-program :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Guna melaksanakan program ini pada Badan Kepegawaian Daerah dianggarkan anggaran total sebesar Rp. 8.049.747.250,- dan direalisasikan sebesar Rp. 5.885.912.736,- atau 73,12%. Capaian kinerja BKD tidak cukup tinggi, dimana banyak kegiatan yang capaiannya hanya sekitar 50%.

E. Inspektorat

Urusan wajib bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat total anggarannya sebesar Rp. 7.196.606.050,- dengan realisasi Rp. 5.589.311.976,- meliputi 6 program dan 15 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Realisasi capaian kinerja dari pelaksanaan berbagai program pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap pelaksanaan urusan wajib bidang Pemerintahan Umum tinggi, yaitu mendekati 100%.

F. Dinas Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 8.743.509.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.797.634.354,-. Program-program yang dilaksanakan yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

G. Sekretariat DPRD

Urusan wajib bidang Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD meliputi 5 program dan 32 kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan ini sebesar Rp. 116.626.679.575,- dan direalisasi sebesar Rp. 81.257.481.057,- atau 69,67%. Berbagai program yang dilaksanakan meliputi :

- E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- F. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
- G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- H. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah
- I. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

21) Urusan wajib Ketahanan Pangan

Urusan ini dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kesehatan. Total anggaran untuk urusan ketahanan pangan sebesar Rp. 6.394.621.640,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.762.613.308,- atau 90,12%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD meliputi :

A. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat-menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22) Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan ini dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan total anggaran sebesar Rp. 5.440.102.400,- dan yang terrealisasi sebesar Rp.

4.503.634.249,- atau 82,79%. Program dan kegiatan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun anggaran 2012 adalah Rp. 5.440.102.400,- telah direalisasi sebesar Rp. 4.503.634.249,- atau 82,79%. Program yang dilaksanakan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

23) Urusan wajib Statistik

SKPD yang melaksanakan adalah Bappeda dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 712.625.000,- dan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 596.488.775,- atau sebesar 83,70%. Programnya adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
- b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
- c. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
- d. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

Kegiatan-kegiatan pada urusan statistik ini bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Hulu SUNgai Utara. Seluruh kegiatan menghasilkan output dengan capaian kinerja 100,00%.

24) Urusan wajib Kearsipan

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Total anggaran kearsipan sebesar Rp. 265.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 256.686.868,- atau 96,59%. Ada 4 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah selama tahun anggaran 2012 yaitu :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasian Kearsipan
 - a. Kajian sistem administrasi kearsipan
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
 - a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
 - b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
3. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
 - a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Seluruh program dan kegiatan tahun 2012 telah dilaksanakan dengan output yang cukup tinggi, yaitu mencapai 97%.

25) Urusan wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan ini dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu Bappeda, Dinas Perhubungan Kominfo dan Bagian Humas Sekretariat Daerah. Anggaran yang tersedia untuk belanja urusan komunikasi dan informatika adalah sebesar Rp. 1.223.892.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 713.890.577,- atau sebesar 58,33%. Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdapat satu program dan satu kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bappeda yaitu Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi. Total anggaran yang disediakan adalah Rp. 149,892,500,- dengan realisasi Rp. 137,262,254,- atau 91,57%. Capaian kinerja sebesar 100%.

B. Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika

Terdapat satu Program dan satu kegiatan yaitu Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

C. Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Program dan kegiatan yang ada meliputi :

1. Pengembangan komunikasi informasi dan media massa
 - a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
2. Kerjasama informasi dengan mass media
 - a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

26) Urusan wajib Perpustakaan

Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah. Anggaran pelaksanaan urusan wajib bidang perpustakaan sebesar Rp. 1.698.354.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.351.254.166,-. Ada 2 Program dan 7 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan tersebut selama tahun anggaran 2012 yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

27) Urusan Pilihan Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan oleh lima SKPD, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kehutanan Perkebunan ESDM, dan Bagian Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Total anggaran terhadap pelaksanaan urusan pilihan bidang Pertanian adalah sebesar Rp. 20.986.686.500,- dan realisasi sebesar Rp. 18.761.773.557,- atau 89,40%. Program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

A. Dinas Perikanan dan Peternakan

Untuk melaksanakan urusan ini terdapat 4 program dan 18 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

B. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan

Terdapat 6 program dan 16 kegiatan. Program-program tersebut adalah :

1. Program Peningkatan kesejahteraan petani.
2. Program peningkatan ketahanan pangan.
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

C. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Terdapat 8 program dan 18 kegiatan. Program-program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
7. Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Capaian kinerja pada SKPD ini cukup tinggi yaitu sebesar 90,00% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,08%.

D. Dinas Kehutanan Perkebunan Energi Sumber Daya Mineral

Terdapat 3 program dan 5 kegiatan yaitu :

1. Program peningkatan kesejahteraan petani
2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Capaian kinerja untuk urusan pertanian cukup baik, hanya pada kegiatan dari dana DAK yang tidak dilaksanakan.

J. Sekretariat Daerah (Bagian Sumberdaya Alam)

Program yang dilaksanakan yakni Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan koordinasi kebijakan perberasan dengan capaian kinerja 100%.

28) Urusan Pilihan Kehutanan

Urusan ini dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Kehutanan Perkebunan Energi Sumberdaya Mineral dan Sekretariat Daerah bagian Sumberdaya Alam.

Dalam tahun anggaran 2012 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.578.623.599,- dengan realisasi Rp. 3.447.938.622,- atau 61,81%. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap SKPD tersebut adalah :

A. Dinas Kehutanan Perkebunan Energi dan Sumberdaya Mineral

Terdapat 8 program dan 22 kegiatan. Program-program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
8. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

Capaian kinerja untuk urusan kehutanan pada Dinas Kehutanan, Perkebunan Energi dan Sumberdaya Mineral cukup bagus, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi.

B. Sekretariat Daerah Bagian Sumber Daya Alam

Program yang dilaksanakan adalah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan dengan kegiatan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Program dan kegiatan di sini kebanyakan hanya bersifat koordinasi.

29) Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam tahun anggaran 2012 berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang energi dan sumberdaya mineral meliputi :

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Anggaran keseluruhan dalam penyelenggaraan urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral pada Dinas Kehutanan Perkebunan Energi Sumberdaya Mineral tahun 2012 adalah sebesar Rp. 495.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 390.764.000,- atau setara dengan 78,86%.

30) Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam tahun anggaran 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 186.185.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 177.814.000,- atau 5,50%. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bidang pariwisata meliputi :

1. Program Pengembangan Kemitraan
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

31) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Urusan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tahun 2012 terdapat 8 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan. Program-program tersebut meliputi :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
5. Program pengembangan budidaya perikanan
6. Program pengembangan perikanan tangkap
7. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

8. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Anggaran seluruhnya untuk menyelenggarakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 11.252.920.050,- dengan realisasi Rp. 9.965.743.890,- atau sebanding dengan 88,56%. Capaian kinerja cukup tinggi.

32) Urusan Pilihan Perdagangan

Urusan ini dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dan Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota. Alokasi anggaran untuk urusan perdagangan dalam tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 11.223.174.200,- dan direalisasikan sebesar Rp. 10.130.466.806,- atau 90,26%. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap SKPD tersebut adalah :

A. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Ada 3 program dan 4 kegiatan pada urusan ini. Program-program tersebut adalah :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

B. Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota

Ada 3 program dan 9 kegiatan pada urusan ini. Program-program tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

33) Urusan Pilihan Perindustrian

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Sekretariat Daerah. Dalam tahun anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 2.121.825.500,- dan direalisasikan sebesar Rp.

1.713.790.300,- atau 78,53% untuk melaksanakan berbagai program urusan perdagangan meliputi :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

34) Urusan Pilihan bidang Transmigrasi

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perikanan dan Peternakan. Pada tahun anggaran 2012 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada urusan pilihan Transmigrasi adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; dengan total anggaran Rp. 425.517.600,- dan direalisasi Rp. 263.375.000,- atau 61,90% dari jumlah anggaran.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah / Isu-isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan mendasar bidang ekonomi

1. Belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi
2. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tahun 2011 menurun sebesar 0,18 % dari tahun 2010
3. Menurunnya produksi dan produktivitas, serta rendahnya mutu produk pertanian
4. Belum optimalnya koordinasi Ketahanan Pangan Daerah
5. Masih banyaknya hutan dan lahan kritis serta terbatasnya lahan perkebunan
6. Hasil tangkapan ikan yang cenderung menurun dan belum berkembangnya teknologi budidaya ikan lokal
7. Masih rendahnya akses permodalan dan teknologi bagi koperasi dan UMKM
8. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani/nelayan, terbatasnya SDM, sarana prasarana dan fasilitasi penyuluhan
9. Masih perlunya penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah

10. Masih perlunya penggalian terhadap potensi-potensi pendapatan asli daerah
 11. Kontribusi sektor industri pengolahan tahun 2011 rendah sebesar 8,95 %
 12. Pangsa pasar produk yang masih bersifat lokal
 13. Masih rendahnya investasi dibidang produksi barang dan jasa
 14. Belum dimanfaatkannya enceng gondok sebagai bahan bakar gas (biogas)
- b. Permasalahan mendasar bidang sosial budaya
1. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur
 2. Belum optimal dan terbatasnya kapasitas serta distribusi tenaga teknis aparatur pada unit kerja sesuai dengan kompetensinya
 3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan
 4. Kurangnya kualitas serta kuantitas prasarana dan sarana pemerintahan desa (jumlah kantor dan balai desa).
 5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pendidikan politik dan pelaksanaan demokrasi.
 6. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat
 7. Masih rendahnya partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
 8. Masih rendahnya IPM HSU (69,45) tahun 2011 urutan ke 11, Kalsel (70,44)
 9. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2011 masih rendah yaitu sebesar 63,47 tahun sedangkan Kalsel 64,17 tahun.
 10. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu sebesar 22 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu (AKI) 433 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012.
 11. Masih tingginya persentase gizi kurang pada bayi dan balita sebesar 18,96 % dan status gizi buruk sebesar 5,29 %.
 12. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih terbatas.

13. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah hanya 7,48 tahun sedangkan kalsel 7,68 tahun, artinya rata-rata masyarakat kita hanya bersekolah sampai kelas 1 SLTP.
 14. Angka Putus Sekolah SD/MI 0,42 %, SLTP 10,73 %, SLTA 35,80 % dan APK SD/Mi 102,84 %, SLTP 83,81 %, SLTA 70,30%, sedangkan APM SD/MI 94,85 %, SLTP 68,62 %, SLTA 46,81 % Masih rendahnya APS, APK dan APM sehingga perlu penuntasan wajar 12 tahun
 15. Masih tingginya angka kemiskinan 7,31% sedangkan provinsi 5,35% serta lemahnya koordinasi program-program kemiskinan diberbagai sektor
 16. Tingginya angka pengangguran sebesar 5,28 % sehingga dipandang perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat akibat tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja.
 17. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan Sosial (13.161 orang tahun 2011)
 18. Masih rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
 19. Masih rendahnya pemahaman keluarga terhadap perlindungan anak.
 20. Masih adanya perkawinan dibawah umur
 21. Masih rendahnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam pelaksanaan pembangunan.
 22. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata.
 23. Masih banyaknya bidang-bidang usaha jasa pariwisata yang memerlukan investor bagi perkembangan pariwisata
 24. Masih rendahnya pengembangan seni, budaya dan olahraga
 25. Meningkatnya angka kriminalitas dari 140 kasus tahun 2010 menjadi 206 kasus pada tahun 2011 dan korban narkoba dari 12 kasus tahun 2010 menjadi 30 kasus pada tahun 2011
 26. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai keagamaan, etika dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan
- c. Permasalahan mendasar bidang infrastruktur dan tata ruang
1. Terbatasnya infrastruktur sosial dan ekonomi (perhubungan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya).

2. Tingginya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam (jalan rusak 56 % tahun 2011 dan 58 % tahun 2012)
3. Masih ada daerah yang belum mendapat jaringan listrik dari PLN
4. Terpusatnya seluruh kegiatan di kota Amuntai sehingga menyebabnya stagnansi dalam pertumbuhannya.
5. Adanya permukiman kumuh dan terbatasnya ketersediaan lahan bagi pengembangan perumahan dan permukiman di pusat kota Amuntai
6. Masih terbatasnya penyediaan dan akses masyarakat terhadap air minum/ air bersih (57,53 %)
7. Masih rendahnya akses pelayanan sanitasi dan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat (51 % tahun 2011)
8. Belum optimalnya pelaksanaan RTRW dalam pemanfaatan ruang dan pengendaliannya
9. Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah terhadap lingkungan

2.3.2. Isu Strategis

- a. Isu strategis bidang ekonomi :
 1. Kondisi makro ekonomi yang masih perlu ditingkatkan
 2. Potensi rawa yang belum dimanfaatkan secara optimal
 3. Peningkatan kemampuan kapasitas keuangan daerah
 4. Masih rendahnya investasi dan akses permodalan bagi pelaku usaha
 5. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil-hasil produksi sektor pertanian
- b. Isu strategis bidang sosial budaya
 1. Optimalisasi tata pemerintahan yang baik (good governance).
 2. Kualitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan IPM.
 3. Kemiskinan, ketenagakerjaan dan MDGs.
 4. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
 5. Sosial budaya dan keagamaan.

- c. Isu strategis bidang infrastruktur dan tata ruang
 - 1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.
 - 2. Pengembangan wilayah kawasan perkotaan Amuntai.
 - 3. Percepatan pembangunan di bidang air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi.
 - 4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Arah kebijakan tahun 2014 mengacu pada arah kebijakan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017. Arah kebijakan ekonomi pada tahun 2014 diarahkan pada :

1. Pemanfaatan berbagai potensi lokal guna terciptanya nilai tambah ekonomi khususnya kawasan rawa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Mengurangi kemiskinan
4. Mendorong terbukanya lapangan kerja baru
5. Perbaikan kualitas tenaga kerja

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2014

Pembangunan Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang menyebabkan meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Gambaran ekonomi dihitung pada tingkat wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai saat ini adalah sebagian dari neraca produksi yaitu

gambaran mengenai besaran produksi barang dan jasa, yang biasa disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Perekonomian regional Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari sisi besaran nilai nominal PDRB selama periode 2009-2011 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, PDRB ADHB mencapai 1.338,03 milyar rupiah, meningkat pada tahun 2010 menjadi sekitar 1.567,82 milyar rupiah dan data sementara tahun 2011 semakin meningkat menjadi hampir 1.788,18 milyar rupiah. Sedangkan apabila dihitung dengan menggunakan harga konstan maka nilai nominal PDRB ADHK 2000 Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 832,03 milyar rupiah pada tahun 2009, meningkat menjadi 870,17 milyar rupiah pada tahun 2010 dan data sementara tahun 2011 meningkat menjadi 925,73 milyar rupiah.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dinamis guna melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode, yakni dengan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada satu periode dengan periode selanjutnya atau sebelumnya, biasanya tahunan. Analisis pertumbuhan yang membandingkan perubahan yang terjadi antar tahun digunakan dengan berpatokan pada PDRB harga konstan yang diikat pada satu patokan tahun dasar, yakni dengan mengeluarkan kenaikan harga/inflasi yang terjadi pada tahun bersangkutan. Selain PDRB harga konstan, juga digunakan PDRB harga berlaku yakni produktivitas barang dan jasa riil setiap periode tahunan dengan mengabaikan tingkat inflasi yang terjadi. Analisis terhadap PDRB ini penting sebagai acuan menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang dicapai, dan berguna untuk menentukan sasaran pembangunan di masa selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator ekonomi yang paling banyak dipakai dalam menilai profil ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan

ekonomi juga merupakan indikator yang menjadi fokus para pelaksana pembangunan untuk menunjukkan dan memonitor keberhasilan pembangunan, walaupun pertumbuhan ini sendiri bukanlah merupakan indikator satu-satunya yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat mengingat indikator pertumbuhan ekonomi disusun secara agregat tanpa melihat masyarakat mana yang menikmati pertumbuhan tersebut.

Secara umum pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam kurun tiga tahun belakangan ini cukup bervariasi dengan kisaran di atas 4 %. Pada tahun 2011 terjadi tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan yang cukup menggembirakan yang mencapai 6,39 %, meningkat dibanding pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 4,58 %. Demikian pula pada PDRB atas dasar harga berlaku terjadi pertumbuhan sebesar 14,05 % ditahun 2011. Terjadinya pertumbuhan yang meningkat ini menggambarkan meningkatnya kinerja kegiatan ekonomi di masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009-2011

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	000 Rp	Pertumbuhan (%)	000 Rp	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	1.338.032.527	14,49	832.029.106	5,26
2010 ^{*)}	1.567.822.655	17,17	870.165.527	4,58
2011 ^{**)}	1.788.175.912	14,05	925.726.884	6,39

*) Angka diperbaiki

***) Angka Sementara

Sumber : BPS Kab.Hulu Sungai Utara

Secara sektoral atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2011 pertumbuhan yang terbesar diperoleh oleh sektor jasa-jasa yakni dengan pertumbuhan sebesar 9,44 %. Peringkat pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 6,84 % dihasilkan oleh sektor pertambangan dan penggalian, khususnya sub sektor penggalian. Peringkat ketiga dihasilkan oleh sektor

konstruksi yang tumbuh sebesar 6,80 %, peringkat empat dihasilkan oleh sektor angkutan dan komunikasi, peringkat lima dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selanjutnya peringkat enam dihasilkan oleh sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 5,81 %, peringkat tujuh dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air minum dengan pertumbuhan sebesar 5,67 %, peringkat delapan dihasilkan oleh sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 4,68 %, dan terakhir adalah sektor industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 3,05 %.

Terdapat empat sektor dominan sebagai penggerak roda perekonomian ditahun 2011 yakni sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa yang secara keseluruhan berkontribusi sebesar 80,9 % terhadap perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

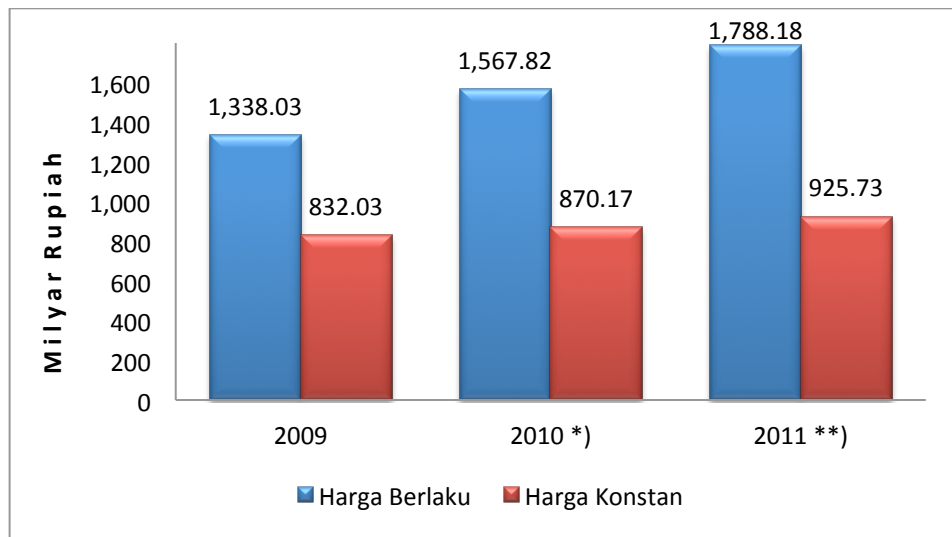
Dilihat dari perkembangan sektor pertanian dalam tiga tahun terakhir memiliki tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan sektor pertanian ditahun 2009 tumbuh sebesar 5,64 %, melambat ditahun 2010 menjadi 0,06 %, dan kembali meningkat ditahun 2011 menjadi 5,64 %.

Atas dasar perkembangan pertumbuhan ekonomi di atas, maka diperkirakan tingkat pertumbuhan pada tahun berjalan ini (tahun 2013) optimistik akan berada pada kisaran 5 – 6 %, atau akan dapat dicapai target pertumbuhan sebesar 5,96 % sebagaimana yang ditargetkan dalam rencana tahun 2013.

Pada Gambar 3.1. dapat dilihat besaran PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2009-2011, dimana nilai nominal PDRB selalu mengalami kenaikan baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun tersebut kinerja perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus membaik. Pencapaian kinerja perekonomian yang sedemikian itu harus dipertahankan

dan dipacu di masa akan datang dalam rangka mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Gambar 3.1. Nilai PBRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009-2011



*) Angka diperbaiki

***) Angka Sementara

Sumber : BPS Kab.Hulu Sungai Utara

B. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi daerah lebih diartikan sebagai komponen peranan kegiatan ekonomi yang membentuk ekonomi suatu wilayah, dalam hal ini merupakan peranan nilai tambah masing-masing sektor. Pada jangka pendek, struktur ekonomi lebih menggambarkan corak perekonomian suatu daerah. Bila sektor primer yang lebih dominan berarti daerah tersebut cenderung tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan cenderung tipe industri. Untuk jangka panjang, struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.

Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 4.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2009-2011, dimana peranan terbesarnya didukung

oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok tersier yaitu berkisar antara 52-53 persen, kemudian kelompok primer berkisar antara 30-31 persen dan kelompok sekunder berkisar sekitar 15 persen.

Setiap kelompok sektor memiliki sektor andalan, yaitu sektor pertanian untuk kelompok sektor primer serta sektor industri pengolahan untuk kelompok sektor sekunder. Sedangkan untuk kelompok sektor tersier, sektor andalannya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut merupakan penggerak roda perekonomian karena kurang lebih 81 persen kegiatan ekonomi berasal dari sektor-sektor tersebut sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan perekonomian regional. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Struktur Ekonomi dari PDRB ADHBKabupaten Hulu Sungai Utara Tahun2009-2010 (Persen)

Sektor	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
1. Pertanian	30,52	31,15	30,59
2. Pertambangan & Penggalian	0,03	0,03	0,04
3. Industri Pengolahan	8,78	9,12	8,95
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,54	0,59	0,66
5. Konstruksi	6,46	6,21	6,27
6. Perdagangan, Hotel dan	17,94	17,17	17,40
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,89	7,50	7,47
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	4,28	4,22	4,28
9. Jasa-Jasa	23,56	24,02	24,34
Total PDRB	100,00	100,00	100,00

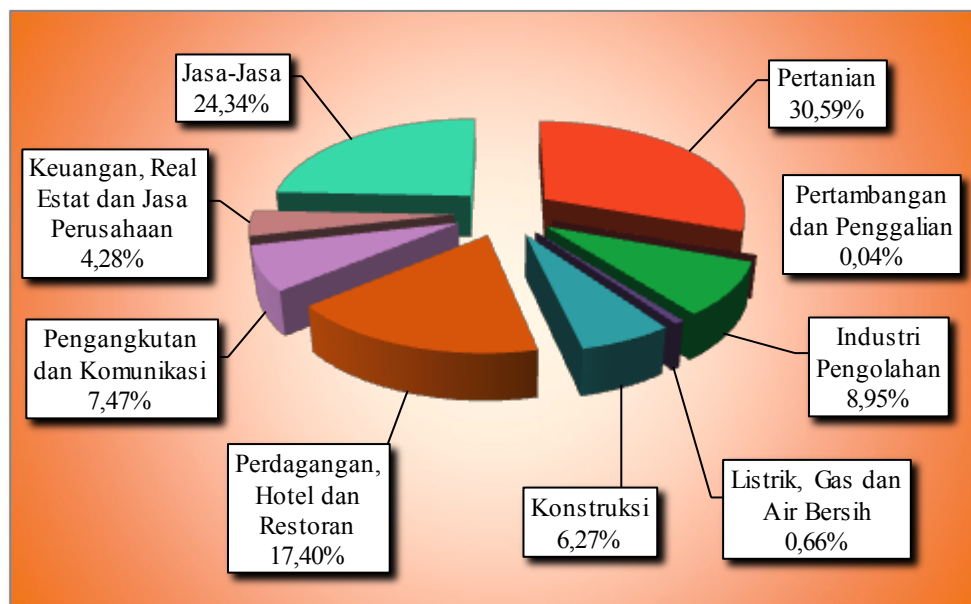
*) Angka diperbaiki

***) Angka Sementara

Sumber : BPS Kab.Hulu Sungai Utara

Dari data di atas terlihat bahwa kontribusi kelompok sektor primer maupun sekunder selama periode 2010-2011 *trend*-nya cenderung mengalami penurunan, sedangkan *trend* kelompok sektor tersier cenderung naik. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini sektor primer belum mampu mendorong sektor sekunder maupun tersier untuk dapat berkembang lebih baik. Keadaan tersebut disebabkan oleh dominasi sektor pertanian dalam kelompok sektor primer dimana sub sektor tanaman bahan makanan mempunyai distribusi persentase terbesar. Tanaman bahan makanan sendiri bukan merupakan hulu sektor industri dan komoditi-komoditinya tidak memiliki rantai perdagangan yang panjang. Selain itu, industri yang banyak berkembang di kabupaten ini pada umumnya merupakan industri kerajinan, bukan agroindustri yang mampu mengubah produk pertanian menjadi barang yang memiliki nilai tambah lebih.

Gambar 3.2. Peranan Ekonomi Sektoral Menurut Sektor dari PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 (Persen)



Pergeseran kelompok sektor primer sangat dipengaruhi oleh pergeseran sektor pertanian. Penurunan kontribusi kelompok sektor ini pada tahun 2010 merupakan gambaran dari penurunan sektor pertanian.

Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa kontribusi kelompok sektor primer turun dari 31,18 persen di tahun 2010 menjadi 30,63 persen pada tahun 2011. Penurunan sektor primer ini dikarenakan oleh menurunnya kontribusi sektor pertanian. Meskipun terjadi sedikit penurunan kontribusi pada sektor pertanian, namun sektor ini masih merupakan pemegang kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sekitar 30,59 persen.

Kelompok sektor sekunder, kontribusinya juga sedikit menurun dalam dua tahun terakhir. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan pada sektor pendukungnya yaitu sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan ini turun dari 9,12 persen pada tahun 2010 menjadi 8,95 persen pada tahun 2011. Hal ini terjadi seiring dengan semakin sulitnya pasokan bahan baku industri kayu yang menjadi komoditi unggulan kabupaten ini. Selain itu rendahnya investasi yang masuk akibat belum kondusifnya perekonomian daerah serta dukungan infrastruktur ekonomi dan sosial juga turut memengaruhi penurunan kontribusi sektor industri pengolahan ini dalam nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sementara itu, kelompok sektor tersier selama kurun waktu dua tahun ini justru semakin membaik dari 52,91 persen pada tahun 2010 menjadi sekitar 53,49 persen pada tahun 2011. Pemicu kelompok sektor ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dimana pergeseran kedua sektor ini terasa begitu mewarnai pergeseran kelompoknya. Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2009 kontribusinya terhadap perekonomian Hulu Sungai Utara sebesar 17,94 persen. Setelah sempat sedikit turun kontribusinya menjadi 17,17 % pada tahun 2010, namun pada tahun 2011 sektor ini kembali meningkat kontribusinya menjadi sekitar 17,40 %. Besar peranan perdagangan merupakan potensi yang besar bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dapat dijadikan dimensi lain dari arah pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain sektor perdagangan,

hotel dan restoran di kelompok sektor tersier, sektor jasa-jasa juga berperan cukup besar terhadap perekonomian Hulu Sungai Utara. Program peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip organisasi modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap kontribusi sektor jasa-jasa. Peranan sektor jasa-jasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 23,56 persen pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 naik menjadi 24,02 persen. Kontribusi sektor ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2011 sebesar 24,34 persen dimana kontribusi terbesarnya ada pada sub sektor pemerintahan umum.

Gambaran umum yang didapatkan dari kondisi ketiga kelompok sektor di atas (primer, sekunder, dan tersier), hanya kelompok sektor tersier yang mengalami peningkatan, sedangkan kelompok sektor lainnya secara rata-rata mengalami penurunan. Di samping itu, dengan memperhatikan peranan dari keempat sektor yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara (sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa), maka keempat sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara demi peningkatan kontribusinya di tahun-tahun mendatang tanpa mengabaikan lima sektor lainnya. Dengan demikian diharapkan kesembilan sektor ini secara bersama-sama akan menunjang perekonomian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara baik ditahun 2013 yang sedang berjalan ini.

C. PDRB Perkapita

Indikator-indikator ekonomi makro yang telah dijelaskan sebelumnya seperti struktur ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi turunan dari besaran agregat pendapatan regional, khususnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Turunan lain dari fungsi agregat ini adalah PDRB perkapita dan tingkat inflasi PDRB. PDRB perkapita

merupakan hasil pembagian besaran agregat PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Beberapa pihak menggunakan PDRB perkapita sebagai indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Hal ini kurang tepat karena PDRB perkapita belum dapat menggambarkan peningkatan kemakmuran/ kesejahteraan masyarakat secara mutlak. Ada hal lain yang tidak ter jelaskan dalam PDRB perkapita, yaitu masalah kepemilikan faktor produksi dan unsur pemerataannya. Namun demikian PDRB perkapita setidaknya dapat menggambarkan rata-rata pendapatan riil yang diterima oleh setiap penduduk di suatu daerah selama periode tertentu dengan asumsi aset ekonomi yang ada merupakan milik penduduk lokal.

PDRB ADHB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2009 adalah 6.425.003 rupiah, meningkat 13,87 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Besaran PDRB perkapita ini meningkat lagi pada tahun 2010, yaitu sebesar 7.492.342 rupiah. Pada tahun 2011, PDRB perkapita kabupaten ini meningkat lagi menjadi 8.387.322 rupiah.

Tabel 3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009-2011

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Rupiah	Pertumbuhan (%)	Rupiah	Pertumbuhan (%)
2008	5.642.238	12,72	3.816.140	5,92
2009	6.425.003	13,87	3.995.261	4,69
2010 ^{*)}	7.492.342	16,61	4.158.577	4,09
2011 ^{**)}	8.387.322	11,95	4.342.079	4,41

*) Angka diperbaiki

***) Angka Sementara

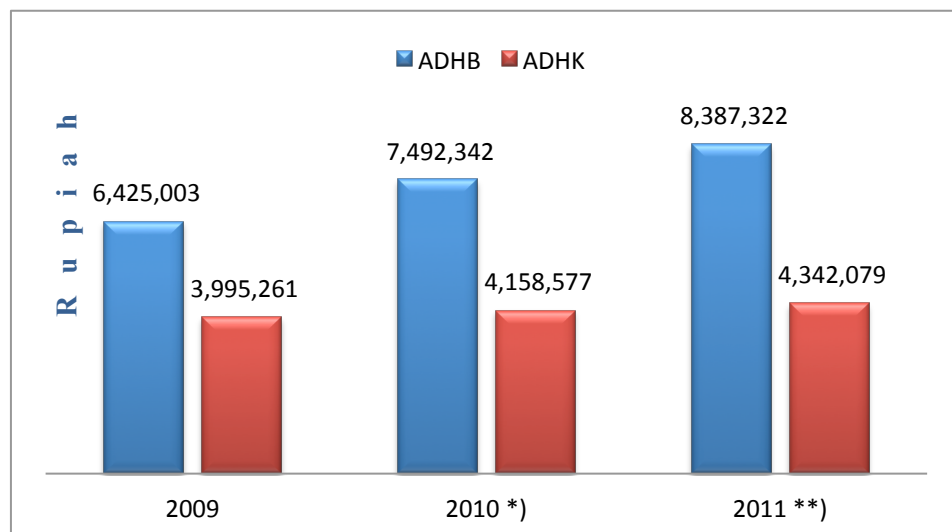
Sumber : BPS Kab.Hulu Sungai Utara

Jika dilihat dari PDRB ADHK perkapita, besaran PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat 4,41 persen pada tahun 2011. Kenaikan PDRB ADHK perkapita yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan jumlah penduduk pertengahan tahun (sekitar 1,17 persen)

menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduknya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat.

Jika dibandingkan besarnya, PDRB ADHK perkapita tentu mempunyai nilai nominal yang lebih rendah daripada PDRB ADHB perkapita. Jika dibandingkan kecepatan perubahannya, PDRB ADHB perkapita tentu lebih cepat daripada PDRB ADHK perkapita. Hal ini dikarenakan selain mencakup perubahan *volume* barang dan jasa, PDRB ADHB juga memasukkan faktor perubahan harga dalam penghitungannya. Dengan membandingkan kedua besaran tersebut, didapatkan nilai rasio yang menunjukkan perubahan harga. Dengan perkiraan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya perubahan struktur ekonomi dimana diharapkan adanya perbaikan kinerja terhadap sektor-sektor sekunder dan tersier, maka diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya peningkatan PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Gambar 3.3. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009-2011



*) Angka diperbaiki

***) Angka Sementara

Sumber : BPS Kab.Hulu Sungai Utara

D. Inflasi

Indikator inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di level konsumen, penghitungan inflasi didasarkan pada suatu indeks yang disebut Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan paket komoditi yang berjumlah sekitar 300 macam komoditi. Sampai saat ini untuk wilayah Kalimantan Selatan, IHK baru dihitung di Kota Banjarmasin, sedangkan di kota/kabupaten lain belum dilakukan penghitungannya. Oleh karena itu, IHK Kota Banjarmasin dijadikan sebagai acuan IHK Kalimantan Selatan, karena data tersebut diasumsikan sudah bisa mewakili data semua kabupaten/kota se Kalimantan Selatan.

Secara metodologi inflasi dihitung dari perubahan IHK tiap bulan. Jika IHK lebih besar dari IHK bulan sebelumnya, berarti terjadi inflasi dan sebaliknya jika lebih kecil maka terjadi deflasi. Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang dan jasa mengalami kenaikan pada bulan yang bersangkutan dan sebaliknya jika harga barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dari bulan sebelumnya maka terjadi deflasi.

IHK merupakan indikator perubahan harga di tingkat konsumen, sedangkan indikator perubahan harga barang di tingkat produsen adalah Indeks Implisit. Jika tidak ada gejala yang tidak normal, kedua indeks ini umumnya bergerak searah, artinya kalau indeks implisit naik berarti IHK juga bergerak dengan arah yang sama. Kecuali terdapat hal lain seperti kendala distribusi barang dan margin perdagangan yang tidak seimbang menyebabkan kedua indeks tersebut tidak searah.

Inflasi bulanan Kota Banjarmasin selama tahun 2011 berfluktuasi dimana pergerakan tertinggi terjadi pertengahan triwulan III, yaitu pada bulan Agustus. Inflasi pada bulan ini mencapai 1,53 dan angka ini jauh melebihi angka inflasi nasional yang mencapai 1,57. Angka tersebut turun drastis menjadi 0,17 pada bulan September dimana angka ini berada di bawah inflasi nasional yang pada bulan ini mencapai 0,27. Deflasi terjadi pada bulan Oktober, yaitu -0,06. Kondisi ini seiring dengan terjadinya deflasi

pada level nasional yang mencapai -0,12. Bulan berikutnya angka inflasi terus merangkak naik sedangkan angka inflasi terendah sepanjang tahun 2011 terjadi pada bulan Maret, yaitu 0,01.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Pasca pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global, ekonomi dunia kembali dihadapkan pada krisis utang Eropa dan perlambatan ekonomi dunia. Namun demikian hingga menjelang akhir tahun 2012 yang lalu Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor dua di Asia dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 %. Pertumbuhan industri pengolahan non migas tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional pada triwulan III tahun 2012, dan dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga secara konsisten memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi sehingga dapat terlihat bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari hal ini diasumsikan bahwa Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di atas fondasi yang kokoh (*siaran pers Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 17 Desember 2012*).

Berbagai tantangan terhadap perekonomian daerah di tahun 2014 dan 2015 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas termasuk perdagangan bebas ASEAN tahun 2015 akan menyebabkan semakin kompetitifnya persaingan bagi potensi industri kecil di Hulu Sungai Utara dalam ajang persaingan dunia usaha. Persaingan ini lebih pada bagaimana dunia usaha dapat memproduksi secara lebih efisien sehingga dapat menjaga stabilitas pasar dan kemampuan berkompetisi terhadap perekonomian global.

Tantangan lainnya terhadap perekonomian baik nasional maupun regional pada tahun 2014 dan 2015 mendatang juga oleh faktor eksternal khususnya kondisi politik dalam negeri yang diperkirakan akan memanas. Tahun 2014 dan 2015 merupakan tahun politik dimana pada tahun-tahun ini diagendakan adanya pemilihan umum legislatif secara nasional serta pemilihan kepala negara. Demikian pula pada tingkat regional Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai Utara pada waktu yang bersamaan akan dilakukan pemilihan umum legislatif serta pemilihan kepala daerah provinsi ditahun 2015. Namun berdasarkan pengalaman pada masa-masa yang lalu umumnya pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan kepala negara serta pemilihan kepala daerah dapat terlaksana dalam suasana yang aman, damai dan bebas dari gesekan horisontal maupun vertikal. Dengan demikian dampak dari agenda politik sebagaimana di atas diasumsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Oleh karenanya diproyeksikan prospek perekonomian di daerah akan dapat semakin meningkat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2014 bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta bagi hasil dari pemerintah kabupaten Balangan. Pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksi sebesar Rp. 32.800.000.000,- yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan dari pemerintah pusat bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dengan perkiraan secara umum turun dibanding tahun 2013. Untuk tahun 2014 penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Perimbangan

diproyeksi sebesar Rp. 566.968.927.201,-. Penurunan Dana Perimbangan sebesar 1,18 % dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp. 573.746.199.777,- hal ini disebabkan menurunnya proyeksi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp. 415.479.351.000,- tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 408.202.522.351,- di tahun 2014. Penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan meningkat dari Rp. 96.173.078.777,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 105.251.640.230,- di tahun 2014. Adapun penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp. 53.514.764.620,- dari sebelumnya tahun 2013 sebesar Rp. 62.093.770.000,-

Adapun pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk di dalamnya bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta dana bagi hasil SDA pertambangan umum dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya secara keseluruhan diproyeksikan naik dibanding tahun 2013, yakni dari Rp. 159.678.795.780,- menjadi Rp. 168.176.371.696,- yang selanjutnya akan menjadi proyeksi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2014. Berdasarkan proyeksi dari berbagai sumber penerimaan daerah di atas, maka diproyeksikan total penerimaan daerah untuk pembiayaan keseluruhan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2014, adalah sebesar Rp. 767.945.298.898,- meningkat 6,23 dibanding tahun 2013 yang sebesar 722.901.764.582,-.

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2013 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2013 khususnya belanja langsung diarahkan pada berbagai program dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang secara umum diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan publik ditujukan guna membuahakan rasa keadilan di masyarakat,

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Atas dasar berbagai permasalahan dan program serta sasaran prioritas pembangunan di tahun 2013 yang merupakan kelanjutan kegiatan pembangunan di tahun 2012, belanja langsung tahun 2013 masih terarah pada pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan yang menyebabkan kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan sebagai daerah tertinggal oleh pemerintah Pusat. Berbagai prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi : 1) Menciptakan struktur perekonomian daerah yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil; 2) Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal; 3) Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah; 4) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan; 5) Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Untuk belanja tidak langsung dialokasikan pada belanja pegawai yang merupakan alokasi terbesar dari total anggaran, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan terhadap pemerintahan desa/ dana alokasi desa, belanja tidak terduga, serta belanja pendamping untuk dana alokasi khusus.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran daerah, setiap tahunnya harus dialokasikan untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah, fungsi kesehatan 10% dari belanja daerah, dan peningkatan infrastruktur jalan sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan multiyear dan melaksanakan program-program yang terutama berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Hulu Sungai Utara, sehingga pencapaian target IPM dan MDG's dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2013 diproyeksi akan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pinjaman daerah dengan proyeksi mengacu besaran ditahun 2012 sebesar Rp. 44.605.091.898,-

3.2.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

3.2.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Pagu indikatif kerangka pendanaan pembangunan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2014 seluruhnya diproyeksi sebesar Rp. 804.159.098.288,-

Dari pagu belanja di atas, dialokasikan untuk belanja tidak langsung yang meliputi jenis belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, berdasarkan tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp. 422.308.488.923,-.

Proyeksi anggaran sebesar Rp. 804.159.098.288,- dikurangi belanja tidak langsung sebesar Rp. 422.308.488.923,- maka yang tersisa untuk dialokasikan sebagai Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 381.850.609.365,-.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 – 2017. Dalam hal penjabaran terhadap dokumen RPJMD maka dokumen RKPD Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan akan menjabarkan berbagai arahan kebijakan yang terdapat pada dokumen RPJMD khususnya periode tahun ke 2 (dua) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2014. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2014 juga memperhatikan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada tahapan ketiga RPJPD yakni periode tahun 2013 – 2017 sehingga terdapat kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang saling terintegrasi antar dokumen perencanaan.

Dengan demikian maka pembangunan tahun 2014 mengacu pada Visi **“Terwujudnya Rawa Makmur Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Mandiri Bernuansa Islami”**, serta misi-misi yakni : mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance); mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai potensi daerah khususnya rawa dan budaya lokal; mewujudkan masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius islam dan kultur budaya daerah; mewujudkan pemerataan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan; dan melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2014 arah kebijakan yang dibuat tentunya tidak terlepas dari kesinambungan dengan tahun

sebelumnya. Berbagai arah kebijakan pada tahun 2014 ini tetap mengacu pada arah kebijakan tahun sebelumnya, namun lebih tertuju pada upaya peningkatan hasil yang diperoleh pada tahun 2013. Perbaikan pada tata kelola pemerintahan harus selalu dilakukan dengan lebih mensinergikan pada upaya pelibatan unsur masyarakat atau lembaga perwakilan rakyat untuk terlibat secara aktif berkontribusi pada berbagai kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kompetensi dan kapasitas diri aparatur pemerintahan, penataan kelembagaan dan hubungan kerja antar instansi, meningkatkan kualitas kerja baik pada bidang perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengendalian dan pelaporan, serta meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pada aspek pemerintahan ini juga dilakukan kebijakan yang terarah pada menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban guna mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum memilih wakil-wakil rakyat baik anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi atau DPR pusat. Pada aspek ekonomi diarahkan pada pemanfaatan berbagai potensi lokal guna terciptanya nilai tambah ekonomi khususnya kawasan rawa, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, mendorong terbukanya lapangan kerja baru serta perbaikan kualitas tenaga kerja. Pada aspek sumberdaya manusia dilakukan kebijakan terhadap upaya meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, pada aspek infrastruktur wilayah diupayakan untuk melakukan persiapan pengembangan wilayah kawasan perkotaan dengan melakukan pembebasan lahan, meningkatkan ketersediaan jalan baru baik kecamatan maupun desa dalam upaya mengurangi isolasi, memelihara serta memperbaiki sarana jalan yang telah ada, memelihara dan meningkatkan infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sosial lainnya. Pada aspek lingkungan dilakukan pemeliharaan, pemulihan dan rehabilitasi serta mencegah potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 – 2017; Arahan periode ketiga (2013 – 2017) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025; program pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025; maka pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2014 ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional; optimalisasi pemanfaatan lahan rawa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan perekonomian masyarakat; meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan; meningkatkan pemberdayaan masyarakat; menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja; menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah; mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan.

Atas dasar hal tersebut di atas selanjutnya sasaran yang diinginkan adalah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel; Terwujudnya pelayanan publik yang prima; Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Meningkatnya pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan; Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian; Meningkatkan ketahanan pangan daerah; Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata ; Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah; Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; Menurunnya persentase kemiskinan; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan; Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif; Terwujudnya tatanan sosial

kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa; Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan; Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan; Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman; Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan; Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya alam/lahan berupa hamparan rawa yang terkelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal; Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

Prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan tahun 2014 dengan memperhatikan kesinambungan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017; serta mengacu pada program pembangunan daerah tahapan ketiga (2013 – 2017) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, disajikan dalam bentuk prioritas daerah dan sasaran serta target capaian kinerja yang diinginkan pada tahun 2014, meliputi :

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Bidang Ekonomi

Prioritas pada bidang ekonomi yakni pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dengan sasaran:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita
2. Pemantapan ketahanan pangan daerah
3. Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal
4. Meningkatnya PAD dan penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal
6. Meningkatnya pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM

7. Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja
8. Peningkatan produksi sektor pertanian disertai pengolahan hasil

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Bidang Sosial Budaya

- a. Peningkatan implementasi good governance, dengan sasaran :
 1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 2. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah
 3. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 4. Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
 2. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
 3. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak
 4. Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
- c. Penanggulangan Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Pencapaian target MDGs, dengan sasaran :
 1. Menurunnya persentase kemiskinan
 2. Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif
 3. Meningkatnya kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja
 4. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
 5. Meningkatnya capaian tujuan MDG's
- d. Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan, dengan sasaran :
 1. Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwarnai nilai-nilai keagamaan
 2. Pengembangan pariwisata dan pelestarian seni budaya

3. Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kepedulian terhadap korban bencana alam
4. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga
5. Peningkatan keberdayaan masyarakat
6. Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera
7. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.
8. Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Bidang Infrastruktur

- a. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi, dengan sasaran :
 1. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai
 2. Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah
- b. Pengembangan kota Amuntai, dengan sasaran :
 1. Terlaksananya pembebasan lahan untuk pengembangan kota Amuntai
 2. Terciptanya kawasan pemukiman yang representatif dan layak huni
- c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran :
 1. Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan
 2. Pencegahan potensi bencana dan rehabilitasi pasca bencana
- d. Percepatan pembangunan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi, dengan sasaran :
 1. Tersedianya operasional dan strategi sanitasi kabupaten
 2. Pengarustamaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Atas dasar berbagai program prioritas daerah dan sasarannya, maka indikator capaian tahun 2014 yang diinginkan pada beberapa aspek meliputi :

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Meningkatnya IPM dari 69,45 ditahun 2011 menjadi 70,30 pada tahun 2014.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 6,39 % tahun 2011 menjadi 6,59 % pada tahun 2014.
3. Meningkatnya pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku dari Rp. 8.387.322,- tahun 2011 menjadi Rp. 11.163.526,- ditahun 2014 ; atau atas dasar harga konstan tahun 2011 Rp. 4.342.079,- menjadi Rp. 4.884.248,- ditahun 2014.
4. Berkurangnya persentase kemiskinan dari 7,31 % tahun 2011 menjadi 6,07 % tahun 2014.
5. Meningkatnya angka melek huruf dari 96,02 % tahun 2011 menjadi 96,26 % tahun 2014.
6. Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah dari 7,48 tahun ditahun 2011 menjadi 7.99 tahun ditahun 2014.
7. Meningkatnya APK SD/MI dari 102,84 tahun 2011 menjadi 100 pada tahun 2014 ; APM SD/MI dari 92,85 ditahun 2011 menjadi 96,42 ditahun 2014.
8. Meningkatnya APK SMP/MTs dari 83,81 tahun 2011 menjadi 93.32 ditahun 2014 ; APM SMP/MTs dari 68,62 ditahun 2011 menjadi 76,82 ditahun 2014.
9. Meningkatnya APK SLTA dari 70,30 tahun 2011 menjadi 87,40 ditahun 2014 ; APM dari 46,81 tahun 2011 menjadi 55,18 tahun 2014.
10. Bertambahnya angka usia harapan hidup dari 63,47 tahun 2011 menjadi 64,45 tahun 2014.

11. Berkurangnya persentase balita gizi buruk dari 5,68 % tahun 2011 menjadi 5,35% ditahun 2014.

b. Aspek Layanan Umum

1. Meningkatkan pertumbuhan seluruh sektor perekonomian terhadap PDRB .
2. Meningkatkan produksi sektor perikanan budidaya dari 9.877,8 ton tahun 2012 menjadi 10.890,3 ton tahun 2014.
3. Meningkatkan produksi sektor perikanan tangkap dari 12.047,50 ton tahun 2012 menjadi 12.059,55 ton tahun 2014.
4. Meningkatkan populasi ternak besar dari 9.162 ekor tahun 2012 menjadi 9.624 ekor tahun 2014.
5. Meningkatkan populasi ternak kecil dari 1.650 ekor tahun 2012 menjadi 1.720 ekor tahun 2014.
6. Meningkatkan populasi ternak unggas dari 4.770.941 ekor tahun 2012 menjadi 4.809.135 ekor tahun 2014.
7. Meningkatkan produksi daging ternak besar dari 556.990 Kg tahun 2012 menjadi 567.852 Kg tahun 2014.
8. Meningkatkan produksi daging ternak kecil dari 15.602 Kg tahun 2012 menjadi 16.548 Kg tahun 2014.
9. Meningkatkan produksi daging ternak unggas dari 2.195.375 Kg tahun 2012 menjadi 2.423.157 Kg tahun 2014.
10. Meningkatkan produksi telur dari 1.260.174 Kg tahun 2012 menjadi 1.223.150 Kg tahun 2014.
11. Meningkatkan produksi DOD (Day Old Duck) dari 1.339.220 ekor tahun 2012 menjadi 1.414.205 ekor tahun 2014.
12. Meningkatkan produksi sektor tanaman pangan padi dari 153.313 ton tahun 2012 menjadi 171.066 ton tahun 2014.
13. Meningkatkan produksi perkebunan sawit rakyat dari 5,20 ton tahun 2012 menjadi 10,50 ton tahun 2014.

14. Meningkatkan produksi perkebunan sawit swasta dari 1.164,57 ton tahun 2012 menjadi 6.154,26 ton tahun 2014.
15. Meningkatkan produksi perkebunan rakyat dari 176,68 ton tahun 2011 menjadi 203 ton tahun 2014.
16. Meningkatkan luas areal pertanian organik dari 204,91 Ha tahun 2011 menjadi 230 Ha tahun 2014.
17. Meningkatnya persentasi koperasi aktif dari 74,38% tahun 2011 menjadi 80,31% tahun 2014.
18. Bertambahnya angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun dari 96.02 % tahun 2011 menjadi 96,59 % tahun 2014.
19. Meningkatnya pendidikan anak usia dini (PAUD) dari 71,11 % tahun 2011 menjadi 75,55 % tahun 2014.
20. Berkurangnya angka putus sekolah (APS) untuk SD/MI dari 0,42 % tahun 2011 menjadi 0,36 % tahun 2014 ; SMP/MTs dari 10,73 % tahun 2011 menjadi 10,64 % tahun 2014 ; SLTA dari 35,80 % tahun 2011 menjadi 35,71 % tahun 2014.
21. Relatif meningkatnya angka kelulusan sekolah untuk SD/MI dari 97,5 % tahun 2011 menjadi 100 % tahun 2014 ; SMP/MTs dari 86,9 % tahun 2011 menjadi 94,18 % tahun 2014 ; SLTA dari 91,10 % tahun 2011 menjadi 99,95 % tahun 2014.
22. Berkurangnya angka kematian bayi (AKB) dari 22 ditahun 2012 menjadi 21 ditahun 2014.
23. Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari 80,8 % ditahun 2012 menjadi 82% ditahun 2014.
24. Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari 85,8 % tahun 2012 menjadi 89 % pada tahun 2014.
25. Meningkatnya cakupan kelurahan/desa *universal child immunitation (UCI)* dari sebesar 97,7 % tahun 2012 menjadi 100 % pada tahun 2014.

26. Tetap dipertahankannya cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 % ditahun 2014.
27. Meningkatnya cakupan temuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA dari 51,11 % tahun 2011 menjadi 60 % tahun 2014.
28. Tetap dipertahankan cakupan temuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 % tahun 2014.
29. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 73,5 % tahun 2012 menjadi 100 % tahun 2014.
30. Meningkatnya cakupan kunjungan bayi dari 83,46 % tahun 2012 menjadi 87 % tahun 2014.
31. Meningkatnya cakupan pelayanan puskesmas dari 78,43 % tahun 2012 menjadi 87 % tahun 2014.
32. Meningkatnya cakupan kunjungan balita dari 49,60 % tahun 2012 menjadi 80 % tahun 2014.
33. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dari 1,89 % tahun 2011 menjadi 1,86 % tahun 2014.
34. Penduduk ber KTP 100 % .
35. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 100 %.
36. Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dari 76,24 % tahun 2011 menjadi 78,04 % tahun 2014.
37. Berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dari 38,46 tahun 2011 menjadi 36,06 % tahun 2014.
38. Meningkatnya ketersediaan jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk dari 59 orang tahun 2011 menjadi 75 orang ditahun 2014.
39. Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah kelurahan dari 40 buah tahun 2011 menjadi 46 buah ditahun 2014.
40. Mempertahankan jumlah PKK aktif sebesar 100 % tahun 2014.
41. Mempertahankan jumlah pos yandu aktif 100 % ditahun 2014.
42. Tersedianya dokumen perencanaan meliputi RPJPD Tahun 2005 - 2025, RTRW Tahun 2012-2032, RPJMD Tahun 2013-2017 (dengan peraturan daerah), RKPD Tahun 2014 (dengan Peraturan Bupati),

Renja SKPD Tahun 2014 pada seluruh SKPD (dengan penetapan kepala SKPD) di tahun 2013.

43. Mempertahankan keberadaan web site pemerintah daerah 1 unit ditahun 2014.
44. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari 58 % tahun 2012 menjadi 74 % tahun 2014.
45. Meningkatnya rumah tangga bersanitasi dari 51 % tahun 2012 menjadi 65 % tahun 2014.
46. Meningkatnya rumah tangga pengguna air bersih perpipaan dari 40 % tahun 2012 menjadi 60 % tahun 2014.
47. Meningkatnya penanganan sampah dari 92,55 % di tahun 2012 menjadi 94,00 pada tahun 2014 (berdasarkan cakupan wilayah yang sudah terlayani).
48. Meningkatnya jumlah penduduk berakses air minum/air bersih dari 57,53 % tahun 2012 menjadi 65 % tahun 2014.

c. Aspek Daya Saing Daerah

1. Meningkatnya kemampuan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dari Rp 2.995.000,- ditahun 2011 menjadi Rp. 3.004.106,- ditahun 2014.
2. Meningkatnya kemampuan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dari Rp. 787.000,- tahun 2011 menjadi Rp. 825.890,- tahun 2014.
3. Meningkatnya rata-rata rasio lulusan S1, S2 dan S3 dari 3,74 % tahun 2011 menjadi 3,89 % tahun 2014.
4. Menurunnya rasio ketergantungan dari 0,54 % tahun 2011 menjadi 0,49 % tahun 2014.
5. Meningkatnya persentase rumahtangga yang menggunakan air bersih dari 57,53 % tahun 2012 menjadi 65 % tahun 2014.
6. Meningkatnya persentase penduduk berakses air bersih perpipaan dari 40 % tahun 2012 menjadi 60 % tahun 2014.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Atas dasar isu strategis dan prioritas pembangunan serta sasaran yang akan dicapai maka disusun perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, dirangkum dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 sebagaimana masukan yang disampaikan oleh SKPD dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014.

TABEL 5.1.
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2014

Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2014					
							APBD Murni		Sumber Dana			
							APBD Kab	APBD Prov	APBD Kab DAK	Fisik	Pendamping	APBD Prov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH												
BIDANG SOSIAL BUDAYA												
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor dengan baik	Set. DPRD	18%	55.800,000	55.800,000					
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik untuk kantor dan kegiatan pelayanan	Set. DPRD	20%	102.000,000	102.000,000					
3. Pembayaran biaya perjalanan & pajak-pajak kendaraan dinas/operasional			Lancarnya tugas-tugas DPRD	Set. DPRD	19%	36.300,000	36.300,000					
4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS/Pejabat Negara/Anggota DPRD			Meningkatnya kinerja Anggota DPRD	Set. DPRD	20%	756.550,000	756.550,000					
5. Penyusunan Laporan Keuangan ,fotocopy/penjilidan Laporan			Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dan barang	Set. DPRD	21%	170.000,000	170.000,000					
6. Penyediaan Bahan & Alat Kebersihan Kantor			Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	Set. DPRD	20%	63.650,000	63.650,000					
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya barang	Set. DPRD	21%	75.000,000	75.000,000					
8. Penggantian Barang Cetak dan Blanko dan Penggantian Dokumen			cetakan ,blanko dan penggantian dokumen	Set. DPRD	21%	206.405,000	206.405,000					
9. Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya komponen Instalasi Listrik/penerangan	Set. DPRD	21%	43.000,000	43.000,000					
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tercapainya kebutuhan peralatan rumah tangga	Set. DPRD	20%	5.650,000	5.650,000					
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Meningkatnya pengetahuan dan informasi anggota DPRD	Set. DPRD	20%	153.927,000	153.927,000					
12. Penyediaan Makanan dan minuman			Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dalam kegiatan DPRD	Set. DPRD	20%	420.000,000	420.000,000					
13. Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				Set. DPRD	20%	2.480.000,000	2.480.000,000					
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah			20%							
14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				Set. DPRD	20%	651.230,000	651.230,000					
15. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Tersedianya sarana mobilisasi anggota DPRD	Set. DPRD	20%	603.270,000	603.270,000					
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah jabatan ketua DPRD			Pemeliharaan rumah jabatan ketua DPRD	Set. DPRD	13%	75.000,000	75.000,000					

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Terpeliharanya gedung kantor untuk kegiatan administrasi dan pelayanan	Set. DPRD	20%	976.975.000	976.975.000				
18.	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan pimpinan DPRD			Terpeliharanya mobil Jabatan Pimpinan untuk kelancaran operasional	Set. DPRD	20%	400.000.000	400.000.000				
19.	Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mobilitas DPRD	Set. DPRD	100%	1.250.000.000	1.250.000.000				
20.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan /dinas (pimpinan DPRD)			Terpeliharanya perlengkapan rumah pimpinan DPRD	Set. DPRD	100%	120.000.000	120.000.000				
21.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor			Terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk kegiatan Administrasi dan pelayanan	Set. DPRD	100%	175.000.000	175.000.000				
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
22.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan sarana prasarana SDM Aparatur	Set. DPRD	100%	450.000.000	450.000.000				
4.	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											
23.	Pembahasan Raperda			Pembahasan Raperda dengan eksekutif	Set. DPRD	100%	580.250.000	580.250.000				
24.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Rapat komisi/rapat kerja, rapat intern DPRD	Set. DPRD	100%	90.000.000	90.000.000				
25.	Rapat-rapat Paripurna			Rapat-rapat paripurna DPRD	Set. DPRD	100%	179.500.000	179.500.000				
26.	Sosialisasi dan penjangangan aspirasi masyarakat			Sosialisasi Perda dan penjangangan aspirasi di masyarakat	Set. DPRD	100%	300.000.000	300.000.000				
27.	Kunker Pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah			Study Banding dan kunjungan kerja	Set. DPRD	100%	1.200.000.000	1.200.000.000				
28.	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			Bimtek, semlokakad dan pelatihan	Set. DPRD	100%	4.744.100.000	4.744.100.000				
29.	Study Banding/kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar daerah			Study Banding dan kunjungan kerja	Set. DPRD	100%	3.400.000.000	3.400.000.000				
30.	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD			Jumlah Raperda Inisiatif DPRD	Set. DPRD	100%	165.920.000	165.920.000				
31.	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD			Tersebarnya Informasi kegiatan DPRD	Set. DPRD	100%	346.228.000	346.228.000				
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi											
32.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan kualitas sosial budaya dan penernaan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Terbitnya buletin Karya Sadaya setiap bulan	Set. DPRD	100%	123.200.000	123.200.000				
5	32	JUMLAH ANGGARAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					20.398.955.000	20.398.955.000				
SEKRETARIAT DAERAH												
Urusan												
Bidang Urusan												
Bagian Pemeintahan												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 Program perencanaan tata ruang	Bidang Infrastruktur: Penyelesaian dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Terciptanya perbaikan antara aksesibilitas wilayah	Tersedianya data dan informasi nama rupa bumi di Kab. HSU	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatkan pelayanan publik kinerja pemerintah	Meningkatkan koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah yg menunjang fungsi pemerintahan	Kab. HSU	65%	107,696,362	107,696,362	-	-	-	-
2 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA			12 Keg	Kab. HSU		707,916,056	707,916,056	-	-	-	-
3 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			10 Kec	Kab. HSU		66,194,663	66,194,663	-	-	-	-
3 Program pengembangan wilayah perbatasan	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Terciptanya perbaikan antara aksesibilitas wilayah	Facilitasi batas wilayah antar kecamatan, desa, dan kelurahan dalam menunjang pengembangan wilayah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
4 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan			219 Desa/Kelurahan	Kab. HSU	200,00	223,714,964	223,714,964	-	-	-	-
5 Program penyelesaian konflik-konflik perbatasan	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Terciptanya perbaikan antara aksesibilitas wilayah	Teraksananya fasilitasi penyelesaian konflik perbatasan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
5 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik perbatasan			100%	Kab. HSU	100%	70,465,286	70,465,286	-	-	-	-
6 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Facilitasi dan koordinasi pembinaan kerukunan kehidupan bermasyarakat dalam pelaksanaan empat pilar kebangsaan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
7 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat			100%	Kab. HSU	100%	318,219,480	318,219,480	-	-	-	-
7 Program pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Teraksananya kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
8 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Implementasi pelayanan E-Government dalam rangka efesensi dan transparansi	Kab. HSU	45%	42,525,554	42,525,554	-	-	-	-
8 Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH			70%	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
9 Pendampingan penerapan E-Government			100%	Kab. HSU	100%	319,026,519	319,026,519	-	-	-	-
9 Program perencanaan pembangunan daerah	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas publik	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
10 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban			2 Laporan	Kab. HSU		154,388,511	154,388,511	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Program pendidikan politik masyarakat	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yg berlaku	Teraksananya fasilitasi pendidikan politik yang menunjang peningkatan partisipasi politik	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
11	Penyuluhan kepada masyarakat	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	80% Fasilitasi pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah serta dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan pelayanan publik	Kab. HSU	74%	84.262.685	84.262.685	-	-	-	-
12	Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Terciptanya perbaikan aksesibilitas wilayah	100% Fasilitasi penyelesaian tapal batas administrasi	Kab. HSU	100%	124.450.346	124.450.346	-	-	-	-
13	Fasilitasi /percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	7 Trayek batas daerah	Kab. HSU	6,00	187.907.430	187.907.430	-	-	-	-
14	Program peningkatan pelayanan administrasi terpadu	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan administrasi terpadu (PATEN) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
14	Fasilitasi pengembangan pelayanan administrasi terpadu			Persentase fasilitasi PATEN	Kab. HSU	75%	58.857.951	58.857.951	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Pemerintahan				Kab. HSU							
	Bagian Hubungan Masyarakat				Kab. HSU							
14	Program kerjasama informasi dengan massmedia	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Semakin luasnya akses pelayanan informasi bagi masyarakat pemerintah Kab.HSU	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
15	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			Jumlah publikasi informasi pembangunan daerah	Kab. HSU	2040,00	2.212.567.279	2.212.567.279	-	-	-	-
16	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Jumlah Dokumentasi daerah	Kab. HSU	560,00	1.182.891.506	1.182.891.506	-	-	-	-
15	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Pendokumentasian naskah pidato dan kegiatan pemkab yang baik.	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
17	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip			Jumlah tersusunnya dan terbitnya naskah sumber arsip	Kab. HSU	5,100,00	339.361.256	339.361.256	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Hubungan Masyarakat				Kab. HSU							
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				Kab. HSU							
					Kab. HSU		3.734.820.041	3.734.820.041	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatkan pelayanan publik kinerja pemerintah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-
18	Penyediaan jasa surat menyurat			Terlaksananya jasa surat menyurat	Kab. HSU	100%	70.739.044	70.739.044	-	-	-
19	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia	Kab. HSU	5 Paket	14.235.411	14.235.411	-	-	-
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. HSU	30 Kali	219.006.328	219.006.328	-	-	-
17	Program pengembangan nilai budaya	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan pelestarian seni budaya	Terlaksananya pengembangan nilai budaya	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-
21	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			Jumlah bantuan yg disalurkan pada organisasi kesenian	Kab. HSU	12 Organisasi	201.526.886	201.526.886	-	-	-
18	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan keperguruan dan olahraga	Terlaksananya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-
22	Peningkatan kemandirian dan ketayuan keperguruan			Terlaksananya kegiatan organisasi keperguruan	Kab. HSU	100%	109.503.164	109.503.164	-	-	-
19	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kepedulian terhadap korban bencana alam	Terlaksananya pelayanan sosial terhadap PMKS	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-
23	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS			Jumlah penyandang masalah sosial yg terlayani	Kab. HSU	60 Org	49.276.424	49.276.424	-	-	-
24	Sosialisasi sistem dan prosedur pemberian bantuan dan pelayanan sosial			Jumlah peserta sosialisasi	Kab. HSU	500 Org	70.322.932	70.322.932	-	-	-
20	Program peningkatan peran serta keperguruan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan dan olahraga	Terlaksananya peran keperguruan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-
25	Pembinaan organisasi keperguruan			Terlaksananya pembinaan organisasi keperguruan	Kab. HSU	100%	164.254.746	164.254.746	-	-	-
26	Facilitasi aksi bakti sosial keperguruan			Terlaksananya fasilitasi aksi bakti sosial keperguruan	Kab. HSU	100%	21.900.633	21.900.633	-	-	-
27	Facilitasi kegiatan keperguruan			Terlaksananya kegiatan keperguruan	Kab. HSU	100%	149.132.359	149.132.359	-	-	-
21	Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengrusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga serta keluarga sejahtera	Terlaksananya peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan			Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	Kab. HSU	100%	96.910.300	96.910.300	-	-	-	-
22	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan pariwisata dan pelestarian seni budaya	Terseleenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
29	Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional dan kedaerahan			Terlaksananya kegiatan yg bersifat nasional dan kedaerahan	Kab. HSU	25 Keg	492.764.239	492.764.239	-	-	-	-
23	Program pembinaan dan pengembangan keagamaan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yg diwarnai nilai-nilai keagamaan	Terseleenggaranya pembinaan dan pengembangan keagamaan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
30	Pembinaan dan pengembangan umat beragama			Terlaksananya pembinaan dan pengembangan umat beragama	Kab. HSU	12 Kali	1.989.453.487	1.989.453.487	-	-	-	-
31	Pengembangan dakwah dan sy'ar Islam			Terseleenggaranya dakwah dan sy'ar Islam	Kab. HSU	50 Kali	295.549.040	295.549.040	-	-	-	-
32	Penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri			Dapat diketahuinya awal Ramadhan dan Idul Fitri	Kab. HSU	2 Kali	5.475.158	5.475.158	-	-	-	-
33	Penyelenggaraan silaturahmi dan penguatan ukhuwah islamiyah pejabat daerah dan masyarakat			Terseleenggaranya halai bhialai pejabat daerah dan masyarakat	Kab. HSU	6 Kali	763.899.549	763.899.549	-	-	-	-
34	Dukungan pembinaan dan penyelenggaraan pemberangkatan haji daerah			Terlaksananya dukungan pembinaan dan penyelenggaraan pemberangkatan haji daerah	Kab. HSU	2 Kali	517.566.706	517.566.706	-	-	-	-
35	Dukungan dan fasilitas penyelenggaraan urusan keagamaan			Terlaksananya dukungan penyelenggaraan keagamaan	Kab. HSU	3 Kali	164.254.746	164.254.746	-	-	-	-
36	Dukungan dan fasilitas penyelenggaraan Sy'ar-syar seni budaya keagamaan			Jumlah dukungan sy'ar-syar seni budaya keagamaan	Kab. HSU	100 Organisasi	164.254.746	164.254.746	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat				Kab. HSU		-	-	-	-	-	-
	Bagian Perencanaan dan SDA				Kab. HSU		-	-	-	-	-	-
24	Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Infrastruktur: Penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Tersedianya infrastruktur berkualitas dalam jumlah yg memadai	Lancarnya kegiatan operasional kantor	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
37	Penyediaan jas pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Kab. HSU	6.00	16.425.475	16.425.475	-	-	-	-
38	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Perbaikan peralatan kantor	Kab. HSU	7.00	16.644.481	16.644.481	-	-	-	-
39	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Penyediaan 3 unit peralatan kantor	Kab. HSU	3.00	35.573.198	35.573.198	-	-	-	-
40	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Koordinasi keluar daerah	Kab. HSU	50.00	136.878.955	136.878.955	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Program pendataan iklim usaha kecil menengah yang konduif	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatkan akses Permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan dalam hal perijinan dan permodalan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
41	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan usaha kecil menengah	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatkan akses Permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Meningkatnya investasi peserta sosialisasi	Kab. HSU	100,00	60.412.896	60.412.896	-	-	-	-
26	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatkan akses Permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Meningkatnya investasi di daerah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
42	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMMA			Jumlah investor	Kab. HSU	5,00	64.387.861	64.387.861	-	-	-	-
27	Program pengendalian pemeraman dan perusahaan lingkungan hidup	Bidang Infrastruktur: Perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan	Terkendalinya permasalahan lingkungan hidup	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
43	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup			Jumlah Monitoring	Kab. HSU	10 Kali	69.452.382	69.452.382	-	-	-	-
28	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Pemanfaatan ketahanan pangan daerah	Terpenulinya kebutuhan pangan masyarakat miskin	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
44	Koordinasi kebijakan perberasan			Koordinasi pengawasan dan pembinaan raskin bld. Pertanian	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
29	Program Pelayanan Raskin	Bidang Sosial Budaya: Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pencapaian target MDG's	Menurunnya persentase kemiskinan	Terpenulinya kebutuhan pangan masyarakat	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
45	Koordinasi pendistribusian raskin			Koordinasi raskin	Kab. HSU	5 Kali	146.473.163	146.473.163	-	-	-	-
30	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Bidang Infrastruktur: Perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan potensi bencana dan rehabilitasi pasca bencana	Meningkatnya kesejahteraan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
46	Evaluasi terhadap ketersediaan bibit/benih tanaman kehutanan & perkebunan			Koordinasi dan monitoring	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
31	Program Peningkatan Kesehatan/Tebaran Petani	Bidang Infrastruktur: Perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan potensi bencana dan rehabilitasi pasca bencana	Terendalinya permasalahan di lingkup Pertanian	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
47	Koordinasi Pembangunan Lingkup Pertanian			Jumlah Koordinasi	Kab. HSU	10 Kali	146.473.163	146.473.163	-	-	-	-
32	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Peningkatan ekonomi pertumbuhan daerah dan pendapatan perkapita	Berkembangnya IKM di daerah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
48	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah			Jumlah Peraturan bidang IKM	Kab. HSU	5 Buah	127.634.999	127.634.999	-	-	-	-
33	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Meningkatnya profit dan benefit	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
49	Peningkatan manajemen investasi daerah			Jumlah BUMD	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
50	Pembinaan terhadap BUMD			Jumlah BUMD yg terbhna	Kab. HSU	7 BUMD	226.003.839	226.003.839	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Bidang Infrastruktur: Perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terciptanya pembangunan yg berwawasan lingkungan	Terselesainya permasalahan SDA	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	51 Pengendalian dan pengawasan pemantapan SDA			Jumlah Koordinasi	Kab. HSU	7 Kali	38.326,107	38.326,107	-	-	-	-
35	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Bidang Ekonomi: Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Peningkatan ekonomi pertumbuhan daerah dan pendapatan perkapita	Terbti dan lancarnya pengembangan dana pemerintah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	52 Pemantapan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah			Jumlah kegiatan	Kab. HSU	20 Keg	13.578.392	13.578.392	-	-	-	-
36	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDG's	Peningkatan pencapaian Indeks pembangunan manusia	Meningkatnya wawasan/pengetahuan CPNS/PNS	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	53 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah			Mengikuti diklat	Kab. HSU	7 Kali	79.937.310	79.937.310	-	-	-	-
37	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pencapaian target MDG's	Peningkatan pencapaian Indeks pembangunan manusia	Terpilijahnya dirut PDAM secara definitif	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	54 Seleksi calon pimpinan/direktur BUMD			Jumlah kegiatan	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
38	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	Bidang Ekonomi: Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Meningkatnya investasi daerah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	55 Koordinasi pengembangan investasi daerah			Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Kab. HSU	7 Kali	157.517.481	157.517.481	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Perencanaan dan SDA				Kab. HSU		1.335.719.702	1.335.719.702	-	-	-	-
	Bagian Pembangunan				Kab. HSU				-	-	-	-
39	Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tercepatnya terbt administrasi	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah			35 kali	Kab. HSU	7,00	109.503.164	109.503.164	-	-	-	-
40	Program pengembangan data/informasi	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan informasi teknologi (IT)	Terseledanya data dan informasi terkini mengenai kebijakan pembangunan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	56 Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan			50 SK/Perbup/SE	Kab. HSU	10,00	207.842.481	207.842.481	-	-	-	-
41	Program kerjasama pembangunan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta realisasi fisik dan keuangan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	57 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah			60 kali Rekapitulasi laporan	Kab. HSU	12,00	161.180.335	161.180.335	-	-	-	-
	58 Monitoring, evaluasi dan pelaporan			78 kali monitoring	Kab. HSU	16,00	192.588.690	192.588.690	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Program penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan komunikasi dan informasi daerah	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan teknologi (IT)	Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	59 Penguatan kelembagaan pengelola Informasi publik pada SKPD			Efisiensi Kontrak terhadap pagu 100%	Kab. HSU	10,00	612,496,313	612,496,313	-	-	-	-
43	Program peningkatan pelayanan publik	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	60 Pembinaan pengadaan barang dan jasa			Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa	Kab. HSU	2,00	54,094,563	54,094,563	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Pembangunan				Kab. HSU		1.337.705.546	1.337.705.546	-	-	-	-
	Bagian Aset Daerah											
44	Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Tersedianya Infrastruktur berkualitas dalam jumlah yg memadai	Kelancaran tugas administrasi perkantoran	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	61 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Terpeliharanya peralatan kantor	Kab. HSU	1,00	6.789,196	6.789,196	-	-	-	-
	62 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Tercapainya pemenuhan peralatan & perlengkapan kantor	Kab. HSU	1,00	31.235,778	31.235,778	-	-	-	-
	63 Penyediaan makanan dan minuman			Terlaksananya penyediaan makanan & minuman rapat, tamu, dan kegiatan lainnya	Kab. HSU	1,00	68.439,478	68.439,478	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kab. HSU	1,00	248.709,062	248.709,062	-	-	-	-
45	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks pembangunan manusia	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur pengelola aset daerah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	63 Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tupoksi SKPD	Kab. HSU	1,00	51.849,748	51.849,748	-	-	-	-
	64 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terkait tupoksi SKPD	Kab. HSU	9,01g	49.276,424	49.276,424	-	-	-	-
46	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkat & berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	65 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Terusunnya data realisasi barang ke neraca (kompilasi data)	Kab. HSU	46,00	139.021,494	139.021,494	-	-	-	-
47	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatnya PAD dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkat & berkembangnya pengelolaan aset daerah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
66 Peningkatan manajemen aset/barang daerah			Terseleenggaranya pelaksanaan sensus/inventaris barang terhadap 46 SKPD	Kab. HSU	9,00	394,508,035	394,508,035	-	-	-	-
67 Pengamanan aset/barang milik daerah			Teraksananya pengamanan Aset daerah berupa peningkatan status tanah	Kab. HSU	35,00	507,079,040	507,079,040	-	-	-	-
Jumlah Bagian Aset Daerah				Kab. HSU		1,496,908,255	1,496,908,255	-	-	-	-
48 Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terseleenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
49 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Jumlah SP2D yang terbit Meningkatkan & berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. HSU Kab. HSU	5,500,00 70%	419,967,849 -	419,967,849 -	-	-	-	-
68 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran	Kab. HSU	1,00	34,663,227	34,663,227	-	-	-	-
69 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Opini audit BPK	Kab. HSU	WDP	91,277,458	91,277,458	-	-	-	-
50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bidang Ekonomi: Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatnya PAD dan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
70 Penyusunan analisa standar belanja			Jumlah Update ASB	Kab. HSU	10,00	469,464,200	469,464,200	-	-	-	-
71 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah			Jumlah perbup kebijakan akuntansi Perda	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
72 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah			Jumlah perbup	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
73 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD			Jumlah perda	Kab. HSU	1,00	451,521,289	451,521,289	-	-	-	-
74 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran APBD			Jumlah Perbup	Kab. HSU	1,00	289,488,040	289,488,040	-	-	-	-
75 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			Jumlah Perda	Kab. HSU	1,00	415,137,446	415,137,446	-	-	-	-
76 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran perubahan APBD			Jumlah Perbup	Kab. HSU	1,00	238,278,885	238,278,885	-	-	-	-
77 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Jumlah Perda	Kab. HSU	1,00	188,380,921	188,380,921	-	-	-	-
78 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pejabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Jumlah Perbup	Kab. HSU	1,00	155,801,102	155,801,102	-	-	-	-
79 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah			Jumlah SKPD yang terkoneksi Sinda (online)	Kab. HSU	10,00	433,754,963	433,754,963	-	-	-	-
80 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			Jumlah Peserta Sosialisasi	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
81 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			Jumlah Bimtek	Kab. HSU	2,00	86,606,053	86,606,053	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
51	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan daerah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	82 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah			Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah	Kab. HSU	10,00	82.127.373	82.127.373	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Keuangan				Kab. HSU		-	-	-	-	-	-
	Bagian Umum				Kab. HSU		3.356.468.806	3.356.468.806				
52	Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Tersedianya Infrastruktur berkualitas dalam jumlah yg memadai	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	83 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik			Lancarnya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	Kab. HSU	100%	1.573.998.482	1.573.998.482	-	-	-	-
	84 Penyediaan alat tulis kantor			Tersedianya alat tulis kantor	Kab. HSU	100%	152.297.001	152.297.001	-	-	-	-
	85 Penyediaan barang cetakan dan penggantian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Terpenulainya barang cetakan & penggantian Tersedianya peralatan & perlengkapan penunjang pekerjaan	Kab. HSU	100%	139.375.627	139.375.627	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman			Terlayannya tamu yg berkunjung ke daerah	Kab. HSU	100%	448.962.973	448.962.973	-	-	-	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah			Jumlah SPMD yg terbit	Kab. HSU	6.824,00	947.202.370	947.202.370	-	-	-	-
	86 Penyediaan jasa akomodasi tamu pemerintah daerah			Terlayannya penginapan tamu daerah	Kab. HSU	100%	219.006.328	219.006.328	-	-	-	-
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Tersedianya Infrastruktur berkualitas dalam jumlah yg memadai	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	87 Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Lancarnya tugas-tugas kendaraan	Kab. HSU	0,00	-	-	-	-	-	-
	88 Pengadaan peralatan rumah/jabatan/dinas			Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	Kab. HSU	100%	2.717.908.682	2.717.908.682	-	-	-	-
	89 Pengadaan peralatan gedung kantor			Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. HSU	100%	256.237.404	256.237.404	-	-	-	-
	90 Pengadaan meubeler			Tersedianya meubeler	Kab. HSU	100%	298.231.868	298.231.868	-	-	-	-
	91 Pengadaan tanah			Tersedianya tanah untuk pembangunan	Kab. HSU	100%	7.944.454.563	7.944.454.563	-	-	-	-
	92 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			keperluan umum	Kab. HSU	3 Buah	264.669.148	264.669.148	-	-	-	-
	93 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	Kab. HSU	5 Buah	961.328.279	961.328.279	-	-	-	-
	94 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kab. HSU	177,00	1.626.121.988	1.626.121.988	-	-	-	-
	95 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas			Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	Kab. HSU	100%	46.538.845	46.538.845	-	-	-	-
	96 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. HSU	100%	101.837.943	101.837.943	-	-	-	-
	97 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan			Terpeliharanya rumah jabatan	Kab. HSU	100%	2.211.963.917	2.211.963.917	-	-	-	-
	98 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	Kab. HSU	100%	280.328.100	280.328.100	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
54	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Meningkatnya SDM aparatur	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Jumlah kegiatan Bimtek yg diikuti	Kab. HSU	10 Keg	120.453,481	120.453,481	-	-	-	-
55	Program Penyelenggaraan/Pelaksanaan Tugas-tugas dan Operasional KdH dan WKDH	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya tugas-tugas dan operasional KdH & WKDH	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	99 Penyelenggaraan keprotokoleran dan rumah tangga kepala daerah & wakil kepala daerah			Terselenggaranya kegiatan keprotokoleran & rumah tangga KdH/WKdH	Kab. HSU	100%	821.711,744	821.711,744	-	-	-	-
	100 Penyelenggaraan/pelaksanaan tugas-tugas dan operasional kepala daerah & wakil kepala daerah			Terselenggaranya tugas-tugas dan operasional KdH/WKdH	Kab. HSU	100%	602.393,332	602.393,332	-	-	-	-
56	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya pelayanan kedinasan KdH/WKdH	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	101 Pemerintahan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri			Terlaksananya kunjungan pejabat negara/departemen/lem baga pemerintah/departemen luar negeri	Kab. HSU	100%	112.996,315	112.996,315	-	-	-	-
	102 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah			SPPD yg terbit	Kab. HSU	100%	19.163,054	19.163,054	-	-	-	-
	103 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya			SPPD yg terbit	Kab. HSU	100%	662.274,042	662.274,042	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Umum				Kab. HSU		-	-	-	-	-	-
	Bagian Organisasi				Kab. HSU		23.678.669,294	23.678.669,294	-	-	-	-
57	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersusunnya pedoman lima tahunan & tahunan serta terukurnya pencapaian kinerja instansi	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			Jumlah LAKIP	Kab. HSU	3,00	259.522,499	259.522,499	-	-	-	-
58	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Terciptanya perbaikan aksesibilitas wilayah antar	Perda dan perbup	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	104 Fasilitas pematapan SOTK pemerintah daerah otonom baru			Pematapan SOTK	Kab. HSU	7,00	129.213,734	129.213,734	-	-	-	-
59	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketepatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yg berlaku	Tersedianya instrumen analisis jabatan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
	105 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS			Tertatanya jabatan struktural di setiap SKPD	Kab. HSU	9,00	109.503,164	109.503,164	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan			Persentase peningkatan Disiplin PNSD	Kab. HSU	15%	136.878,955	136.878,955	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
60	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan pemerintah	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
106	Penyusunan SPM			Penilaian SOP, IKM dan SPP	Kab. HSU	1 SKPD	219,006,328	219,006,328	-	-	-	-
61	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terbitnya SKPD pelayanan	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
107	Pembinaan, pengawasan dan monitoring pelayanan publik			Penyusunan SOP, IKM dan SPP di SKPD pelayanan	Kab. HSU	3,00	87,602,531	87,602,531	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Organisasi				Kab. HSU		-	-	-	-	-	-
	Bagian Hukum						941,727,212	941,727,212				
62	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku	Terusunnya produk hukum daerah, tersosialisasinya dan terdokumentasikannya serta terselesainya sengketa hukum perdata	Kab. HSU	70%	-	-	-	-	-	-
108	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan			Jumlah produk hukum	Kab. HSU	400,00	341,647,682	341,647,682	-	-	-	-
109	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan			Jumlah orang	Kab. HSU	500,00	200,637,173	200,637,173	-	-	-	-
110	Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan			Jumlah Dokumentasi	Kab. HSU	650,00	170,688,057	170,688,057	-	-	-	-
111	Penanganan perkara dan penyelesaian sengketa hukum perdata			Jumlah perkara	Kab. HSU	2,00	75,023,246	75,023,246	-	-	-	-
	Jumlah Bagian Hukum						787,996,158	787,996,158				
62	JUMLAH ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH						44,695,666,722	44,695,666,722				

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya											
1.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	BKD	64 Orang	1,476,600,000	1,476,600,000				
2.	Diklat/Prajabatan bagi CPNS Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	BKD	300 Orang	1,000,000,000	1,000,000,000				
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	BKD	160 Orang	400,360,000	400,360,000				
4.	Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya Kualifikasi Kepegawaian	BKD	40 Orang	25,000,000	25,000,000				
5.	Pendidikan dan pelatihan Formal	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	BKD	134 Orang	100,000,000	100,000,000				
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
6.	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS di lingkungan Pemkab. HSU	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terbitnya PNS yang indisipliner dan timbulnya efek jera bagi PNS yang melanggar disiplin sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya lagi	BKD	10 kali	150,000,000	150,000,000				
7.	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Kualitas Pelayanan Publik	BKD	100%	150,000,000	150,000,000				

	8.	Pembuatan Buku Duk	(1)	Peningkatan implementasi good governance	(2)	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	(3)	Tersedianya data PNS sesuai DUK	(4)	BKD	(5)	70 Buku	(6)	8.225.000	(7)	8.225.000	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
	9.	Seleksi Penerimaan Calon PNS		Peningkatan implementasi good governance		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Terlaksananya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur		BKD		300 Formasi		274.245.000		274.245.000						
	10.	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS		Peningkatan implementasi good governance		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Terlaksananya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensinya		BKD		700 Orang		245.635.000		245.635.000						
	11.	Proses Administrasi Kepegangatan Aparatur		Peningkatan implementasi good governance		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Terselenggaranya proses Administrasi		BKD		2 Periode (1.000 Orang)		53.690.000		53.690.000						
	12.	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN		Peningkatan implementasi good governance		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Terlaksananya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur		BKD		5 Orang		50.000.000		50.000.000						
	13.	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Klatan Dinas		Peningkatan implementasi good governance		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Peningkatan pelayanan publik dan kinerja Aparatur		BKD		15 Orang		1.167.000.000		1.167.000.000						
	3. Pelayan Administrasi Perkantoran																					
	14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		3500 Surat		182.741.000		182.741.000						
	15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		168.800.000		168.800.000						
	16.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		9.000.000		9.000.000						
	17.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		53.641.000		53.641.000						
	18.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		25.000.000		25.000.000						
	19.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		180.175.000		180.175.000						
	20.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		8.200.000		8.200.000						
	21.	Penyediaan Makan dan Minum		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		46.700.000		46.700.000						
	22.	Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar Daerah		Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Jangka waktu layanan Administrasi Indeks kepuasan masyarakat Indeks kepuasan pegawai		BKD		1 tahun		400.000.000		400.000.000						
	4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																					
	23.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Peningkatan implementasi good governance		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur		BKD		100%		30.000.000		30.000.000						
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional		Peningkatan implementasi good governance		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur		BKD		100%		42.000.000		42.000.000						

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	BKD	100%	15.000.000	15.000.000				
26.	Penyediaan Kendaraan Dinas Roda	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	BKD	3 Unit	60.000.000	60.000.000				
5. Program Fasilitas Purna Tugas PNS												
27.	Facilitasi pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang sakit/tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	BKD	12 PNS/ tahun	65.000.000	65.000.000				
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem												
28.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	BKD	10 Buku	8.250.000	8.250.000				
29.	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	BKD	10 Buku	14.256.000	14.256.000				
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan												
30.	Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan berkesinambungan (Sosialisasi pp Nomor 53 Tahun 2010 dan pp Nomor 46 Tahun 2011	10 Kec	20 kali	100.000.000	100.000.000				
7 30 JUMLAH ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							6.509.518.000	6.509.518.000				
BADAN PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA												
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah			1 Tahun						
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	kab. HSU	1 Tahun	40.357.000	40.357.000				
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	kab. HSU	1 Tahun	34.578.000	34.578.000				
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab. HSU	12 Unit	89.860.000	89.860.000				
4.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kab. HSU	1 Tahun	238.000.000	238.000.000				
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah			1 Tahun						
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor			Terpeliharanya dan Terpenuhinya Kelayakan Gedung/Kantor	kab. HSU	1 Unit	15.000.000	15.000.000				
6.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Terpeliharanya dan Terpenuhinya kelayakan Kendaraan Dinas	kab. HSU	14 Buah	55.000.000	55.000.000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor			Terpeliharanya Kelayakan Peralatan Gedung/Kantor	Kab. HSU	27 Buah	14.500,000	14.500,000				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah			1 Tahun						
8.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal		3 Org	20,000,000	20,000,000				
9.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Tertaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait TUPOKSI SKPD		16 Org	80,700,000	80,700,000				
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Tewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			1 Tahun						
10.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya Data dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. HSU	1 Tahun	24,385,000	24,385,000				
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya dan Keagamaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			1 Tahun						
11.	Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Organisasi Perdesaan	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya dan Keagamaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Posyandu di Desa/keurahan	Kab. HSU	312 Pokbang	911,250,000	911,250,000				
12.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	SDA	SDA	Tertaksananya pelatihan KPM dan Pengurus LPM/BPSPAM Partisipas	Kab. HSU	5 Angkatan	150,800,000	150,800,000				
13.	Lomba Desa dan Kelurahan	SDA	SDA	Terselenggaranya Lomba Desa/keurahan yang dinilai	Kab. HSU	10 Kecamatan	137,715,000	137,715,000				
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Pemantapan Potensi Lokal untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Perkapita			1 Tahun						
14.	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa			Meningkatnya SDM Pengelola BUMDes di Kab. HSU	Kab. HSU	250 Org	36,170,000	36,170,000				
15.	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Pemantapan Potensi Lokal untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Perkapita	Meningkatnya Kemampuan Kelompok Masyarakat Ekonomi Perdesaan	Kab. HSU	10 Kecamatan	143,287,200	143,287,200				
16.	Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan			Terbinaanya Pos Pelayanan dan Teknologi di Desa	Kab. HSU	30 Org	43,440,000	43,440,000				
17.	Pameran Gelar TTG Nasional			Memotivasi Penerapan TTG oleh Masyarakat		1 Stand	79,974,000	79,974,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18. Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Pasar Desa			Meningkatnya kemampuan kelompok Masyarakat melalui PNPM	Kab. HSU	10 Desa	100,000,000	100,000,000				
19. Bantuan Perlatan Posyantik			Tercapainya Motivasi Penerapan TTG oleh Masyarakat	Kec. Sei. Pandar	1 Kecamatan	25,475,000	25,475,000				
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemantauan Potensi Lokal untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi	Meningkatkan Akses Permodalan dan Lapangan Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Lokal			1 Tahun						
20. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa			Terbinaanya Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Kab. HSU	10 Kecamatan	592,689,000	592,689,000				
21. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Terakomodasinya Usulan/Aspirasi Pembangunan Masyarakat	Kab. HSU	10 Kecamatan	105,132,800	105,132,800				
22. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa			Terlaksananya Pemberian Dana Stimulan di Kecamatan	Kab. HSU	10 Kecamatan	465,000,000	465,000,000				
23. Penyusunan Profil Desa			Terlaksananya Perdataan Program Pembangunan Desa dan Profil Desa	Kab. HSU	219 Desa	53,890,000	53,890,000				
24. Fasilitas BKAD, BP-UPK dan UPK			Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui PNPM	Kab. HSU	10 Kecamatan	39,124,000	39,124,000				
25. Dukungan Pemda Terhadap Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Sarana dan Pसरana di Desa	Desa Putat Atas	1 Desa	410,896,250	410,896,250				
26. Dukungan Pemda Terhadap Pelaksanaan Karya Bakti Membangun Desa	SDA	SDA	Terlaksananya Pembuatan Jalan di Desa	Bujur, Kaludaa	3 Desa	347,469,000	347,469,000				
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			1 Tahun						
27. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa			Meningkatnya Kualitas Perangkat Desa dalam Mengelola Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. HSU	336 Org	78,556,950	78,556,950				
28. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa			Tertantiknya semua Kepala Desa Yang Terpilih	Kab. HSU	30 Org	85,250,000	85,250,000				
29. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Terlaksananya Pembinaan Administrasi Desa	Kab. HSU	19 Desa/Kelurahan	38,987,000	38,987,000				
30. Study Banding/Pembelajaran bagi Aparat Pemerintah Desa			Meningkatnya Kemampuan Aparat Desa Pemerintah Desa tentang PADes dan APBDes			110,450,500	110,450,500				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel			1 Tahun						
31.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa			Terciptanya RAPDes yang sesuai dengan PERDA	Kab. HSU	10 Kecamatan	72.000,000	72.000,000				
10	Program Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera			1 Tahun						
32.	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan PKK			Terlaksananya Kegiatan PKK	Kab. HSU	1 Tahun	60.315,550	60.315,550				
33.	Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak PKK			Berkembangnya kemampuan kader PKK dalam berorganisasi	Kab. HSU	10 Kegiatan	43.145,000	43.145,000				
34.	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Dasawisma			Diperolehnya Dasawisma yang diunggulkan menjadi Dasawisma Percontohan	Kab. HSU	30 Dasawisma	37.850,000	37.850,000				
35.	Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan PKK			Diperolehnya Desa Binaan PKK yang dapat diunggulkan dan menjadi Percontohan	Kab. HSU	20 Desa	25.400,000	25.400,000				
36.	Pembinaan Kelompok-kelompok Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan			Terwujudnya Pereratan dan Kesatuan Hubungan Ukiwah Islamiyah	Kab. HSU	8 Kegiatan	30.950,000	30.950,000				
37.	Bakti Sosial dan Anjangsana PKK			Terwujudnya kesejahteraan keluarga	Kab. HSU		62.163,000	62.163,000				
38.	Sosialisasi Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)			Meningkatnya Pengetahuan Kader PKK tentang Pendapatan keluarga	Kab. HSU	1 kegiatan	9.250,000	9.250,000				
39.	Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD			Meningkatnya Kualitas SDM para Pendidik PAUD	Kab. HSU	1 kegiatan	19.786,950	19.786,950				
40.	Lomba Bercerita Tenaga Pendidik PAUD			Memambah kreativitas dan Motivasi para Pendidik PAUD	Kab. HSU		12.250,000	12.250,000				
41.	Seminar Membangun Karakter Anak Usia Dini			Meningkatkan Pengetahuan para Pendidik PAUD	Kab. HSU	70 Org	14.375,000	14.375,000				
42.	Lomba Penyuluhan Latihan Penyuluhan Pengelolaan Program (LP3) PKK			Memunculkan kesadaran dan kemampuan keluarga	Kab. HSU		19.545,000	19.545,000				
44.	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Keluarga			Memantapkan Pekarangannya Menjadi Sumber Pangan dan Gizi	Kab. HSU		62.278,000	62.278,000				
45.	Promosi Produk Hasil Binaan PKK			Terpromosinya Produk Hasil Binaan PKK	Kab. HSU		14.129,000	14.129,000				
47.	Pelatihan Kader Posyandu			Meningkatkan Pengetahuan Kualitas Kader Posyandu	Kab. HSU	500 Kader	57.677,100	57.677,100				
48.	Pusat Pelayanan Pembelajaran Percontohan (P4) PKK			Mengadakan PKK yang Dinamis	Kab. HSU	10 Kecamatan	13.890,300	13.890,300				
49.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis PKK			Koordinasi yang baik dalam Organisasi PKK	Kab. HSU	1 Tahun	209.099,600	209.099,600				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	49	JUMLAH ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA					5,332,041,200	5,332,041,200	0	0	0	0
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA												
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan												
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA												
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung kinerja	Kab. HSU	Lancarnya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik sampai 95%	20.355.000	20.355.000	-	-	-	-
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa adm keuangan	Kab. HSU	Lancarnya jasa adm keuangan sampai 90%	107.250.000	107.250.000	-	-	-	-
3	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pengadaan ATK	Kab. HSU	Meningkatnya kinerja sampai 90%	71.969.000	71.969.000	-	-	-	-
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan	Kab. HSU	Meningkatnya penyediaan dokumen, surat menyurat sampai 80%	31.799.100	31.799.100	-	-	-	-
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya pra sarana kantor sampai 80%	15.475.000	15.475.000	-	-	-	-
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya pra sarana kantor sampai 90%	65.234.500	65.234.500	-	-	-	-
7	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan makan minum	Kab. HSU	Meningkatnya layanan makan minum sampai 85%	69.500.000	69.500.000	-	-	-	-
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat/konsultasi ke luar daerah	Kab. HSU	Meningkatnya sistem koordinasi sampai 75%	450.000.000	450.000.000	-	-	-	-
2	Program peningkatan sarana dan pra sarana											
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya pra sarana kantor sampai 80%	92.244.000	92.244.000	-	-	-	-
10	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya pra sarana kantor sampai 85%	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
11	Pengadaan meubeler	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya pra sarana kantor sampai 70%	42.640.000	42.640.000	-	-	-	-
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. HSU	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas sampai 65%	87.940.000	87.940.000	-	-	-	-
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Kab. HSU	Meningkatnya usia pakai peralatan gedung kantor sampai 80%	22.875.000	22.875.000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur											
15	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Pencapaian indeks pembangunan manusia	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kab. HSU	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sampai 80 %	82.500.000	82.500.000	-	-	-	-
3	Program Keluarga Berencana											
16	Pembinaan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan KB	Peningkatan Laporan Klinik Jumlah KB Aktif	Kec	- 50 Laporan Klinik	90.000.000	90.000.000	-	-	-	-
17	Pelayanan KIE	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya Peningkatan Program Kependudukan dan KB	Kab/Kec	- 38.000 KB Aktif						
18	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Meningkatnya sarana prasarana KB	Meningkatnya sarana prasarana program KB di Kab. HSU	Kab. HSU/Kec	100	2.200.000.000	-	2.000.000.000	200.000.000	-	-
19	Operasional Mobil Unit Pelayanan KB Keliling	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan KB	Kab/Kec	80%	122.000.000	122.000.000	-	-	-	-
20	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan akseptor baru MOP	Kab/Kec	- 500 Akseptor	110.000.000	110.000.000	-	-	-	-
22	Pelayanan KB Medis Operasi	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan akseptor baru MOP/MOW	Kab/Kec	80 Akseptor	210.000.000	210.000.000	-	-	-	-
23	Pengadaan Obat Efek Samping	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Pengembangan pelayanan kesehatan	Peningkatan Pelayanan KB	Kab/Kec	500 Akseptor	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-
24	Facilitasi Forum pelayanan KRR bagi Kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Terbnyanya kel PJK KRR	Kab/Kec	Pk. Tumbuh =-30, Tegak =-10, Tegar =-5	90.000.000	90.000.000	-	-	-	-
25	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba	Peningkatan implementasi good governance	hukum dan ketataan	Tersebarnya Informasi tentang Narkoba, HIV/AIDS	Kab/Kec	500 Orang	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-
26	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Peningkatan Kualitas Kelompok	Kec	110 Kelompok	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-
27	Pengadaan Buku Juknis BKB dan KKA	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	Terseadainya Buku Panduan BKB	Kec	100 Eks	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
28	Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKK	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL dan PKK	Terbnyanya POKTAN	Kab/Kec	Meningkatnya keterampilan kelompok	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-
29	Pembinaan Teknis, Pelatihan, Pemodalan dan Pemarsaran Kelompok	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Terlaksananya Pemberian Keterampilan dan Pemberian Permодalan (banas)	Kab/Kec	30 Kelompok	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-
30	Peningkatan peran serta masyarakat dan Promosi Keluarga Sejahtera	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya peran dan partisipasi masy dim pembangunan	Penguatan Kelembagaan KB	Kab/Kec	Meningkatnya Dukungan Peran masyarakat	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-
31	Pengolahan Data dan Pelaporan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terseadainya Data Keluarga	Kab/Kec	65 KK	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-
4	Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan											
32	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dgn kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan/pengurusan gender, perlindungan anak dan KB	Terbnyanya keserasian dan kebijakan kualitas perempuan dan anak	Kab. HSU	Meningkatnya pengetahuan tentang gender bagi masyarakat	5.1.860.000	5.1.860.000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
33	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelatihan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2PP)	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan perempuan	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. HSU	Meningkatnya pengetahuan pengurus P2TP2A	48.762.000	48.762.000	-	-	-	-
34	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan perempuan	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. HSU	Meningkatnya dukungan tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	29.870.000	29.870.000	-	-	-	-
35	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. HSU	Meningkatnya dukungan tentang penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	63.450.000	63.450.000	-	-	-	-
36	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. HSU	Meningkatnya kualitas kelembagaan PP & PA	257.800.000	257.800.000	-	-	-	-
37	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan pemanfaatan informasi teknologi	Terlaksananya penyebaran informasi tentang gender dan anak	Kab. HSU	Tersedianya informasi tentang gender dan anak	25.652.000	25.652.000	-	-	-	-
38	Advokasi Pengarusutamaan Anak	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya advokasi pengarusutamaan anak	Kab. HSU	Meningkatnya dukungan kepada PLA	22.350.000	22.350.000	-	-	-	-
39	Peningkatan anak bermasalah dengan hukum dan KDRT	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penanganan ABH & KDRT	Kab. HSU	Tertanganinya ABH dan KDRT	34.000.000	34.000.000	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan											
40	Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Promosi Gender	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan perempuan	Terlaksananya kegiatan yang berbasis kesetaraan gender	Kab. HSU	Meningkatnya kualitas dan peran serta perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender	65.600.000	65.600.000	-	-	-	-
7	Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan											
41	Pelatihan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan perempuan	Kab. HSU	Meningkatnya partisipasi perempuan pimpinan peremban perempuan dim pembangunan.	7.565.000	7.565.000	-	-	-	-
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
42	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender anak	Kab. HSU	Meningkatnya dukungan terhadap PUG	19.550.000	19.550.000	-	-	-	-
9	Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan											

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1 Penyediaan Surat Menyurat			Lancarnya Pelaksanaan Tugas		100%	40,000,000	40,000,000				
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran		100%	100,000,000	100,000,000				
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			SPI Administrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu		100%	50,000,000	50,000,000				
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kenyamanan, Keindahan dan Kentraman kerja		100%	45,000,000	45,000,000				
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pelaksanaan Tugas Lancar		100%	40,000,000	40,000,000				
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor			Administrasi Berjalan lancar		100%	17,500,000	17,500,000				
	7 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor			Lancarnya Pelaksanaan Tugas		100%	35,000,000	35,000,000				
	8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Peningkatan kinerja		100%	300,000,000	300,000,000				
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja		100%	210,000,000	210,000,000				
	10 Penyediaan makan dan minum			Lancarnya Pelaksanaan Tugas		100%	25,000,000	25,000,000				
	11 Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi keluar Daerah			Lancarnya Pelaksanaan Tugas		100%	550,000,000	550,000,000				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Bertinginya sarana dan prasarana aparatur		100%						
	12 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor			Terdipatnya keamanan dan kenyamanan kerja		100%	250,000,000	250,000,000				
	13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Peningkatan kinerja aparatur		100%	125,000,000	125,000,000				
	14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Lancarnya pelaksanaan tugas		100%	10,000,000	10,000,000				
	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan kinerja		100%	24,500,000	24,500,000				
	15 Pengadaan Pakalan Dinas beserta perlengkapan			Peningkatan kinerja		100%	16,500,000	16,500,000				
	16 Pengadaan Pakalan Lapangan			Peningkatan kinerja		100%	1,000,000	1,000,000				
	17 Pengadaan Pakalan Olah Raga			Peningkatan kinerja		100%	7,000,000	7,000,000				
	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		100%						
	18 Pendidikan dan Pelatihan Formal			Meningkatnya kinerja aparatur		100%	120,000,000	120,000,000				
	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%						
	19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja		100%	45,000,000	45,000,000				
	20 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja		100%	10,000,000	10,000,000				
	21 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja		100%	10,000,000	10,000,000				
	22 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja		100%	30,000,000	30,000,000				
	STATISTIK											

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Sebagai Bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah								
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan kinerja Pemerintah	KDA dan KCA Kab. HSU Tahun 2014, Statistik Daerah HSU	Kab. HSU	4 Dokumen (80 buku)	368,000,000	368,000,000				
23	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah			Tersedia data dan informasi untuk perencanaan		19%						
				Tersedia Buku Kompilasi Data-data Hasil Pembangunan, Buku RKK Kab. HSU, Forum			102,000,000	102,000,000				
24	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah			Tersedia Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut Kecamatan Kab. HSU			163,200,000	163,200,000				
25	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB											
PEMERINTAHAN UMUM												
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Sebagai Bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah								
26	Penyusunan Standar Satuan Harga			Tersedia Dokumen SHB 2014 dan HSPK/HSEGN Kab. HSU			112,200,000	112,200,000				
PERENCANAAN PEMBANGUNAN												
8	Program Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Sebagai Bahan penyusunan perencanaan pembangunan								
27	Kajian-kajian Pembangunan			Tersusunnya Kajian Potensi /Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. HSU dan Analisa Biaya Pembangunan Gedung Negara Kab. HSU			267,240,000	267,240,000				
BIDANG URUSAN PERENCANAAN												
9	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Sinkronisasi pembangunan								
28	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah			Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan		2 pertemuan	28,600,000	28,600,000				
29	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah			Meningkatnya wawasan aparat, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah		2 Pertemuan	102,100,000	102,100,000				
10	Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Implementasi rencana dalam dokumen RPPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah								

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Penyusunan Rancangan RKPd			Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPA5, RAPPD Tahun 2015 dan Perubahan Tahun 2014		2 Dokumen	153,020,000	153,020,000				
31	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd			Penyempurnaan rancangan akhir RKPd Tahun 2015		1 Pertemuan	70,000,000	70,000,000				
32	Penetapan RKPd			Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, RAPPD 2015 dan Perubahan 2014		2 Dokumen	30,000,000	30,000,000				
33	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah			Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaimana pelaksanaan yang akan datang			17,500,000	17,500,000				
34	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah			Terkendali dan terelaksasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2014		16 Dokumen	350,000,000	350,000,000				
35	Penyusunan KUA PPA5			Bahan penyusunan RAPPD/APBD Tahun 2015 dan APBD perubahan Tahun 2014		4 Dokumen	115,000,000	115,000,000				
36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan		LS	77,575,000	77,575,000				
11	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	Kab. HSU	50%						
37	Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah			Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	Kab. HSU	40%	240,000,000	240,000,000				
38	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah			Tersedianya data indikator ekonomi daerah	Kab. HSU	80%	250,000,000	250,000,000				
39	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab. HSU	50%	200,000,000	200,000,000				
40	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			Tertaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	Kab. HSU	75%	200,000,000	200,000,000				
41	Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan			Tersedianya data indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	Kab. HSU	80%	300,000,000	300,000,000				
12	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDG's	Meningkatnya Capaian MDG's	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan Tertaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan	Kab. HSU	19%	230,000,000	230,000,000				
42	Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan kemiskinan	Penanganan ketenagakerjaan dan pencapaian target MDG's	Menurunnya persentase kemiskinan	Tertaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan	Kab. HSU	19%	230,000,000	230,000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
43 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Peningkatan Kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDG's	Meningkatnya Capaian MDG's	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Kab. HSU	18%	165,000,000	165,000,000	-	-	-	-
44 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Terkendalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan suatu kawasan	Kecamatan Amuntai Utara	1 buku, album peta dan CD 30%	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
45 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTWV	peningkatan implementasi good governance	meningkatkan kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang terkendalnya pemanfaatan ruang di wilayah Perkotaan Amuntai	Kab. HSU	1 Raperda 20%	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
46 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		rumusan kebijakan penataan ruang terkendalnya Perda tentang RTWV Kab. HSU 2012-2032	Pusat, Provinsi, Kabupaten	5 rumusan kebijakan 40%	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
47 pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	SDW yang handal dan berkualitas	Pusat dan Provinsi	5 orang/kali 25%	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
48 Survey dan Pemetaan	Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	teridentifikasi kawasan terbangun dan tidak terbangun berdasarkan perseil meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang	Kab. HSU	1 buku, album peta dan CD 100%	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
13 Program Pemantaan Ruang	Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan									
49 Monitoring evaluasi dan pelaporan penerintahan tata ruang	Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Rumusan hasil identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang di Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. HSU	4 rumusan kebijakan 100%	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
14 Program kerjasama Pembangunan	Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Terpecahkannya permasalahan pemanfaatan ruang secara cepat dan tepat		100%						
50 Koordinasi kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Rumusan kebijakan kerjasama pembangunan pada 12 kabupaten dan 3 provinsi di Kalimantan	Kab. HSU	1 rumusan kebijakan 100%	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya pembangunan yang berwawasan Lingkungan	tersusunya dokumen perencanaan dan pengembangan RTH terdistribusinya luasan RTH Perkotaan terbaru		1 buku, album peta dan CD	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-
51	Penyusunan Program Pengembangan RTH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terciptanya pembangunan yang berwawasan Lingkungan	perencanaan dan pengembangan RTH	Pekotaan Amuntai	100%	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan Peningkatan serta Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	meningkatnya pemanfaatan data dan kemudahan mendapatkan informasi bagi masyarakat	Kab. HSU	1 jaringan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-
52	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	meningkatnya pemanfaatan data dan kemudahan mendapatkan informasi bagi masyarakat	Kab. HSU	1 jaringan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
17	Program Pengembangan sistem informasi/database jalan dan jembatan	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	Kab. HSU	1 dokumen	100%	25,000,000	25,000,000	-	-	-
53	Upating Database Jalan dan Jembatan berbasis Spasial	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Database jalan dan jembatan berbasis spasial	Kab. HSU	1 dokumen	100%	25,000,000	25,000,000	-	-	-
18	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Percepatan pembangunan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan/santiasi	Pengarusutamaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.	Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan kota	Kab. HSU	3 rumusan kebijakan	100%	90,000,000	90,000,000	-	-	-
54	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Percepatan pembangunan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan/santiasi	Pengarusutamaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.	Tertaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kab. HSU	3 rumusan kebijakan	100%	90,000,000	90,000,000	-	-	-
19	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Percepatan pembangunan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan/santiasi	Tersedianya operasional program sanitasi kabupaten	Kualitas Lingkungan Permukiman	Kab. HSU	25%	100%	190,000,000	190,000,000	-	-	-
55	Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Percepatan pembangunan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan/santiasi	Tersedianya operasional dan strategi sanitasi kabupaten	Tertaksananya percepatan penggunaan sanitasi permukiman	Kab. HSU	25%	100%	190,000,000	190,000,000	-	-	-
20	Program Pengembangan Permukiman	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Rumah Layak Huni	Kab. HSU	1 rumusan kebijakan	100%	30,000,000	30,000,000	-	-	-
56	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Permukiman	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Tertaksananya koordinasi pengembangan Permukiman	Kab. HSU	1 rumusan kebijakan	100%	30,000,000	30,000,000	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Kualitas lingkungan perumahan								
57	Inventarisasi Lingkungan Perumahan (Berbasis Spasial)	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Dokumen inventarisasi lingkungan perumahan	Kab. HSU	1 dokumen / 100%	200,000,000	200,000,000				
22	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Kecil, Mengingat dan Besar	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur								
58	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Meningkatnya perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur	Kab. HSU	4 rumusan kebijakan	50,000,000	50,000,000				
59	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Dokumen Monev Infrastruktur	Kab. HSU	1 dokumen	10,000,000	10,000,000				
22	59 JUMLAH ANGGARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						7,137,935,000	7,137,935,000				
INSPEKTORAT												
1	Program Belayan Administrasi, Perkantoran											
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Jangka waktu layanan administrasi								
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaksananya pengelolaan administrasi keuangan	Amuntai	100%	37,000,000	37,000,000				
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Amuntai	90%	225,000,000	225,000,000				
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya buku peraturan dan perundang-undangan	Amuntai	40%	4,500,000	4,500,000				
5	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya konsumsi tamu, rapat dan untuk kegiatan lainnya	Amuntai	60%	28,500,000	28,500,000				
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah	85%	290,000,000	290,000,000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Amuntai	-	28,000,000	28,000,000				
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	Amuntai	65%	75,000,000	75,000,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Pemeliharaan rutin/berkala peraturan gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaskannya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Amuntai	-	35.000,000	35.000,000	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			Meningkatnya kapasitas SOM Inspektoral								
10	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	AmU/luar Daerah	60%	30.000,000	30.000,000	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah								
11	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kikitstr realisasi kinerja SKPD	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya laporan kinerja	Amuntai	80%	19.500,000	19.500,000	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan			Kualitas capaian kinerja pemerintahan								
12	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Pemeriksaan reguler dan tujuan tertentu	HSU	75%	1.900.000,000	1.900.000,000	-	-	-	-
13	Penggunaan kasus pengaduan internal secara berkala di lingkungan Pemerintah Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Ditindaklanjuti pengaduan dugaan penyimpangan	HSU	85%	325.000,000	325.000,000	-	-	-	-
14	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaskannya pengelolan LPZP dan tindak lanjut hasil pengendalian laporan SKPD	Amuntai	60%	210.000,000	210.000,000	-	-	-	-
15	Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaskannya pemutakhiran data TLHP APJP dan BPK	Amuntai	80%	215.000,000	215.000,000	-	-	-	-
16	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaskannya monitoring TLHP	HSU	75%	560.000,000	560.000,000	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriks			Kualitas hasil pemeriksaan dan pengawasan kinerja serta evaluasi kinerja yang akuntabel								
17	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Diklat sesuai kebutuhan pengawasan	Amuntai &	65%	589,040,000	589,040,000	-	-	-	-
7	Program Benahan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			Implementasi PKPT dan SOP dalam pengawasan		80%						
18	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tertaskannya pengembangan pengawasan	Amuntai	80%	75.000,000	75.000,000	-	-	-	-
7	18 JUMLAH ANGGARAN INSPEKTORAT						4.752.333,000	4.752.333,000	-	-	-	-
DINAS KESEHATAN												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kab. HSU	Dinkes, 13 PKM, UPOPPK dan jaringannya	182,500,000	182,500,000				
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Dinkes HSU	100%	2,082,797,000	2,082,797,000				
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Lancarnya kebersihan kantor	Dinkes HSU	100%	9,120,000	9,120,000				
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor (seksi Umum dan perlengkapan)		Kebutuhan ATK dalam 1 tahun	Kab. HSU	100%	81,500,000	81,500,000				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (seksi keuangan)		Kebutuhan ATK dalam 1 tahun		100%	16,546,000	16,546,000				
5	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan (seksi umum dan perlengkapan)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 Tahun	Kab. HSU	100%	145,000,000	145,000,000				
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan (seksi keuangan & kepegawaian)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 Tahun		100%	6,300,000	6,300,000				
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (seksi umum dan perlengkapan)		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan yang Disekalikan dalam 1 Tahun	Kab. HSU	100%	250,000,000	250,000,000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (seksi yandastu)		Penyediaan peralatan untuk Sistem Informasi Puskesmas (Simpus)		4 PKM	130,000,000	130,000,000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (seksi keuangan)		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan yang Disekalikan dalam 1 Tahun		100%	16,000,000	16,000,000				
7	Penyediaan makanan dan minuman (seksi umum dan perlengkapan)		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dalam 1 Tahun	Kab. HSU	100%	52,100,000	52,100,000				
	Penyediaan makanan dan minuman (seksi keuangan)		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dalam 1 Tahun	Kab. HSU	100%	7,410,000	7,410,000				
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kab. HSU	100%						
	Seksi Umum & perlengkapan					150,000,000	150,000,000				
	Seksi Keuangan dan Kepegawaian					84,780,000	84,780,000				
	Seksi Sub. Program					35,000,000	35,000,000				
	Seksi Promkes					30,000,000	30,000,000				
	Seksi JKPM dan PSM					35,000,000	35,000,000				
	Seksi Sarkes dan Nakes					35,000,000	35,000,000				
	Seksi Kesga					50,000,000	50,000,000				
	Seksi Yandastu					30,000,000	30,000,000				
	Seksi gizi					35,000,000	35,000,000				
	Seksi P2					35,000,000	35,000,000				
	Seksi PL					35,000,000	35,000,000				
	Seksi Farmasi dan Akes					30,000,000	30,000,000				
	Seksi Mak. Min					30,000,000	30,000,000				
	Seksi Pengembangan					30,000,000	30,000,000				
9	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada UPT (seksi umum & perlengkapan)		Jumlah pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perkantoran pada UPT dan jaringannya	Dinkes	100%	18,780,000	18,780,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada UPT (seksi keuangan & kepegawaian)			Jumlah pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perkantoran pada UPT dan jaringannya	Dinkes	100%	104.388.000	104.388.000				
2 Prog. Peningk. Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai									
10 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Meminimalisir kerusakan Gedung Kantor	Kab. HSU	100%	115.000,000	115.000,000				
11 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional (seksi umum & perlelgkapan)			Kendaraan Dinas/ operasional nyaman digunakan dan terawat	Kab. HSU	100%	113.900,000	113.900,000				
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional (seksi Promkes)			Kendaraan Dinas/ operasional nyaman digunakan dan terawat	Kab. HSU	100%	27.500,000	27.500,000				
12 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas			Jumlah Rumah yang Direhab Sedang/Berat	Kab. HSU	9 unit	986.898,000	986.898,000				
13 Rehabilitasi Sedang/ Berat gedung kantor			Jumlah Gedung Kantor yang Direhab Sedang/Berat	Kab. HSU	5 unit	476.162,500	476.162,500				
3 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
14 Pendidikan dan pelatihan Formal\			Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinkes	100%	67.600,000	67.600,000				
15 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	100%	7.238,500	7.238,500				
16 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jafungskes			Jumlah Orang yang Ditetapkan daftar usul penetapan angka kredit menjadi penetapan angka kredit	Dinkes	100%	92.834,000	92.834,000				
17 Kegiatan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Angka Kredit	Dinkes	100%	30.000,000	30.000,000				
18 Bimbingan teknis/orientasi petugas CPNS/PTT			Petugas CPNS/PTT memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Kab. HSU	100 orang	42.511,000	42.511,000				
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel									
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dinkes HSU	7 dokumen	7.712,250	7.712,250				
- Penyusunan laporan tahunan, Lajip, Tapkin, LRPJ, RKA/DPA			Jumlah Peserta Pembahasan Rancangan RKA/DPA Perubahan	Dinkes HSU	21 orang						
- Pertemuan Pembahasan rancangan RKA/DPA perubahan			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Dinkes	100%	8.397,750	8.397,750				
20 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran dan laporan bulanan	Dinkes	100%	8.599.500	8.599.500				
22 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah Laporan keuangan tahunan yang dapat diselesaikan	Dinkes	100%	8.498.000	8.498.000				
5 Program Obat dan Perbekalan	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saling	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan									
23 Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan			Jumlah Obat yang dilakukan Pengadaan	Kab. HSU	100%	300.000,000	300.000,000				
			- Jumlah Obat Non Merkes								
			- Jumlah Obat Non Generik								
			- Jumlah Bahan Laboratorium								
			- Jumlah Kertas Puyer + Plastik Obat								
24 Peningkatan Pemeraaan Obat & Perbekalan Kesehatan			Operasional UPQPPK dapat berjalan dengan baik dan jumlah obat yang didistribusikan	Kab. HSU	100%	117.330,000	117.330,000				
			- Operasional UPQPPK								
			- Distribusi, Monitoring, Stok Opname, Pengapakan								
			- Operasional Pemusnahan Obat								
25 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat & Perbekalan Kesehatan			Jumlah peserta Sosialisasi Informasi Obat dan Obat Rasional	Kab. HSU	100%	30.000,000	30.000,000				
			- Jumlah Peserta Sosialisasi Informasi Obat Rasional (10 Kec)								
			- Jumlah Siswa yang mendapat Penjualan Obat Rasional (13 Pusk)								
26 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			Jumlah Peserta Pertemuan dan Moniv. Keternasian di Pusk.	Kab. HSU	100%	10.000,000	10.000,000				
			- Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan Perencanaan Obat								
			- Jumlah Pelaksanaan Monev/ Pengelola Obat Puskesmas								
6 Program pengembangan data/ informasi	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pematiran Informasi Teknologi (IT)									
27 Pengumpulan, updating dan analisa data, informasi capaian target kinerja program dan kegiatan			Jumlah dokumen analisa data	Kab. HSU	1 dokumen	8.541,750	8.541,750				
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saling	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan									
28 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Pusk dan Jaringannya			Jumlah Sosialisasi Jamkesmas, Jamperal dan Sosialisasi JPKM/KSA.	Kab.HSU	100%	77.670,000	77.670,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		Jumlah pelaksanaan kegiatan perlongoran pertama pada kecelakaan, adanya posko, pelatihan P3K dan Pengadaan Obat P3K.			31,400,000	31,400,000				
			Jumlah P3K		20 kali						
			Jumlah Posko		3 kali						
			Jumlah Pelatihan P3K		2 kali						
			Jumlah Pengadaan Obat P3K		20 paket						
30	Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah		Terselenggaranya Pertemuan P2M1 dan P2B2, terlaksananya kontak survei kusta, penemuan pengobatan dan pengawasan Diare	Kab. HSU	80%	76,600,000	76,600,000				
31	Pengadaan Peralatan & Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik esensial		Jumlah kebutuhan alat kesehatan Puskesmas & Jaringannya	Kab. HSU	90%	475,500,000	475,500,000				
32	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (seksi pengembangan)		Jumlah Pembinaan dan pelatihan sebagai berikut :	Kab. HSU	90%	137,686,000	137,686,000				
			Jlh Peningkatan Sekolah Sehat		4 sek.						
			Jlh Sekolah yg Diberikan Penghargaan		4 sek.						
			Jlh Pertemuan Program Pengembangan		7 kali						
			Jlh Sosialisasi Lintas Sektor tgg UKS		1 kali						
			Pembinaan Program Pengembangan		1 paket						
33	Peningkatan kesehatan masyarakat (seksi yandaru)		Terlaksana kegiatan penilaian kinerja puskesmas	Kabupaten HSU	13 Puskesmas	90,845,000	90,845,000				
			- Prosentase Puskesmas dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)	13 Puskesmas	100%						
			- Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan / pelatihan pengelola SP2TP	13 Puskesmas	100%						
34	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan		terlaksananya kegiatan operasional puskesmas	13 Puskesmas	100%	119,700,000	119,700,000				
35	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		Prosentasi masyarakat dengan akses jamban keluarga dan jumlah masyarakat yang terjicru.	Kab. HSU	75%	120,000,000	120,000,000				
			Prosentasi kualitas air minum yang memenuhi persyaratan.	Sarana DAM, SAB dan PDAM	100%	40,000,000	40,000,000				
			Prosentasi Sarana Sanitasi Yang di S Tersedianya sarana penunjang penyehtan lingkungan	Sarana Kesling Dinkes dan Puskesmas.	80%	68,000,000	68,000,000				
					100%	50,000,000	50,000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (seksi JPKM)			Jumlah Movev, Evaluasi dan Pelaporan yang dilakukan berkenaan dengan Jamkesmas, Jamperasal, JPKM/KSA	Kab.HSU	100%	57,163,000	57,163,000			
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (seksi pengembangan)		terlaksananya seminar dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN)	Kab.HSU	1 kali	32,500,000	32,500,000				
37	Peningkatan Pelayanan dan peningkatan Masalah Kes (seksi keuangan dan kepegawaian)		Jumlah Dokter dan bidan PTT yang diberikan tunjangan	Kab.HSU	100%	949,684,950	949,684,950				
	Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Masalah Kes (seksi pengembangan)			Kab. HSU	100%	23,250,000	23,250,000				
	- Pemeriksaan mata dan bibir sumbing dll		Jln pemeriksaan mata dan bibir sumbing		1 paket						
	- Pelatihan PMR		Jln peserta pelatihan PMR		30 org						
38	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja		Prosentasi Pembinaan Kesehatan Reproduksi	Kab. HSU	20%	45,000,000	45,000,000				
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah								
39	Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan		Terpeenuhnya diklat teknis fungsional & kepenimp. bagi aparatur kesehatan	Dinkes	100%	680,000,000	680,000,000				
			Jumlah peserta pelatihan Kusta		7 orang						
			Jumlah yang dilatih BTLS		10 orang						
9	Program pengawasan obat dan makanan	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya sang	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan								
40	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan		terlaksananya sosialisasi Napza dan jajanan makanan dan rapat koordinasi lintas sektor	Kab. HSU	100%	84,830,000	84,830,000				
	- sosialisasi Napza dan jajanan makanan serta bahan pengawet dan pewarna makanan										
	- Rapat koordinasi lintas sektor										
41	Peningkatan pengawasan obat dan makanan										
	- Pembinaan apotek		Jumlah pembinaan Apotek		9 buah	38,030,750	38,030,750				
	- pertemuan/sosialisasi apotek		Jumlah peserta sosialisasi Apotek		18 org						
	- pertemuan/sosialisasi toko obat		Jumlah peserta pertemuan / sosialisasi toko obat		84 org						
	- pembinaan toko obat		Jumlah toko obat yang dibina		42 buah						
	- pertemuan/sosialisasi IRT		Jumlah peserta sosialisasi IRT		310 org						
	- Pembinaan IRT		Jumlah IRT yang dibina		200 buah						
	- pemeriksaan dan pengambilan sampel obat dan makanan		Jumlah pemeriksaan sampel obat								

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan									
42	Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat dan Bahan Alam Indonesia - Pertemuan & Movev Pengelola Jamu Gendong - Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional (10 Kec + 1 Kab)			Peningkatan Penggunaan Obat Asli Indonesia yang memenuhi syarat - Jumlah Pertemuan & Movev Pengelola Jamu Gendong - Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional (10 Kec + 1 Kab)	Kab. HSU	70%	35,000,000	35,000,000				
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan									
43	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat			Peningkatan media informasi kesehatan yang dikembangkan	Kab. HSU	100%	82,500,000	82,500,000				
44	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (seksi Promosi kes.)			Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hidup sehat	Kab. HSU	100%	295,100,000	295,100,000				
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat(seksi JKMM-PSM)			Jumlah pelaksanaan kegiatan Desa Siaga, Poskestren, Posyandu dan SBH menjadi lebih aktif	Kab.HSU	100%	132,461,000	132,461,000				
45	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Keselatan			Petugas promosi keselatan yang mendapat pelatihan/pendidikan	Kab. HSU	100%	18,500,000	18,500,000				
46	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (seksi Promosi Kes.)			Terlaksananya Pertemuan Movev Promkes , Pelatihan kader, Survei dan evaluasi PHBS	Kab. HSU	100%	35,800,000	35,800,000				
12	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
47	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan			Jumlah aparatatur perencanaan yang mengikuti pelatihan / diklat teknis perencanaan.	Kab. HSU	2 orang	18,894,750	18,894,750				
	- pelatihan Perencanaan tk. PKM			- Jumlah peserta PKM dan Dinkes	Kab. HSU	50 org	20,000,000	20,000,000				
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan									
48	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi			Jumlah desa yang dilakuka survelans gizi	219 desa	100%	29,444,500	29,444,500				
49	Peningkatan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Zat mikro lainnya, terdiri dari kegiatan :						138,432,500	138,432,500				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Operasional Panti Pemulihan Gizi Puskesmas Perawatan Alabio			Jumlah Kasus Gizi Buruk mendapatkan Perawatan	Puskesmas Alabio Kec. Sungai Pandan	100 % kasus gizi buruk mendapatkan perawatan						
- Penyuluhan Anemia dan Survei Anemia pada pelajar			Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan tentang anemia	desa	52 desa						
- Pemantauan Garam beryodium tingkat rumah tangga			Jumlah desa yang dipantau penggunaan garam beryodium	desa	80 % balita 6 - 59 bin yang mendapatkan kapsul vitamin A						
- Pendistribusian Vitamin A			Jumlah sasaran Balita 6 - 59 bin yang mendapatkan kapsul vitamin A	desa	30 paket						
- Penyediaan PMT Balita gizi kurang/buruk rawat jalan			Jumlah PMT untuk balita gizi kurang/Buruk.	Puskesmas	1 kali						
- Pertemuan Koordinasi Program gizi lintas sektoral dan program			Jumlah pelaksanaan Koordinasi Program gizi	Dinas Kesehatan Puskesmas	100 % kasus gizi buruk mendapatkan perawatan						
- Rujukan Kasus balita gizi buruk ke RS			Jumlah kasus Gizi Buruk mendapatkan Perawatan	Puskesmas	26 Tenaga Pelaksana Gizi						
50 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi			Jumlah peserta konseling menyusui	Dinas Kesehatan Puskesmas	Cakupan ASI Eksklusif 75 %	155,098,500	155,098,500				
- Pelatihan konseling mp asi			Jumlah Puskesmas yang dilakukan Sosialisasi Cakupan ASI eksklusif	13 Puskesmas	65 desa						
- Sosialisasi ASI eksklusif /Kadarzi			Jumlah desa yang diberikan penyuluhan sadar gizi	13 Puskesmas	5000 lbr						
- Penyuluhan keluarga Sadar Gizi tingkat Puskesmas			Jumlah Cetak leaflet gizi	Dinas Kesehatan							
- Cetak leaflet gizi			Jumlah desa UPGK yang dinilai								
- Pelatihan desa UPGK											
51 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan											
Pembinaan Kader Posyandu oleh Puskesmas			Jumlah desa yang dilakukan pembinaan kader posyandu oleh Puskesmas	219 Desa	219 Desa	334,472,500	334,472,500				
Operasi Timbang Balita			Cakupan pemantauan pertumbuhan balita (D/S) dan Surveilans gizi aktif masyarakat	219 Desa	26 kali/tahun						
Pembinaan Desa Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)			Jumlah desa yang ditina untuk Perbaikan gizi keluarga	desa	26 desa						
Pertemuan dan Monev Surveilans Gizi Kabupaten			Jumlah pelaksanaan Surveilans gizi	Dinas Kesehatan Puskesmas	2 kali/tahun						
Pertemuan dan Monev Surveilans Gizi Puskesmas			Jumlah Puskesmas yang melakukan Surveilans gizi	13 Puskesmas							
Monitoring Pemantauan kasus gizi kurang/buruk oleh Tim Surveilans Gizi Puskesmas			Jumlah Puskesmas yang melakukan Pemantauan kasus gizi buruk.	Puskesmas	13 Puskesmas						
Pertemuan rencana dan monev program gizi			Jumlah pertemuan rencana dan moniv program gizi	Dinas Kesehatan	2 kali/tahun						

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bimbingan teknis Program gizi Puskesmas			Jumlah puskesmas yang dilakukan bimtek program gizi	Puskesmas	13 Puskesmas						
14	Program Pengembangan Pengembangan Lingkungan Sehat	Percepatan pembangunan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan/santiasi	Tersedianya operasional dan strategi santiasi kabupaten									
52	Pengujian pengembangan lingkungan Sehat			Diketahui faktor-faktor lingkungan yang berisiko terhadap penyakit, pendamping program PPS	Kab. HSU	80%	100,000,000	100,000,000				
53	Penyuluhan menciptakan lingkungan Sehat			Peningkatan Program Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	3 kali	30,000,000	30,000,000				
				- Terlaksananya Pertemuan Petugas Kesling								
				- Pelatihan Inspeksi Sanitasi	Dinas Kesehatan	1 kali	20,000,000	20,000,000				
				-Kursus Hygiene Sanitasi DAMIU	Dinas Kesehatan	1 kali	15,000,000	15,000,000				
				- Pelatihan Pembuatan lamban Sehat	Dinas Kesehatan	3 kali	30,000,000	30,000,000				
15	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan									
54	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk			tercapainya pencegahan dan penanggulangan DBD dan malaria	Kab. HSU	90%	520,000,000	520,000,000				
55	Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan Anak sekolah			Jumlah siswa SD kelas 1,2,3 /sederajat yang mendapat imunisasi Campak, Difteri dan Tetanus	Kab.HSU	97%	66,160,500	66,160,500				
56	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Jumlah peserta sosialisasi Program TB, HIV/AIDS, Diare, Kusta, ISPA, Pelatihan PMO, Pemberian makanan tambahan untuk penderita TB dan Kusta, Terlaksananya Serosurvei HIV, Peringatan TB Day	Kab. HSU	90%	369,000,000	369,000,000				
57	Peningkatan Imunisasi			Jumlah bayi yang di imun	Kab.HSU	90%	147,976,500	147,976,500				
58	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah			Jumlah Desa UCI	Kab.HSU	100%						
				Lancarnya Deteksi Dini PTM (jumlah Posbindu)	Kab.HSU	10 bh	89,452,125	89,452,125				
				Lancarnya Pengamatan Penyakit Menular	Kab.HSU	40 ks						
59	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			Peningkatan Bimbingan Teknis Program Pemberantasan Penyakit	Kab. HSU	90%	33,000,000	33,000,000				
16	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
60	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			- Jumlah peserta Pertemuan evaluasi kegiatan tahun 2012	Kab. HSU	100%	9,305,100	9,305,100				
	- Pertemuan evaluasi kegiatan tahun 2013				Kab. HSU	60 orang						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Pertemuan perencanaan kesehatan tahun 2015			- Jumlah peserta Pertemuan perencanaan kesehatan tahun 2014	Kab. HSU	62 orang						
- pelatihan Perencanaan tk. PKM			- Jumlah peserta PKM	Kab. HSU	80%	52,245,000	52,245,000				
61 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan			Diperolehnya Data & Informasi Tenaga Kesehatan	Kab. HSU	100%	18,175,500	18,175,500				
62 Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Jumlah Dokumen DHA yang dihasilkan	-	-						
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan di Puskesmas	-	-						
63 Peningkatan kualitas dan akreditasi RS/Puskesmas			Prosentase institusi yang diaudit ISO Puskesmas	Kab. HSU	1 PKM	327,729,000	327,729,000				
			Prosentase institusi yang diaudit survailans ISO Puskesmas		2 PKM						
64 Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten			Jumlah peserta rakerkeskab HSU	Kab. HSU	100 orang	36,814,129	36,814,129				
65 Penyusunan Profil kesehatan			Jumlah Dokumen Profil kesehatan yang dapat diselesaikan	Kab. HSU	100%	13,847,400	13,847,400				
17 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gratis	Kab. HSU	90%	197,128,200	197,128,200				
66 Pelayanan sunatan massal dan operasi katarak			Jlh kegiatan sunatan massal		10 kali						
- sunatan massal			Jlh peserta pengobatan massal		1000 org						
- Operasi katarak			Jlh peserta operasi katarak		30 org						
67 Peninggulangan ISPA			Jumlah pelaksanaan Care Seeking Pneumonia, dan Jumlah masker untuk penanggulangan ISPA	Kab. HSU	90%	61,000,000	61,000,000				
68 Peninggulangan Penyakit Cacikan			Rapat koordinasi LS, POMP Filtrasi, Sosialisasi POMP Filtrasi, Pertemuan kader, Distribusi obat, Pengawasan Flek Sampung	Kab. HSU	90%	593,250,000	593,250,000				
69 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layuh			Lancarnya deteksi dini dan pelayanan kasus AFP	Kab. HSU	100%	4,599,000	4,599,000				
18 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perubahan Sarana dan Prasarana Pusk/Pustu dan Jaringannya	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana pendidikan dan kesehatan	Jumlah poskesdes yang dibangun beserta	Kab. HSU	10 unit	1,052,815,600	1,052,815,600				
70 Pembangunan Posyandu			Jumlah Pemeeliharaan Rutin / Berkala Sarana	Kab. HSU	90%	92,587,000	92,587,000				
71 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas			Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kesehatan Puskesmas pembantu	Kab. HSU	90%	56,677,500	56,677,500				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
73	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas (seksi sarkes)			Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Kesehatan Puskesmas	Kab. HSU	80%	687,850,900	687,850,900				
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas (seksi farmasi & alkes)			Peningkatan dan Pemeliharaan serta Kalibrasi Alat Kesehatan	Kab. HSU	90%	100,000,000	100,000,000				
74	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu			Jumlah Sarana dan Prasarana Pustu yang dilakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala	Kab. HSU	90%	71,500,000	71,500,000				
75	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Perairan			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusk. Perairan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala	Kab. HSU	90%	24,200,000	24,200,000				
76	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusk. Keliling yang dilakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala	Kab. HSU	90%	44,000,000	44,000,000				
77	Rehab sedang/berat puskesmas pembantu			Jumlah Pustu yang di rehab	Kab. HSU	2 unit	205,051,000	205,051,000				
19	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
78	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat			-Cakupan penyediaan jasa medis/jasa pelayanan kes rujukan	Kab. HSU	14815 jiwa	4,000,050,000	4,000,050,000				
20	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah peserta pelatihan kesehatan anak balita	Kab. HSU	70%	130,000,000	130,000,000				
79	Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita			Jumlah peserta IBI	Kab. HSU	100%	71,000,000	71,000,000				
80	Lomba Balita Sehat Indonesia											
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan	Kab. HSU	80%	40,000,000	40,000,000				
81	Pelayanan Pemeliharaan kesehatan											
22	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pangan	Kab. HSU	100 org	33,889,000	33,889,000				
82	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga - pelatihan sertifikasi pangan IRT											
23	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah peserta yang melahirkan dan anak	Kab. HSU	80%	75,410,100	75,410,100				
83	Pemulihan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu											

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
84	Identifikasi Penyebab Kematian Ibu dan Bayi (AMP)			Teridentifikasi penyebab kematian Ibu dan bayi	Kab. HSU	90%	70,000,000	70,000,000				
85	Pelatihan dukun kampung			Menurunya AKI dan AKB	Kab. HSU	20%	40,000,000	40,000,000				
24	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan									
86	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) (seksi Farmasi & alkes)			Jumlah alat kesehatan Puskesmas & Jaringannya dan kebutuhan Obat-obatan yang diperlukan	Kab. HSU	90%	1,230,000,000	1,230,000,000				
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Pendamping DAK) (seksi Farmasi & alkes)			Jumlah alat kesehatan Puskesmas & Jaringannya dan kebutuhan Obat-obatan yang diadakan	Kab. HSU	90%	123,000,000	123,000,000				
	- Pengadaan Obat-Obatan			-Jumlah Obat-Obatan yang diadakan								
	- Rehab UPOPPK			- Pemeliharaan Gedung UPOPPK								
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) (seksi sarkes)			Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat	Kab. HSU	90%	2,134,545,455	2,134,545,455				
	(Pendamping DAK) (seksi sarkes)			Jumlah dokter yang dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi Dokter	Kab. HSU	90%	751,974,770	751,974,770				
87	Pembinaan Tenaga Medis			Jumlah paramedis yang dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi Paramedis	Kabupaten HSU	13 Dokter Puskesmas	22,175,000	22,175,000				
88	Pembinaan Tenaga Keperawatan			Jumlah paramedis yang dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi Paramedis	Kabupaten HSU	13 Paramedis Puskesmas	24,687,500	24,687,500				
89	Pembinaan Petugas Gizi			Jumlah peserta pertemuan pembinaan gizi	Kab. HSU		19,515,000	19,515,000				
	- Pertemuan Pembinaan Petugas Gizi Puskesmas			Jumlah peserta penilaian kinerja petugas gizi	Kab. HSU	13 Tenaga Pelaksana Gizi PKM						
	- Penilaian Kinerja Petugas Gizi Puskesmas Tingkat Kabupaten			Meningkatnya kemampuan dan kompetensi Tenaga Kesehatan masyarakat	Kabupaten HSU	13 Tenaga Kes. PKM	24,687,500	24,687,500				
90	Pembinaan Tenaga Kesehatan Masyarakat			Meningkatnya kinerja bidan	Kab. HSU	80%	134,308,500	134,308,500				
91	Pembinaan Bidan			- Jumlah Buku KIA dan Buku pedoman yang dicetak								
24	91 JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN						24,729,114,979	21,364,569,524	3,364,545,455			
DINAS PENDIDIKAN												
Sekretariat												
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1 Thn	78,412,500	78,412,500	-			

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terperliharaanya operasional kendaraan dinas	Disdik	1 Thn	33.142,350	33.142,350	-	-	-	-
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya jasa administrasi keuangan, tenaga pengajar dan tenaga jasa lainnya	Disdik	1 Thn	346.914,674	346.914,674	-	-	-	-
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Disdik	1 Thn	18.450,000	18.450,000	-	-	-	-
5	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terhbit dan Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Disdik	1 Thn	67.113,886	67.113,886	-	-	-	-
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersusunnya Laporan Tahunan	Disdik	1 Thn	34.030,000	34.030,000	-	-	-	-
7	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya bahan makanan dan minuman	Disdik	1 Thn	94.084,750	94.084,750	-	-	-	-
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terikutnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disdik	1 Thn	531.703,375	531.703,375	-	-	-	-
9	Pembinaan, Pengawasan, Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada UPT*	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya pelaksanaan kegiatan UPT dan Pengawas	Disdik	1 Thn	523.621,250	523.621,250	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Mobil Dinas Untuk Peningkatan Operasional	Disdik	1 Bh	200.000,000	200.000,000	-	-	-	-
11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	tersedianya gedung yang layak dan nyaman sebagai penunjang kelancaran pekerjaan	Disdik	1 Thn	184.500,000	184.500,000	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
12	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terikutnya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Disdik	1 Thn	110.823,000	110.823,000	-	-	-	-
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan											
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Disdik	1 Thn	17.015,000	17.015,000	-	-	-	-
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan											
14	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Tersedianya layanan informasi online (website)	Disdik	1 domain	90.000,000	90.000,000	-	-	-	-
15	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya layanan informasi online (website)	Disdik	1 buletin	120.600,000	120.600,000	-	-	-	-
16	Pembinaan UKS	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya UKS unggulan	Disdik	12 Tk.Kab, 4 Tk.Prov dan 1 Tk.Nas	74.604,564	74.604,564	-	-	-	-
17	Pengembangan data dan informasi pendidikan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Tersedianya data pokok pendidikan	Disdik	12 bulan	85.000,000	85.000,000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Percegahan Anak Pulus Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar	Disdik	1%	218.375.000	218.375.000	-	-	-	-
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
19	Sosialisasi implementasi kurikulum	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi implementasi kurikulum disekolah	Disdik	400 Org	65.000.000	65.000.000	-	-	-	-
20	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya jumlah siswa berprestasi	Disdik	200 Org	293.478.000	293.478.000	-	-	-	-
	Bidang Bina Pendidikan SMP, SMA dan SMK (DIKEMEN)											
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SMA/SMK	1th	300.304.000	300.304.000	-	-	-	-
22	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Rutin SMA & SMK)	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	SMA/SMK	SMA/SMK	1th	30.750.000	30.750.000	-	-	-	-
23	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tertindakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DISDIK	1th	256.250.000	256.250.000	-	-	-	-
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
24	Penambahan Ruang kelas Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Bertambahnya Ruang kelas SMP	SMP	6 Sek	1.616.243.570	1.616.243.570	-	-	-	-
25	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Bertambahnya Ruang perpustakaan SMP	SMP	6 Sek	571.561.515	571.561.515	-	-	-	-
26	Rehabilitas Sedang/ Berat Bangunan Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya sarana ruang yang baik disekolah	SMP	6 Sek	1.570.567.125	1.570.567.125	-	-	-	-
27	Rehabilitas Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Rumah Dinas bagi guru dan kepek	DISDIK	2 Sek	479.499.280	479.499.280	-	-	-	-
28	Rehabilitas Sedang/ Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya lap. Upacara & Fasilitas Parkir	SMP	6 Sek	1.151.277.910	1.151.277.910	-	-	-	-
29	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Bertambahnya Wawasan Guru	DISDIK	250 org	167.248.260	167.248.260	-	-	-	-
30	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Bantuan Bagi Sekolah Standart Nasional	SD/SMP	1 Sek	102.600.000	102.600.000	-	-	-	-
31	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah Air Bersih	SMP	5 Sek	542.410.290	542.410.290	-	-	-	-
32	Pembinaan daya tahan sekolah menengah terhadap peredaran obat terlarang	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah sekolah yang dibina	SMP/SMA/S MK	30 SMP, 7 SMA dan 5 SMK	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	33	Pengembangan Sekolah Menengah Pinggiran (SMPN Bangang 1, SMPN 2 Danau Panggang)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Sekolah Pinggiran yang dikembangkan	SMP	2 Sek	300.000.000	300.000.000	-	-	-
	34	Pengadaan mebeur sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Jumlah sekolah yang mendapat meubeler	SMP	29 sek	225.000.000	225.000.000	-	-	-
	35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Berbasis Sekolah (MBS)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah sekolah yang menerapkan MBS (SLTP)	SMP	30 sek	764.780.400	764.780.400	-	-	-
	36	Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP	Peningkatan implementasi good governance	2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional	SMP/MTs	1 th	766.500.000	766.500.000	-	-	-
	9	Program Pendidikan Menengah										
	37	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Rumah Dinas Bagi Guru dan Kepek	1 Sek	237.159.900	237.159.900	-	-	-	-
	38	Pemeliharaan Rutin/berkala Bangunan Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terpeliharanya Bangunan Sekolah	12 Sek	81.156.600	81.156.600	-	-	-	-
	39	Pemeliharaan Rutin / berkala Alat Rumah Tangga Sekolah (Belanja rutin SMA & SMK)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terpeliharanya Alat Rumah Tangga Sekolah	SMA/SMK	12 Sek	147.333.600	147.333.600	-	-	-
	40	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	SMA/SMK	8 Sek	256.500.000	256.500.000	-	-	-
	41	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen Berbasis sekolah (MBS) (Belanja Rutin)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar dg lancar	SMA/SMK	12 Sek	1.015.863.120	1.015.863.120	-	-	-
	42	Pembinaan dan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya Kreativitas Siswa	SMA/SMK/MA	28 sek	148.503.240	148.503.240	-	-	-
	43	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Pasarana Pendidikan (DAK)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Sarana Pasarana SMA/SMK yg Memadai	12 Sek	6.570.032.040	6.570.032.040	-	-	-	-
	44	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Pasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Sarana Pasarana SMA/SMK yg Memadai	12 Sek	2.403.625.000	2.403.625.000	-	-	-	-
	45	Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTA	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya Ujian Nasional (UNI) SMA Sederajat	1th	610.063.293	610.063.293	-	-	-	-
	46	Pengembangan peralatan SMK	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Bertambahnya peralatan praktik siswa SMK	3 Sek	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-
	47	Penyediaan Beasiswa Bagi keluarga tidak mampu (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya beasiswa tidak mampu	SMA/SMK	1 th	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	48	Monitoring dan Evaluasi Pengawas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah SMA/LB/SMK yang dimonitor dan dievaluasi	SMA/SMK	13 Sek	205.000.000	205.000.000	-	-	-	-
	DIKDAS											
	10	Program Pelayanan Administrasi/Perkantoran										
	49	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdik	1 Tahun	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
	11	Program Pendidikan Anak Usia Dini										
	50	Pembangunan Gedung Sekolah	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terbangunnya gedung seko	Disdik	3 Sek	420.154.901	420.154.901	-	-	-	-
	51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Ruang kelas Baru TK Negeri Pembina di setiap Kecamatan	Disdik	2 Sek	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-
	52	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya mutu pembelajaran dalam PWB	Disdik	80 Orang	30.451.680	30.451.680	-	-	-	-
	53	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terselenggaranya lomba kreativitas siswa dan guru	Disdik	120 Orang	330.950.000	330.950.000	-	-	-	-
	12	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
	54	Pemambahan Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Bertambahnya ruang kelas baru		9 Sek	1.816.493.450	1.816.493.450	-	-	-	-
	55	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Bertambahnya ruang perpustakaan sekolah		5 Sek	571.561.515	571.561.515	-	-	-	-
	56	Rehabilitas Sedang/ Berat Bangunan Sekolah	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terhabilitasinya ruang belajar untuk SD		10 Sek	1.670.567.125	1.670.567.125	-	-	-	-
	57	Rehabilitas Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terhabilitasinya rumah dinas guru		6 Sek	479.499.280	479.499.280	-	-	-	-
	58	Rehabilitas Sedang/ Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya pembuatan pagar dan pengurutan tanah/pembuatan fortal		10 Sek	1.598.148.260	1.598.148.260	-	-	-	-
	59	Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya mutu/proses pembelajaran dalam PBM		275 Orang	79.561.170	79.561.170	-	-	-	-
	60	Pelatihan kompetensi Siswa Berprestasi	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Terlaksananya siswa mengikuti UASBN		4325 org	1.276.379.910	1.276.379.910	-	-	-	-
	61	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas		80 Org	38.399.076	38.399.076	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jelang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan motivasi kegiatan belajar mengajar		75 Sek	57.250.800	57.250.800	-	-	-	-
	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya alat peraga sekolah		38 Paket	123.335.460	123.335.460	-	-	-	-
	64 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dikdas)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Mengetahui tingkat kemampuan kreativitas anak		240 Orang	191.697.840	191.697.840	-	-	-	-
	65 Pemeliharaan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terselenggaranya sosialisasi berbagai kegiatan USASB dan DAK		6 Kali	192.745.181	192.745.181	-	-	-	-
	66 Penyediaan Beasiswa Transisi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan		798 Orang	361.328.985	361.328.985	-	-	-	-
	67 Pembangunan/pengadaan/peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Terbangunnya perustakaan sekolah dan terahabilitasi		40 Sek	10.391.881.824	10.391.881.824	-	-	-	-
	BIDANG GUTK											
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
	68 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Peningkatan mutu pendidik/guru	Disdik Kab. HSU	1500 org	173.914.000	173.914.000	-	-	-	-
	69 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Peningkatan mutu dan kompetensi pendidik/guru	Disdik Kab. HSU	1055 org	693.539.804	693.539.804	-	-	-	-
	70 Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Peningkatan SDM bagi guru	Disdik Kab. HSU	2511 org	287.721.000	287.721.000	-	-	-	-
	71 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Peningkatan kualifikasi dan mutu bagi guru	Disdik Kab. HSU	2397 org	1.405.887.000	1.405.887.000	-	-	-	-
	72 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Peningkatan kualifikasi dan mutu bagi guru	Disdik Kab. HSU	119 org	605.250.000	605.250.000	-	-	-	-
	73 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Bahan dan evaluasi kinerja kepala sekolah	Disdik Kab. HSU	228 org	187.510.000	187.510.000	-	-	-	-
	74 Mutasi dan Promosi Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Penyegaran dan pengisian jabatan kepala sekolah yang penuh dan kosong	Disdik Kab. HSU	190 org	39.322.000	39.322.000	-	-	-	-
	75 Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Ketersediaan data pendidik/guru	Disdik Kab. HSU	2786 org	42.027.000	42.027.000	-	-	-	-
	76 Sosialisasi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Tersosialisasinya pembekalan kompetensi guru	Disdik Kab. HSU	2360 org	141.240.500	141.240.500	-	-	-	-
	77 Penyusunan Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Sertifikasi Guru	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Tersusunnya Laporan Jumlah guru yang mendapatkan Aneka tunjangan guru	Disdik Kab. HSU	1590 org	43.751.400	43.751.400	-	-	-	-
	78 Penilaian Kinerja (PK) Guru dan Pengawas berbasis IT	Peningkatan Kinerja Sekolah	401	743636750		401 org	743.636.750	743.636.750	-	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	79 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan administrasi kantor	Disdik Kab. HSU	1.500	117.837.000	117.837.000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
80	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan sinkronisasi kegiatan Bidang Guruk dengan instansi terkait	Disdik Kab HSU	1,055	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
81	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung dan Kantor	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Disdik Kab. HSU	2,511	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
82	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					1 buah	17,780,000	17,780,000	-	-	-	-
	BIDANG DIKMAS											
16	Program Pelayanan Administrasi Perkheteran											
83	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya Perengkapan Kantor	Dikmas	1th	11,768,948	11,768,948	-	-	-	-
84	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya cetakan & penggandaan Bidang Dikmas	Dikmas	1th	9,020,000	9,020,000	-	-	-	-
85	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya makan dan minum dim kegiatan bidang Dikmas	Dikmas	1th	24,600,000	24,600,000	-	-	-	-
86	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dikmas	1th	153,750,000	153,750,000	-	-	-	-
17	Program Pendidikan Anak Usia Dini											
87	Pembangunan Gedung Sekolah			Jumlah Gedung Sekolah		2	193,698,027	193,698,027	-	-	-	-
88	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan		145 Org	30,451,680	30,451,680	-	-	-	-
89	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Kelompok PAUD	Dikmas	130 Klp	1,321,200,000	1,321,200,000	-	-	-	-
18	Program Wajar Dikdas 9 Tahun											
90	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Kelompok Paket A Dikmas		5 klp	113,241,950	96,981,950	-	-	16,260,000	-
91	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Kelompok Paket B Dikmas		27 Klp	1,363,179,930	955,719,930	-	-	58,460,000	349,000,000
19	Program Pendidikan Menengah											
92	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Kelompok Paket C Dikmas		34 Klp	1,773,618,760	1,471,238,760	-	-	252,380,000	50,000,000
20	Program Pendidikan Non Formal											
93	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah peserta sosialisasi	Dikmas	150 Org	205,000,000	205,000,000	-	-	-	-
94	Pengembangan Pendidikan keaksaraan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jlh Warga Belajar Keaksaraan Fungsional	Dikmas	120 Org	887,211,500	377,311,500	-	-	117,500,000	392,400,000
95	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan	Dikmas	220 Org	108,786,780	108,786,780	-	-	-	-
21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
96	Peningkatan lifestill masyarakat melalui optimalisasi SKB	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya sang	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya layanan SKB	Dikimas	1 Thn	539,214,546	539,214,546	-	-	-
21	96	JUMLAH ANGGARAN DIMAS PENDIDIKAN					59,131,662,523	57,895,662,523	-	444,600,000	791,400,000
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA											
URUSAN WAJIB											
Bidang Pariwisata											
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.	Pengembangan Pariwisata dan pelestarian seni budaya	Jumlah kunjungan Wisata							
1	Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri		Meningkatkan promosi wisata nusantara melalui kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	Meningkatkan promosi wisata nusantara melalui kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	15%	175,000,000	175,000,000	-	-	-	-
2	Industri Pariwisata		Meningkatkan pariwisata melalui produk lokal	Meningkatkan pariwisata melalui produk lokal	15%	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-
2	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah pengusaha/LSM yang berpartisipasi	6 keag						
3	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wisata daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan wisata daerah		55,085,000	55,085,000	-	-	-	-
3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Daerah.	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Tingkat partisipasi LSM/perusahaan	2 Unit						
4	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta		Terjalinya kerjasama dengan pihak ketiga/masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan	Terjalinya kerjasama dengan pihak ketiga/masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan	2 Unit	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-
Urusan Pilihan											
Pemuda dan Olahraga											
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebutuhan Pemuda	Bidang Sosial Budaya	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Jumlah kegiatan Keperumudaan							
5	Peningkatan keamanan dan ketahanan pemuda		Terdipitnya pemuda yang bermoral sesuai kaidah agama	Terdipitnya pemuda yang bermoral sesuai kaidah agama	50 org	40,800,000	40,800,000	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah Organisasi Keperumudaan							
6	Pembinaan organisasi kepemudaan		Berperannya pemuda dalam pembangunan dan tersedianya pemuda pengibar bendera merah putih	Berperannya pemuda dalam pembangunan dan tersedianya pemuda pengibar bendera merah putih	80 org	284,090,500	284,090,500	-	-	-	-
7	Pendidikan dan pola tihan Dasar Kepemimn pihan bagi pemuda		terciptanya pemuda yang memiliki ketamplilan dasar kepemimpinan.	terciptanya pemuda yang memiliki ketamplilan dasar kepemimpinan.	50 org	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-
8	Fasilitasi aksi Dakti sosial kepemudaan		Menciptakan soliditas kegotongroyongan yang tinggi bagi pemuda/pedulil lingkungan	Menciptakan soliditas kegotongroyongan yang tinggi bagi pemuda/pedulil lingkungan	5 okp	35,874,000	35,874,000	-	-	-	-
9	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda		Meningkatkan kesadaran pemuda akan bahaya narkoba	Meningkatkan kesadaran pemuda akan bahaya narkoba	30 org	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan			Berperannya pemuda dalam pembangunan dan tersedianya pemuda pengibar bendera merah putih		50kp	250,000,000	250,000,000	-	-	-	-
11	Lomba Kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda			Terciptanya pemuda dan kreatif dan inovatif		6 org	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
6	Program Peningkatan upaya pemurnihan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah kegiatan Kepemudaan		50 org	23,460,000	23,460,000	-	-	-	-
12	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			Meningkatkan pemuda yang mandiri kreatif dan tampil								
7	Program Upaya Pence gahan penyalahgunaan narkoba	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah kader pemuda yang sadar akan bahaya narkoba		0	-	-	-	-	-	-
13	Pemberian Penyuluhan Pence gahan tentang bahaya Penggunaan Narkoba bagi pemuda			Meningkatkan kesadaran pemuda akan bahaya narkoba								
8	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga		6 cabor	100,000,000	100,000,000				
9	Program Pembinaan dan pemsayarakatan olahraga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah atlet Deprestasi yang mendapat penghargaan		30 cabor	282,000,000	282,000,000				
14	Pembibitan dan pembinaan olahraga-gawan berbakat			Mengajangi dan mengirim atlet pelajar Deprestasi ke jenjang yang lebih tinggi								
15	Pembinaan Cabang Olah raga prestasi di Tingkat Daerah			Terpenuhi dan tersalur nya bakat & prestasi atlet daerah ke luar daerah		15 cabor	174,984,000	174,984,000	-	-	-	-
16	Penyelenggaraan kompetisi olahraga			Meningkatkan prestasi dan minat atlet melalui kompetisi berbagai cabor		15 cabor	550,000,000	550,000,000	-	-	-	-
17	Pemberian Penghargaan bagi insn yang berdedikasi dan berprestasi			Meningkatkan semangat para atlet dalam meraih prestasi		100 org	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
18	Peningkatan Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga			Meningkatkan minat para atlet untuk bersaing			2,800,000,000	2,800,000,000	-	-	-	-
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Tersedianya infrastruktur yang berkualitas								
19	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga			Terpehara dan terpenuhinya berbagai sarana olahraga		10 bh	628,400,000	628,400,000	-	-	-	-
11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah budaya daerah yang dilestarikan		15 org/ BCB	6					
20	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah			Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan kekayaan budaya daerah		15 org	136,000,000	136,000,000	-	-	-	-
21	Pengelolaan dan pemeng bagian pelestarian penting katan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air			Meningkatkan usaha pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan terpeliharanya situs BCB		6 BCB	112,085,000	112,085,000	-	-	-	-
12	Pengelolaan keragaman Budaya	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan.		Jumlah seni budaya		10 Snggr						

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya jasa komunikasi SD air dan listrik	HSU	1 Tahun	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-
3	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya alat tulis kantor	HSU	1 Tahun	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya penggandaan barang cetakan dan penggandaan	HSU	1 Tahun	325,000,000	325,000,000	-	-	-	-
5	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	HSU	1 Tahun	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	terperluhnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan	HSU	1 Tahun	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
7	Penyediaan makan dan minum	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	terlayannya penyediaan makanan dan minuman rapat bagi karyawan Dinas Dukcatpil	HSU	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	teraksananya nya rapat-rapat konsultasi keluar daerah	HSU	1 Tahun	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur								
9	Pengadaan kendaraan dinas /operasional roda dua	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua	HSU	2 Unit	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
10	Pengadaan kendaraan operasional roda empat	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya kendaraan op-rasional roda empat	HSU	1 Unit	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-
11	pengadaan laptop	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya alat penunjang pekerjaan	HSU	5 Unit	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-
12	pengadaan printer	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya alat penunjang pekerjaan	HSU	5 unit	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
13	pengadaan mebleur	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	tersedianya alat bangunan gedung kantor	HSU	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
14	Pemeliharaan rutin / gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terperiharanya sarana dan prasarana kantor	HSU	1 Tahun	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
15	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	terperiharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas	HSU	1 Tahun	125,000,000	125,000,000	-	-	-	-
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terperiharanya sarana dan prasarana peralatan kantor	HSU	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	HSU	1 Tahun						
17	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Terlaksananya Birek implementasi Perundang-undangan	HSU	1 Tahun	85,000,000	85,000,000	-	-	-	-
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya kinerja penyusunan laporan kinerja SKPD	tersusun nya laporan capaian kinerja dan lkhitar realisasi kinerja SKPD								

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya kinerja penyusunan laporan kinerja SKPD	tersusun nya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	HSU	1 Tahun	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
	Bidang Pengelolaan data dokumen Kependudukan											
19	Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu		Tertibnya data administrasi kependudukan		HSU	1 Tahun	627,000,000	627,000,000	-	-	-	-
20	Pelatihan tenaga pengelola SIAK		Tertibnya data administrasi kependudukan		HSU	1 Tahun	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-
21	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		Tertibnya data administrasi kependudukan		HSU	1 Tahun	117,740,000	117,740,000	-	-	-	-
22	Penutuhan Data Base Kependudukan		Tertibnya data kependudukan yang tersedia di Dinas Dukaatpal		HSU	1 Tahun	450,000,000	450,000,000	-	-	-	-
	Bidang Pencatatan sipil											
23	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil		Kinerja pegawai meningkat dalam membarkan pelayanan		HSU	1 Tahun	120,000,000	120,000,000	-	-	-	-
24	Sosialisasi kebijakan kependudukan		Meningkatnya pengetahuan & kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib adm. kependudukan & sipil		HSU	1 Tahun	286,000,000	286,000,000	-	-	-	-
	Bidang pendataan penduduk											
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Tertibnya identitas kependudukan		HSU	1 Tahun	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
26	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Tersosialisasinya peraturan dan kebijakan tentang kependudukan		HSU	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
5	JUMLAH ANGGARAN DINAS KEPENDUKUKAN DAN CATATAN SIPIL						3,868,510,000	3,868,510,000				
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
URUSAN												
BIDANG UI SEKRETARIAT												
Program pelayanan administrasi kantor												
1				Outcome: Jangka waktu layanan administrasi indek kepuasan Masyarakat								
1.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: tersedianya jasa komunikasi SD air dan listrik	HSU	1 Tahun	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas /operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: tersedianya jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas dengan baik	HSU	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: pelaksanaan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar	HSU	9 Org (1 Tahun)	54,000,000	54,000,000	-	-	-	-
4.	Pemedia jasa kebersihan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: terlaksananya jasa kebersihan kantor	HSU	7 Org (1 Tahun)	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja di kantor	HSU	1 Tahun	20.000,000	20.000,000	-	-	-	-
6.	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: tersedia nya alat tulis kantor	HSU	1 Tahun	44.258,000	44.258,000	-	-	-	-
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: tersedia nya penggandaan barang cetakan dan penggandaan	HSU	1 Tahun	20.350,000	20.350,000	-	-	-	-
8.	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: tersedianya komponen jasa komunikasi SD air dan listrik	HSU	1 Tahun	-	-	-	-	-	-
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan	HSU	1 Tahun	43.050,000	43.050,000	-	-	-	-
10.	Penyediaan makan dan minum	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: terlayannya penyediaan makanan dan minuman rapat bagi karyawan dinstosakertrans	HSU	1 Tahun	30.000,000	30.000,000	-	-	-	-
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: terlaksananya rapat-rapat konsultasi keluar daerah	HSU	1 Tahun	150.000,000	150.000,000	-	-	-	-
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			Outcome: Peningkatan komputer, notebook, kipas angin, AC dan Pemeliharaan rutin alat-alat kantor								
12.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional - pengadaan kendaraan roda dua	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: dapat terselesaikan nya tugas pelatihan di desa secara cepat dan efektif	HSU	2 Buah	35.000,000	35.000,000	-	-	-	-
13.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	HSU	1 Tahun	47.313,000	47.313,000	-	-	-	-
14.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	HSU	1 Tahun	92.550,000	92.550,000	-	-	-	-
15.	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur	Output: Kondisi kendaraan tetap dalam keadaan baik dan terpelihara	HSU	1 Tahun	100.000,000	100.000,000	-	-	-	-
3	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur			Outcome: Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur								
16.	pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Implementasi Good Governance	Optimalisasi Kinerja PEMDA	Output: Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan dinas sosakertrans	HSU	1 Tahun	24.500,000	24.500,000	-	-	-	-
17.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Peningkatan Implementasi Good Governance	Optimalisasi Kinerja PEMDA	Output: Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis bagi karyawan dinas sosakertrans	HSU	1 Tahun	85.000,000	85.000,000	-	-	-	-
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Outcome: Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian renja dan keuangan								

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Optimalisasi Kinerja PEMDA	Output: tersusun nya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	HSU	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-
Bidang Ketenagakerjaan												
5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja												
19.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepeatihan dan Instruktur LPK	Penangguhangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	13,869,500	13,869,500	-	-	-	-
-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pelatihan	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	100,000,000	-	-	-	100,000,000	-
-	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	302,200,000	-	-	-	302,200,000	-
-	Monitoring Lembaga Latihan Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-
Program Periflingungan dan Pengembangan Kesempatan Kerja												
-	Padat Karya Produktif	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	284,531,000	-	-	-	284,531,000	-
-	Pengembangan Informasi Pasar Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-
Program Pemempatan dan Perluasan Kesempatan												
-	Padat Karya Produktif	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	284,531,000	-	-	-	284,531,000	-
-	Terapan TTG	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	270,870,000	-	-	-	-	270,870,000
Program Periflingungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja												
-	Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-
-	Monitoring dan evaluasi skala upah pekerja/buruh dipusahaan	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-
-	penyuluhan peningkatan kemampuan TKS pelaksanaan hnpkpas dan kesempatan kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-
6 Program Peningkatan Kesempatan kerja												

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Tersedianya (worgan kerja diperusahaan	HSU	1 Tahun	12.993.500	12.993.500	-	-	-	-
21.	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Tersebarluaskannya informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat	HSU	1 Tahun	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-
22.	Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja	HSU	1 Tahun	31.757.000	31.757.000	-	-	-	-
7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan				Outcome: Tingkat kepuasan tenaga kerja								
23.	Sosialisasi Sebagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Peningkatkan Implementasi Good Governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan kepada norma-norma yang berlaku	Output: Terlaksananya sosialisasi kepada pengusaha SP/SB pekerja masy. & instansi terkait	HSU	1 Tahun	46.328.100	46.328.100	-	-	-	-
24.	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja	Peningkatkan Implementasi Good Governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan kepada norma-norma yang berlaku	Output: Terlaksananya survey kepada pedagang, pasar tradisional dan instansi terkait	HSU	1 Tahun	25.002.400	25.002.400	-	-	-	-
Bidang Ioka Latihan Kerja												
8 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				Outcome: Daya saing tenaga kerja								
25	Pengadaan Bahan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja	peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	HSU	1 Tahun	498.492.350	498.492.350	-	-	-	-
Program peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja				Output: Adanya keterampilan yang dimiliki oleh remaja	HSU	1 Tahun	1.010.500.000		-	-	-	1.010.500.000
Bidang Transmigrasi												
9 Program Transmigrasi Lokal				Outcome: Penyebaran penduduk dan kota terpadu mandiri (KTW) transmigrasi								
26	Penyuluhan transmigrasi lokal	peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kepada masy. Eks Trans	HSU	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
27	Pelatihan transmigrasi lokal	peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Terlaksananya pelatihan kepada masy. Eks Trans	HSU	1 Tahun	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-
Program Pengembangan Wilayah transmigrasi				Outcome: Penyebaran penduduk dan kota terpadu mandiri (KTW) transmigrasi								
10												
28	fasilitasi koordinasi identifikasi calon area/lokasi transmigrasi	peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Terlaksananya Pengidentifikasiian untuk calon lokasi transmigrasi kab. HSU	HSU	1 Tahun	130.000.000	130.000.000	-	-	-	-
29	Inventarisasi calon transmigrasi	Pembangunan kota Amuntai	Terlaksananya perbedasan ahan untuk pengembangan kota amuntai	Output: Tersusunnya RISP dan SICA serta terpenuhinya syarat penukiman	HSU	1 Tahun			-	-	-	-
Bidang Sosial												
11 Program Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan Penyandang Masalah Kessos PMKS				Outcome: Angka Kemiskinan								

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Peningkatan Kemampuan(Capaciti Building Petugas dan Pemandu ping sosial Pemberdayaan fakir miskin	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Tersedianya Petugas pendamping sosial lebih Esis dalam penanganan PMKS	HSU	1 Tahun	90.000.000	90.000.000	-	-	-	-
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Peningkatan ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGS	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: Fakir Miskin Bisa Bermodal dan dapat hidup layak	HSU	1 Tahun	178.550.000	178.550.000	-	-	-	-
12 Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan sosial												
32	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Peningkatan ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGS	Menurunnya persentasi kemiskinan	Outcome: Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial Output: Terlaksananya penyaluran bantuan bagi FM dan WISE	HSU	1 Tahun	590.450.000	590.450.000	-	-	-	-
33	Peningkatan masalah-masalah Strategis yang Menyangkut tentang Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kepedulian terhadap korban bencana alam	Output: Terlaksananya Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam	HSU	1 Tahun	175.903.150	175.903.150	-	-	-	-
34	Pemulihan Masalah sosial	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Tersosialisasinya masalah sosial (PMKS)	HSU	1 Tahun	30.270.000	30.270.000	-	-	-	-
35	Santunan penunjang kehidupan lanjut usiandan penyandang cacat	Peningkatan ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGS	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: Lansia yang masih produktif Bisa berusaha dan mampu hidup mandiri	HSU	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-
36	Penyusunan data By Name by address PMKS	Peningkatan ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGS	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: Terdatanya data PMKS yang akurat	HSU	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-
13 Program Pembinaan anak terlantar												
37	Pelatihan keterampilan dan praktek bagi anak terlantar/wanita rawan sosial ekonomi	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kepedulian terhadap korban bencana alam	Outcome: Jumlah Anak Terlantar Output: Terlatihnya anak terlantar dan wanita Rawan sosial ekonomi	HSU	1 Tahun	79.611.000	79.611.000	-	-	-	-
14 Program Pengembangan wawasan Kebangsaan												
38	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Outcome: Susana kehidupan bergama dan lkatan sosial dikalangan masyarakat Output: Terlaksananya sosialisasi tentang nilai-nilai kepahlawanan	HSU	1 Tahun	11.450.000	11.450.000	-	-	-	-
15 Program Pembinaan panti asuhan/ jompo												
39	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kepedulian terhadap korban bencana alam	Outcome: Anak yatim dan jompo yang disantuni									

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana panti asuhan /ompo			Output: Tersantunnya anak panti	HSU	1 Tahun	73,183,100	73,183,100	-	-	-	-
16	Program Pengelolaan Areal Pemukiman	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwarnai nilai-nilai keagamaan	Output: Rehab TMP Tabur	HSU	1 Tahun	45,600,000	45,600,000	-	-	-	-
40	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman			Output: Terpiliharnya Tanah Makam Palihawan Tabur	HSU	1 Tahun	45,600,000	45,600,000	-	-	-	-
17	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kepedulian terhadap korban bencana alam	Outcome: Layanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial								
41	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan sosial Masy	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Output: Orsosmas dapat dimonitor kegiatannya	HSU	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
42	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Output: Meningkatkan kualitas SDM anggota KT dan PSM	HSU	1 Tahun	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-
43	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Output: Menurunnya tingkat kenakalan remaja dan pemaklarkaba	HSU	1 Tahun	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan			Outcome: Meningkatkan kualitas Pendamping fakir miskin dan TSK								
-	Bantuan UEP melalui KUBE	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas Pelayanan kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Fakir Miskin Bisa Bermodal dan dapat hidup layak	HSU	1 Tahun	60,000,000		-	-	60,000,000	-
-	Bantuan UEP melalui KUBE	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas Pelayanan kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Fakir Miskin Bisa Bermodal dan dapat hidup layak	HSU	1 Tahun	1,500,000,000		-	-		1,500,000,000
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakat			Outcome: Meningkatkan kualitas Pendamping fakir miskin dan TSK								
-	Pemberdayaan UEP melalui KUBE	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas Pelayanan kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Fakir Miskin Bisa Bermodal dan dapat hidup layak	HSU	1 Tahun	750,000,000		-	-		750,000,000
	Program Rehabilitasi Sosial			Outcome: Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial								
-	Asistensi Sosial Lanjut Usia	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas Pelayanan kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Terlaksananya penyaluran bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	300,000,000		-	-		300,000,000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Outcome: Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial								
-	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (RTLH)	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas Pelayanan kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Terlaksananya penyaluran bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	1,000,000,000		-	-		1,000,000,000
	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial PANCA			Outcome: Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial								
-	Pemberian asistensi sosial orang dengan kecacatan berat	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas Pelayanan kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Terlaksananya penyaluran bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	180,000,000		-	-		180,000,000

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Kesejahteraan Sosial				Outcome: Jumlah Penyanggah masalah kesejahteraan sosial								
- Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Terlaksananya pelayanan bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	75.000,000			-			75.000,000
17	43	JUMLAH ANGGARAN DIMAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				9.543.113,100	3.245.481,100	0	0	926.731,000	5.370.901,000	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMBALAH BATUNG												
URUSAN												
BIDANG URUSAN												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	RSUD	1 Tahun	178.350,400	178.350,400	-			
1	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor dan Perengakaian Kantor											
2	Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan		RSUD	1 Tahun	3.339.365,039	330.000,000,00	-			
2	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)			Tersedianya Sarana & Prasarana	RSUD	1 Tahun	3.669.365,039	-				
3	Kegiatan Kinerja Layanan NS			Tersedianya BAKHP, Obat, makan pasien kelas III, peralatan Kantor	RSUD	1 Tahun	4.601,040,000	4.601,040,000	-			
3	Program Penyelenggaraan BLUD	Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan		RSUD	1 Tahun	11.506.819,200	11.506.819,200	-			
4	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD RSUD			Terpenulihnya Parameter Pelayanan BLUD melalui Rencana Strategis Bisnis	RSUD	1 Tahun	20.925.000,000	-				20.925.000,000
5	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (TR)			Tersedianya Sarana & Prasarana	RSUD	1 Tahun	40.880,574,639	16.286,209,600	3.339,365,039	330.000,000	0	20.925.000,000
3	5	JUMLAH ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMBALAH BATUNG				40.880,574,639	16,286,209,600	3,339,365,039	330,000,000	0	20,925,000,000	
KANTOR PELAYANAN TERPADU												
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu layanan administrasi	KPT	100%						
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tersedianya tenaga administrasi non PNS	KPT	4 orang	28.800,000	28.800,000				
2.	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya biaya komunikasi	KPT	12 Bulan	9.500,000	9.500,000				
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tersedianya bahan pembersih dan petugas kebersihan	KPT	12 Bulan	6.750,000	6.750,000				
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya alat tulis kantor	KPT	12 Bulan	35.150,125	35.150,125				
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	KPT	12 Bulan	26.627,650	26.627,650				
6.	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya peralatan listrik	KPT	12 Bulan	2.800,000	2.800,000				
7.	Penyediaan makan dan minum tamu			Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	KPT	12 bulan	21.000,000	21.000,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8. Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah				Teraksananya koordinasi dan konsultasi pelayanan	KPT	12 Bulan	160,000,000	160,000,000				
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	KPT	100%						
9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Tersedianya printer, komputer dan Ups	KPT	100%	45,000,000	45,000,000				
10. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional				Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	KPT	12 Bulan	30,000,000	30,000,000				
11. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Terpeliharanya peralatan kantor	KPT	12 Bulan	9,563,900	9,563,900				
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	KPT	100%						
12. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Tersosialisasinya pelayanan KPT	KPT	32 Kegiatan	79,000,000	79,000,000				
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Gedung Kantor	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Pengunjung website pemerintah daerah	KPT	100						
13. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik				Adanya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	KPT	1 Laporan IKM	90,000,000	90,000,000				
5. Program Benar-benar Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Produk hukum daerah dan penerapannya	KPT	100%						
14. Koordinasi kerjasama penataan permasalahan perijinan dan non perijinan				Terlaksananya rapat tim pembina dan tim teknis	KPT	16 Kegiatan	226,032,228	226,032,228				
5 14 JUMLAH ANGGARAN KANTOR PELAYANAN TERPADU							770,223,903	770,223,903	0	0	0	0
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
1. Penyedia Jasa surat menyurat				Terdinya Administrasi surat menyurat	Satpol PP	100%	50,000,000	50,000,000				
2. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air listrik				Terperuhnya komunikasi, air & listrik kantor	Satpol PP	100%	15,000,000	15,000,000				
3. Pevediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Ketersediaanya peralatan kantor	Satpol PP	100%	25,000,000	25,000,000				
4. Rapat-raapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Konsultasi & koordinasi dalam peningkatan kinerja lebih terarah	Satpol PP	100%	175,000,000	175,000,000				
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
5. Pengadaan Pakalan Dinas beserta kelengkapannya				Pakaian dinas+kelengkapannya+1 aker+sepatu	Satpol PP	70 orang	60,000,000	60,000,000				
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai									

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Sarana & Prasarana kantor dipelihara dengan baik	Satpol PP	100%	10.000.000	10.000.000				
7.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor			Waktu Pemakaian Kendaraan Dinas/Operasional bertambah	Satpol PP	100%	35.000.000	35.000.000				
8.	Penambahan Mobil Operasional			Jumlah Operasional dilapangan bertambah	Satpol PP	100%(2 buah)	267.500.000	267.500.000				
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
9.	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Diklat/Biniek yang sesuai	Satpol PP	100%	10.000.000	10.000.000				
10.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis			Tupoksi	Satpol PP	100%	70.000.000	70.000.000				
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Kinerja	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel									
11.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Tersusunnya Laporan realisasi kinerja SKPD	Satpol PP	100%	10.000.000	10.000.000				
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.									
12.	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Optimalisasi keamanan & ketertiban Umum	Masyarakat	100%	483.210.000	483.210.000				
7.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekak)	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwarnai nilai-nilai keagamaan									
13.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba			Terlaksananya penyuluhan bahaya akibat miras & narkoba	Pelajar & Masyarakat	1.500 Orang	55.000.000	55.000.000				
8.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketertarikan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku									
14.	Pengakuan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati			Memberikan Sosialisasi tentang Perdas & Perup.	Masyarakat	100%	83.000.000	83.000.000				
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kamtibmas	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.									
15.	Pembentukan Satuan Keamanan lingkungan di Masyarakat			Optimalisasi tenaga Linmas	Masyarakat	100%	175.000.000	175.000.000				
10.	Program Pemeliharaan Kamtibmas	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.									
16.	Pengawasan dan Pengendalian Kamtibmas			Monitoring/Pengawasan daerah rawan kejahatan	Masyarakat	100%	75.000.000	75.000.000				
10	16 JUMLAH ANGGARAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						1.598.710.000	1.598.710.000	0	0	0	0
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH												

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN WAJIB											
	BIDANG PENDIDIKAN											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. HSU	65%						
1	- Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik			Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik serta jasa komunikasi	Perpustarda HSU	95%	69,095,000	69,095,000				
2	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kenyamanan lingkungan kantor	Perpustarda HSU	100%	33,450,000	33,450,000				
3	- Penyediaan jasa kebersihan kantor			Terpenuhinya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	Perpustarda HSU	90%	34,800,000	34,800,000				
4	- Penyediaan alat tulis kantor			Terpenuhinya ATK guna kelancaran tugas-tugas kantor	Perpustarda HSU	75%	57,000,000	57,000,000				
5	- Penyediaan makanan dan minuman			Terpenuhinya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat intern dan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perpustarda HSU	85%	12,600,000	12,600,000				
6	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perpustarda HSU	4 Org	63,750,000	63,750,000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur secara maksimal guna kelancaran tugas-tugas rutin kantor	Kab. HSU	65%						
7	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor	Perpustarda HSU	85%	137,500,000	137,500,000				
8	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal	Perpustarda HSU	2 Unit	59,000,000	59,000,000				
9	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	Perpustarda HSU	75%	30,000,000	30,000,000				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Kab. HSU	4 Org						
10	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	Perpustarda HSU	4 Org	20,000,000	20,000,000				
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terpenuhinya Laporan Keuangan dan Akuntabilitas	Kab. HSU	100%						
11	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja	Perpustarda HSU	100%	7,800,000	7,800,000				
5	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia yang Berdaya sang	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan melalui kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Kab. HSU	30%						
12	- Pemasyrakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar			Terciptanya pemasyrakatan minat baca.	Perpustarda HSU	27.000 pemustaka	92,000,000	92,000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13 - Pengembangan minat dan budaya baca			Terciptanya pengembangan minat baca bagi pelajar	Perpustakaan HSU	100 Peserta	45,000,000	45,000,000				
14 - Supervisi, pembinaan, stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat			Memingkatkan jumlah dan mutu pengelola perpustakaan di semua jenis perpustakaan melalui bimbingan teknis Perpustakaan	Perpustakaan HSU	50 Peserta	35,000,000	35,000,000				
15 - Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan			Terciptanya koordinasi pada semua stakeholder untuk pengembangan semua jenis perpustakaan.	Perpustakaan HSU	50 Peserta	25,000,000	25,000,000				
16 - Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca			Bertambahnya koleksi perpustakaan desa/ke/kec.	Perpustakaan kec/ke/Desa	-	102,000,000	102,000,000				
17 - Publikasi, sosialisasi minat dan budaya baca			Tertatasannya pembudayaan gemar membaca dan promosi perpustakaan	Sekolah-sekolah	300 Peserta	20,000,000	20,000,000				
18 - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah			Ketersediaan bahan pustaka sebagai sumber informasi terkini dan aktual untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.	Perpustakaan HSU	2.300 Eks.	150,000,000	150,000,000				
19 - Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan			Jumlah pengunjung perpustakaan desa dan layanan keliling	Perpustakaan Desa dan sekolah	32.000 pengunjung	68,000,000	68,000,000				
6 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Memingkarnya Pedoman Penataan arsip daerah se sebagai sumber tertatanya arsip SKPD dan arsip desa	Perpustakaan HSU	100 buku	14,000,000	14,000,000				
20 - Pengklasifikasian data			Tertahnya buku Khazanah arsip Hulu Sungai Utara	Perpustakaan HSU	50 SKPD	35,000,000	35,000,000				
21 - Pengadaan Sarana Penyimpanan			Tersedianya sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar	Perpustakaan HSU	4 Org	18,950,000	18,950,000				
22 - Kajian Sistem Administrasi Kearsipan			Tenaga yang memiliki pengetahuan kearsipan	Perpustakaan HSU							
7 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pematangan Informasi Teknologi (IT)	Memingkarnya volume pendataan dan penataan arsip desa, arsip SKPD, sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menuju tertib administrasi 2017	Kab HSU							
23 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip			-								
24 Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah			Akuisisi Arsip pada SKPD	SKPD	5 SKPD	61,300,000	61,300,000				
25 Penduplikasian Dokumen Arsip dalam Bentuk Informatika			Terselatkannya dokumen arsip daerah	Masyarakat HSU	5 SKPD	25,050,000	25,050,000				
8 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Memingkarnya SDM kearsipan yang mempunyai kompetensi di bidang kearsipan menuju terbunya pengelolaan arsip desa dan arsip SKPD	Kab HSU							

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	Pemeliharaan rutin/ Berkala sarana pengolahan dan penyiraman arsip			Terpeliharanya arsip penting dan bernilai guna permanen	Perpustakaan HSU	100%	56.500.000	56.500.000				
27	Penyusunan dan pemberian naskah sumber arsip			Terusunnya tata naskah dinas kearsipan milik Penda HSU	Perpustakaan HSU	100%	14.000.000	14.000.000				
28	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah			Terciptanya SDM kearsipan yang handal baik arsip desa maupun arsip pemerintah daerah HSU	Desa/ Perpustakaan HSU	100%	98.250.000	98.250.000				
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tertaksananya manajemen kearsipan sesuai standar yang berlaku	Kab HSU	50 Org	51.125.000	51.125.000				
29	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta											
9	JUMLAH ANGGARAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						1.436.170.000	1.436.170.000				
KANTOR KOPRI												
URUSAN Urusan Wajib Pemerintahan Umum												
BIDANG UI SEKRETARIAT DP KOPRI												
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	HSU	95%	20.552.000	20.552.000				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	HSU	100%	12.820.000	12.820.000				
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	HSU	100%	3.562.000	3.562.000				
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	HSU	100%	27.979.000	27.979.000				
5	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	HSU	100%	61.044.000	61.044.000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana											
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	HSU	100%	5.900.000	5.900.000				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya sang	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan	Kualitas pelayanan publik	HSU	100%	61.858.000	61.858.000				
4	Program Pembinaan dan Pengembangan											
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan implementasi good	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketertatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	HSU	100%	25.000.000	25.000.000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Pengembangan Anggota Korpi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang Berdaya sahnig	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan	Kualitas pelayanan publik	HSU	100%	2.824,000	2.824,000				
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	HSU	100%	100,000,000	100,000,000				
6	Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olah											
11	Penyelenggaraan kompetisi Olahraga	Peningkatan Sosial Budaya dan Keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan kependudaan dan olahraga	Prestasi Olahraga	HSU	100%	150,810,000	150,810,000				
7	Program Pembinaan dan Pengembangan											
12	Penyelenggaraan Silaturahmi dan Pengkatan Ukhuwah Islamiyah Pejabat	Peningkatan Sosial Budaya dan Keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial kemasyrakatan yang diwarnai nilai keagamaan	Kualitas kehidupan dan kerkunan beragama	HSU	100%	30,500,000	30,500,000				
7	JUMLAH ANGGARAN KANTOR KORPRI						502,849,000	502,849,000				
KECAMATAN AMUNTAL TENGAH												
	Pemerintahan Umum											
1	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
	Kegiatan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Sumber Daya Air, Telepon dan Listrik								
1	Belanja Barang dan Jasa			Tersedianya Sumber Daya Air	Kecamatan Amt. Tengah	100%	3,000,000	3,000,000				
2	Belanja Air			Tersedianya Sumber Daya Listrik	Kecamatan Amt. Tengah	100%	7,500,000	7,500,000				
3	Belanja Listrik			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	2,500,000	2,500,000				
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	20,000,000	20,000,000				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	3,000,000	3,000,000				
6	Penyediaan Administrasi Keuangan			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	12,600,000	12,600,000				
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	15,000,000	15,000,000				
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	5,000,000	5,000,000				
9	Penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	70,000,000	70,000,000				
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	16,000,000	16,000,000				
11	Penyediaan makan minum Rapat / Tamu			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	100%	16,000,000	16,000,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			Lancarnya pelaksanaan tugas	Kecamatan Amt. Tengah	Dalam dan Keluar Daerah	20,000,000	20,000,000				
13	Belanja Sewa Tenda dan Sound System			Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt. Tengah	100%	5,000,000	5,000,000				
14	Belanja dekorasi, dokumentasi dan publikasi			Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt. Tengah	100%	4,000,000	4,000,000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kecamatan Amt. Tengah							
15	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Meningkatnya daya tahan gedung kantor	Kecamatan Amt. Tengah	Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan	13,000,000	13,000,000				
16	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Kecamatan Amt. Tengah	100%	23,000,000	23,000,000				
17	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor			Terpeliharanya Peralatan Kantor	Kecamatan Amt. Tengah	100%	5,000,000	5,000,000				
3	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera		Kecamatan Amt. Tengah							
18	Peningkatan kesejahteraan keluarga			Terlaksananya kegiatan PKK	Kecamatan Amt. Tengah	100%	15,000,000	15,000,000				
4	Program PATEN Kecamatan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kecamatan Amt. Tengah							
19	Pelayanan Terpadu Kecamatan			Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Amt. Tengah	100%	25,000,000	25,000,000				
5	Program Pelayanan Raskin Kecamatan	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan Pencapaian target MDGs	Menurunnya persentase kemiskinan									
20	Pendukung Kegiatan Raskin											
	Honorarium Tim Raskin Kecamatan			Tersedianya Honorarium Tim Raskin Kecamatan								
	Penanggung jawab				Kecamatan Amt. Tengah	12 bulan	3,300,000	3,300,000				
	Ketua				Kecamatan Amt. Tengah	12 bulan	2,700,000	2,700,000				
	Sekretaris				Kecamatan Amt. Tengah	12 bulan	2,100,000	2,100,000				
	Anggota 4 orang				Kecamatan Amt. Tengah	12 bulan	7,200,000	7,200,000				
	Belanja Perjalanan Dinas				Kecamatan Amt. Tengah							
	Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah			Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Amt. Tengah	100%	6,000,000	6,000,000				
21	Kegiatan Distribusi Raskin Ke Titik Distribusi Desa se Kecamatan Amuntai Selatan				Kecamatan Amt. Tengah							
	Belanja Sewa Angkutan				Kecamatan Amt. Tengah	100%	47,000,000	47,000,000				
	Upah Takar/Timbang di Desa				Kecamatan Amt. Tengah	100%	36,000,000	36,000,000				
	Belanja Kantong Plastik				Kecamatan Amt. Tengah	100%	5,160,000	5,160,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Belanja ATK				Kecamatan Amt. Tengah	100%	600,000	600,000				
Penggunaan				Kecamatan Amt. Tengah	100%	600,000	600,000				
Konsumsi				Kecamatan Amt. Tengah	100%	600,000	600,000				
Dokumentasi				Kecamatan Amt. Tengah	100%	600,000	600,000				
5	21	JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN AMUNTAL TENGAH				376,460,000	376,460,000				

KECAMATAN AMUNTAL UTARA

1 Program Pelayanan Administrasi Kantor											
	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik		tersedianya komponen jasa komunikasi SD air dan listrik	Amt Utara	100%	10,000,000	10,000,000				
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt Utara	100%	15,000,000	15,000,000				
3	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan		Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt Utara	100%	5,250,000	5,250,000				
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt Utara	100%	6,500,000	6,500,000				
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt Utara	100%	42,500,000	42,500,000				
6	Penyediaan Makan Minum Rapat/Tamu		Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt Utara	100%	18,500,000	18,500,000				
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah		Lancarnya pelaksanaan tugas	Amt Utara	100%	45,000,000	45,000,000				
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
8	Pemeliharaan Rutin berkala gedung Kantor		Meningkatkan Daya Tahan Gedung Kantor agar tahan lama	Amt Utara	100%	17,500,000	17,500,000				
9	Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah dinas		Meningkatnya daya tahan rumah dinas agar tahan lama	Amt Utara	100%	5,000,000	5,000,000				
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Amt Utara	100%	22,500,000	22,500,000				
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku									
11	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang.undangan			Amt Utara	100%	10,000,000	10,000,000				
4 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga											
	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pemahaman dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera									
12	Peningkatan Kesejahteraan keluarga		Terselenggaranya kegiatan PKK	Amt Utara	100%	15,000,000	15,000,000				
5 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu											
	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Pelayanan Terpadu kecamatan			Tersedianya dana untuk melaksanakan program Pelayanan Terpadu kecamatan			25.000,000	25.000,000				
5 Program Pelayanan Raskin Kecamatan												
17	Pendukung kegiatan Raskin	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan Pencapaian target MDGs	Menurunnya persentase kemiskinan	Tersedianya Honorarium Tim Koordinasi dan distribusi Raskin kecamatan			111.860,000	111.860,000				
5 17 JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN ANUNTAI SELATAN												
KECAMATAN SUNGAI PANDAN												
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah				2.350,000	2.350,000				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik						13.260,000	13.260,000				
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan						22.200,000	22.200,000				
4	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor						5.600,000	5.600,000				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor						14.000,000	14.000,000				
6	Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan						7.000,000	7.000,000				
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						5.050,000	5.050,000				
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000,000	75.000,000				
9	Penyediaan Makanan dan minuman						13.000,000	13.000,000				
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah						25.000,000	25.000,000				
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
11	Pemeliharaan Rutin berkala rumah dinas						10.000,000	10.000,000				
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						10.000,000	10.000,000				
13	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/Operasional						22.000,000	22.000,000				
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor						4.000,000	4.000,000				
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
15	Pengadaan pakaian kopri						10.000,000	10.000,000				
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
16	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketatan terhadp norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku				10.000,000	10.000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel								
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Sei Pandan	100%	3,000,000	3,000,000				
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Sei Pandan	100%	2,000,000	2,000,000				
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Sei Pandan	100%	2,000,000	2,000,000				
20	Penyusunan Renstra, Renja dan RKA			Kec. Sei Pandan	100%	4,000,000	4,000,000				
6	Program pendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah								
21	Pemantauan dan dukungan pelaksanaan pemilu dan pemilukada di daerah			Kec. Sei Pandan	100%	30,000,000	30,000,000				
7	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera								
22	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga			Kec. Sei Pandan	100%	15,000,000	15,000,000				
8	Program peningkatan pelayanan terpadu	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah								
23	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			Kec. Sei Pandan	100%	30,000,000	30,000,000				
24	Distribusi Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin)			Kec. Sei Pandan	100%	155,000,000	155,000,000				
8	24 JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN				100%	489,460,000	489,460,000				

KECAMATAN BAHRIK

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah								
1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat			Kec. Bahrik	100%	2,350,000	2,350,000				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik			Kec. Bahrik	100%	13,260,000	13,260,000				
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kec. Bahrik	100%	22,200,000	22,200,000				
4	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor			Kec. Bahrik	100%	5,600,000	5,600,000				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Bahrik	100%	14,000,000	14,000,000				
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan			Kec. Bahrik	100%	7,000,000	7,000,000				
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kec. Bahrik	100%	5,050,000	5,050,000				
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Bahrik	100%	75,000,000	75,000,000				
9	Penyediaan Makanan dan minuman			Kec. Bahrik	100%	13,000,000	13,000,000				
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			Kec. Bahrik	100%	25,000,000	25,000,000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah								
11	Peneliharaan Rutin berkala rumah dinas			Kec. Bahrik	100%	10,000,000	10,000,000				
12	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Bahrik	100%	10,000,000	10,000,000				
13	Peneliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional			Kec. Bahrik	100%	22,000,000	22,000,000				
14	Peneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			Kec. Bahrik	100%	4,000,000	4,000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Upah petugas Keamanan			Tersedia Upah Petugas Keamanan	Kecamatan Danau Panggang	100%	1.800,000	1.800,000				
Upah petugas Kebersihan			Tersedia Upah Petugas Kebersihan	Kecamatan Danau Panggang	100%	1.800,000	1.800,000				
Upah petugas operator komputer			Tersedia Upah petugas operator komputer	Kecamatan Danau Panggang	100%	1.800,000	1.800,000				
Upah petugas kurir			Tersedia Upah Petugas kurir	Kecamatan Danau Panggang	100%	1.800,000	1.800,000				
Upah petugas agendaris surat menyurat			Tersedia Upah Petugas agendaris surat menyurat	Kecamatan Danau Panggang	100%	1.800,000	1.800,000				
Upah sopir camat			Tersedia Upah Petugas sopir camat	Kecamatan Danau Panggang	100%	1.800,000	1.800,000				
Belanja Barang dan Jasa											
3 Belanja Bahan Habis Pakai Kantor											
Belanja Alat Tulis Kantor			Tersedia ATK	Kecamatan Danau Panggang	100%	10.671,000	10.671,000				
Belanja Alat Listrik dan Elektronik			Tersedia alat listrik dan elektronik	Kecamatan Danau Panggang	100%	4.740,000	4.740,000				
4 Belanja Jasa Kantor											
Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor			Tersedia jasa pemeliharaan peralatan kantor	Kecamatan Danau Panggang	100%	4.900,000	4.900,000				
Belanja Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi			Tersedia dokumentasi, publikasi dan dekorasi	Kecamatan Danau Panggang	100%	1.750,000	1.750,000				
5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor											
Belanja Jasa Service			Tersedia jasa Service Kendaraan	Kecamatan Danau Panggang	100%	3.149,000	3.149,000				
Belanja Penggantian Suku Cadang			Tersedia Suku Cadang	Kecamatan Danau Panggang	100%	5.650,000	5.650,000				
Belanja Bahan Bakar Minyak			Tersedia Bahan Bakar Minyak (BBM)	Kecamatan Danau Panggang	100%	10.890,000	10.890,000				
6 Belanja Cetak dan Pengandaan											
Belanja Cetak			Tersedia Barang Cetak	Kecamatan Danau Panggang	100%	2.000,000	2.000,000				
Belanja Pengandaan			Tersedia Pengandaan	Kecamatan Danau Panggang	100%	6.500,000	6.500,000				
7 Belanja Makanan dan Minuman											
Belanja Makanan dan Minuman Rapat			Tersedia Makanan dan Minuman Rapat	Kecamatan Danau Panggang	100%	9.500,000	9.500,000				
Belanja Makanan dan Minuman Tamu			Tersedia Makanan dan Minuman Tamu	Kecamatan Danau Panggang	100%	3.000,000	3.000,000				
8 Belanja Perjalanan Dinas											
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			Tersedia Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Danau Panggang	100%	7.000,000	7.000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Belanja perjalanan daerah luar daerah			Tersedia biaya perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Danau Panggang	100%	45.000,000	45.000,000				
9 Belanja Modal											
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor											
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas											
Belanja modal pengadaan sepeda motor dinas			Tersedia sepeda motor dinas	Kecamatan Danau Panggang	100%	35.000,000	35.000,000				
10 Belanja Modal Pengadaan notebook/laptop											
Belanja Modal laptop			Tersedia laptop	Kecamatan Danau Panggang	100%	12.000,000	12.000,000				
2 Program Pembinaan Keseljahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera									
11 Belanja Operasional Peningkatan Keseljahteraan Keluarga			Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan Sei Tabukan	Kecamatan Danau Panggang	100%	15.000,000	15.000,000				
3 Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat									
12 Belanja Operasional Pembinaan pemerintahan desa			Tersedia dana operasional pembinaan desa	Seluruh desa se kecamatan Danau Panggang	100%	15.000,000	15.000,000				
4 Program Pembinaan Bidang Sosial dan Keagamaan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang diwarnai nilai-nilai keagamaan	Tersedia Dana								
13 Belanja Operasional Pembinaan dan Pengembangan LP7Q Kecamatan Danau Panggang			Operasional Pembinaan dan Pengembangan LP7Q Kecamatan Danau Panggang	Kecamatan Danau Panggang	100%	15.000,000	15.000,000				
Program PATEN Kecamatan (Pelayanan Terpadu Kecamatan Danau Panggang)	Peningkatan implementasi good goverance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedia Dana untuk melaksanakan Program Pelayanan Terpadu Kecamatan Danau Panggang	Kecamatan Danau Panggang	100%	25.000,000	25.000,000				
5											
14 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)											
6 Pendukung Pelaksanaan Program Raskin Kecamatan Danau Panggang	Peningkatan Kemiskinan, ketenagakerjaan dan Pencapaian target MDGs	Menurunnya persentase kemiskinan									
15 Belanja Pegawai											
Honorarium Tim Koordinasi Raskin Kecamatan			Tersedia Honorarium Tim Koordinasi Raskin Kec.								
Pemangku Jawab				Kecamatan Danau Panggang	100%	3.300,000	3.300,000				
Ketua				Kecamatan Danau Panggang	100%	2.750,000	2.750,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sekretaris				Kecamatan Danau Panggang	100%	2.200,000	2.200,000				
Anggota 3 orang				Kecamatan Danau Panggang	100%	4.950,000	4.950,000				
16 Belanja Perjalanan Dinas											
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Kalsel					100%	4.800,000	4.800,000				
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi Kalsel					100%	6.000,000	6.000,000				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembelajaran Ke Luar Propinsi Kalsel					100%	7.000,000	7.000,000				
17 Kegiatan Distribusi Raskin ke Titik Distribusi Desa Se Kecamatan Danau Panggang											
Belanja Sewa Angkutan				Kecamatan Danau Panggang	100%	24.726,000	24.726,000				
Belanja Upah Takar				Kecamatan Danau Panggang	100%	22.100,000	22.100,000				
Belanja Upah Satgas				Kecamatan Danau Panggang	100%	650,000	650,000				
Belanja Kantong plastik				Kecamatan Danau Panggang	100%	2.652,000	2.652,000				
Belanja Konsumsi				Kecamatan Danau Panggang	100%	1.375,000	1.375,000				
Belanja Dokumentasi				Kecamatan Danau Panggang	100%	275,000	275,000				
Belanja Pengerjaan				Kecamatan Danau Panggang	100%	500,000	500,000				
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)				Kecamatan Danau Panggang	100%	450,000	450,000				
6 17 JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN DANAU PANGGANG						331.438,000	331.438,000	0	0	0	0
KECAMATAN BANJANG											
WAJIB											
Pemerintahan Umum											
Kecamatan Banjang											
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1 listrik	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Banjang	100%	6.898,000	6.898,000				
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Banjang	100%	1.100,000	1.100,000				
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya ATK	Kecamatan Banjang	100%	8.581,759	8.581,759				
4	Penyediaan Administrasi Keuangan	Meningkatnya implementasi good governance	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Banjang	100%	6.570,000	6.570,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Banjang	100%	7.884.000	7.884.000				
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Banjang	100%	9.088.000	9.088.000				
7	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Perengkapan Listrik dan Penerangan Kantor	Kecamatan Banjang	100%	5.251.000	5.251.000				
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banjang	100%	18.013.000	18.013.000				
9	Penyediaan Makan dan Minum rapat/Tramu	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat/Tramu	Kecamatan Banjang	100%	21.900.000	21.900.000				
10	Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana Kantor	Tersedianya Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Kecamatan Banjang	100%	51.699.000	51.699.000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Memperpanjang Usia Peralatan yang dipelihara								
11	Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Banjang	100%	7.117.000	7.117.000				
12	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kecamatan Banjang	100%	26.083.000	26.083.000				
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Banjang	100%	2.463.000	2.463.000				
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Peningkatan implementasi good governance	Tercukupinya sarana dan prasarana Kantor	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Kecamatan Banjang	100%	54.000.000	54.000.000				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			Aparatur Yang Profesional								
15	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan implementasi good governance	Pegawai Keamanan Banjang	adanya Aparat Yang Profesional	Kecamatan Banjang	100%	19.683.000	19.683.000				
4	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga			Pelaksanaan Program PKK								
16	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera	Pelaksanaan Program PKK								
5	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu			Adanya keluarga yang sejahtera	Kecamatan Banjang	100%	16.425.000	16.425.000				
17	Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEU)	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Banjang	100%	27.375.000	27.375.000				
18	Fasilitasi Pelayanan Distribusi Beras Untuk Masyarakat Miskin			Banyaknya Jumlah Pelayanan	Kecamatan Banjang	100%	101.498.000	101.498.000				
5	JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN BANJANG			Tersedianya Kebutuhan Pangan masyarakat	Kecamatan Banjang	100%	391.628.759	391.628.759				
KECAMATAN PAMINGGIR												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kec. Paminggir	100%	262.251.630	262.251.630				
1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat											

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kec. Pamunggir	100%	15.000.000	15.000.000				
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
3	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera		Kec. Pamunggir	100%	16.000.000	16.000.000				
3	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga											
4	Program PATEN Kecamatan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kec. Pamunggir	100%	26.500.000	26.500.000				
4	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)											
5	Program Pelayanan Raskin Kecamatan	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan Pencapaian target MDGs	Menurunnya persentase kemiskinan		Kec. Pamunggir	100%	68.000.000	68.000.000				
5	Distribusi Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin)											
6	Program Administrasi Kependudukan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kec. Pamunggir	100%	15.000.000	15.000.000				
6	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan											
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dim Membangun Desa	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat		Kec. Pamunggir	100%	20.500.000	20.500.000				
7	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dim Membangun Desa											
7	7 JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN PAMUNGIR					100%	423.251.630	423.251.630				
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN												
1.	Program Pelayanan Administrasi Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik			Tersedianya Sumber Daya Air, Telepon dan Listrik	Kecamatan Sungai Tabukan	100%	12.400.000	12.400.000				
2.	Penyediaan jasa surat menyurat			Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Sungai Tabukan	100%	1.000.000	1.000.000				
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya ATK	Kecamatan Sungai Tabukan	100%	8.000.000	8.000.000				
4.	Penyediaan Administrasi Keuangan			Tersedianya Administrasi Keuangan	Kecamatan Sungai Tabukan	2 orang operator komputer dan 1 orang sopir	12.600.000	12.600.000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sungai Tabukan	Jaga malam 350, Kebersihan 250	8.200.000	8.200.000				
6.	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sungai Tabukan		10.000.000	10.000.000				
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tersedianya Komp. Instalasi Listrik/penerangan	Kecamatan Sungai Tabukan		5.000.000	5.000.000				
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Tabukan		61.250.000	61.250.000				
9.	Penyediaan Makan Minum Rapat/Tamu			Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	Kecamatan Sungai Tabukan		17.000.000	17.000.000				
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah			Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi dan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar daerah		60.000.000	60.000.000				
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
11.	Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya dana pemeliharaan rutin gedung	Kecamatan Sungai Tabukan		8.000.000	8.000.000				
12.	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/operasional			Tersedianya dana rutin kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sungai Tabukan		40.000.000	40.000.000				
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor			Tersedianya dana r pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kecamatan Sungai Tabukan		8.000.000	8.000.000				
3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga												
14.	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga		Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera	Tertaksananya kegiatan PKK Kecamatan Sel Tabukan	Kecamatan Sungai Tabukan		15.000.000	15.000.000				
15.	Kegiatan Pemilihan kepala desa			Tersedianya Dana Pemilihan Kepala Desa	1. Galangah 2. Teluk Cati 3. Rantau Bujur Darat		10.000.000	10.000.000				
16.	Kegiatan Pelantikan Kepala Desa Terpilih			Tersedianya dana pelantikan kepala desa terpilih	1. Galangah 2. Teluk Cati 3. Rantau Bujur Darat		10.000.000	10.000.000				
17.	Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa			Tersedianya Dana pembinaan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sungai Tabukan		5.000.000	5.000.000				
18.	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan			Tersedianya Dana kegiatan fasilitasi dan pembinaan ormas	Kecamatan Sungai Tabukan		5.000.000	5.000.000				
4	Program Pendukung Pelaksanaan Pelayanan E-KTP	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya Dana Pendukung Program e-KTP	Kecamatan Sungai Tabukan		25.000.000	25.000.000				
19	Pendukung Program E-KTP Kecamatan						100%					

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program PATEN Kecamatan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
20	Pelayanan Terpadu kecamatan			Tersedianya dana untuk program PATEN	Kecamatan Sungai Tabukan	100%	25.000,000	25.000,000				
6	Program Pelayanan Raskin Kecamatan	Peninggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan Pencapaian target MDGs	Menurunnya persentase kemiskinan									
21	Pendukung kegiatan Raskin			Tersedianya dana untuk pendukung kegiatan raskin	Kecamatan Sungai Tabukan	100%	90.748,000	90.748,000				
6	JUMLAH ANGARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN						437.198,000	437.198,000				
KECAMATAN HAUR GADING												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
1	Kegiatan Jasa Surat Menyurat				Kec. Haur Gading	100%	2.500,000	2.500,000				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik				Kec. Haur Gading	100%	10.500,000	10.500,000				
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Kec. Haur Gading	100%	6.000,000	6.000,000				
4	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor				Kec. Haur Gading	100%	9.600,000	9.600,000				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Kec. Haur Gading	100%	16.973,000	16.973,000				
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan				Kec. Haur Gading	100%	15.000,000	15.000,000				
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Kec. Haur Gading	100%	2.500,000	2.500,000				
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kec. Haur Gading	100%	14.000,000	14.000,000				
9	Penyediaan Makanan dan minuman				Kec. Haur Gading	100%	17.000,000	17.000,000				
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah				Kec. Haur Gading	100%	50.000,000	50.000,000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Kec. Haur Gading	100%	7.500,000	7.500,000				
13	Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan dinas/Operasional				Kec. Haur Gading	100%	24.000,000	24.000,000				
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor				Kec. Haur Gading	100%	5.000,000	5.000,000				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku									
15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Kec. Haur Gading	100%	10.000,000	10.000,000				
4	Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan Pengarusutamaan Gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga				Kec. Haur Gading	100%	15,000,000	15,000,000				
5 Program peningkatan pelayanan terpadu	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
17 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)				Kec. Haur Gading	100%	26,200,000	26,200,000				
18 (Raskin)				Kec. Haur Gading	100%	90,012,700	90,012,700				
6 Belanja Modal	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
19 Belanja Modal Peralatan Kantor				Kec. Haur Gading		18,000,000	18,000,000				
20 Belanja Modal Meubeler				Kec. Haur Gading		25,000,000	25,000,000				
6 20 JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN HAUR GADING					100%	364,785,700	364,785,700				
306 900 JUMLAH BIDANG SOSIAL BUDAYA						247,336,169,655	209,643,627,161	8,703,910,494	530,000,000	1,371,331,000	27,087,301,000
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG											
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
1. Program Pelayanan Administrasi Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Bahan penunjang jasa surat menyurat	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	11,499,900	11,499,900				
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kebutuhan sarana air dan listrik terpenuhi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	43,960,000	43,960,000				
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pajak Kendaraan Dinas dan terpeliharanya Dinas	BPBD Kab. HSU	2 Buah	45,000,000	45,000,000				
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Menunjang kelancaran jasa administrasi keuangan	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	16,950,000	16,950,000				
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Lingkungan yang bersih dan rapi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	31,800,000	31,800,000				
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor				BPBD Kab. HSU	1 Tahun	12,000,000	12,000,000				
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sarana dan prasarana perlengkapan kantor terpenuhi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	32,380,000	32,380,000				
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah			Meningkatkan SDM yang berkompetensi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	175,000,000	175,000,000				
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai									
9. Pembangunan Gedung Kantor			Pagar dan Tempat parkir	BPBD Kab. HSU	116 m ² x 90 m ² (Garasi + parkir)	605,990,000	605,990,000				
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Meningkatkan Daya Tahan Gedung Kantor agar tahan lama	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	5,000,000	5,000,000				
11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Terpeliharanya peralatan kantor	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	8,250,000	8,250,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah										
12. Pendidikan dan Pelatihan formal		Meningkatkan kemampuan SDM	BPBD Kab. HSU	...kali		10,000,000	10,000,000					
13. Pendidikan dan Pelatihan Teknis		Meningkatkan kemampuan SDM	BPBD Kab. HSU			30,000,000	30,000,000					
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel										
14. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Pembuatan Renja dan Laki, Renstra	BPBD Kab. HSU	3 kali		110,432,096	110,432,096					
Bidang Kedarifatan dan Logistik												
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan bencana dan rehabilitasi pasca bencana	potensi bencana dan rehabilitasi									
15. Pemanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa		TRC yang tanggap Bencana	BPBD Kab. HSU	1 kali		195,885,000	195,885,000					
6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan bencana dan rehabilitasi pasca bencana	potensi bencana dan rehabilitasi									
16. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran		Meningkatkan Loyalitas Barisan Pemadam Kebakaran dalam menangani kebakaran	BPBD Kab. HSU	100%		704,112,500	704,112,500					
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan												
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan bencana dan rehabilitasi pasca bencana	potensi bencana dan rehabilitasi									
17. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam		Meningkatkan kepedulian masyarakat dan siswa yang tanggap akan bencana	BPBD Kab. HSU	300 Org Masy dan 2,400 siswa		400,000,000	400,000,000					
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan bencana dan rehabilitasi pasca bencana	potensi bencana dan rehabilitasi									
18. Koordinasi dalam rangka pencegahan penanggulangan bencana		Meningkatkan kelancaran koordinasi pencegahan penanggulangan bencana	BPBD Kab. HSU	1 tahun		90,822,500	90,822,500					
19. Koordinasi penyusunan peta daerah rawan bencana		Pembuatan buku Peta daerah rawan bencana	BPBD Kab. HSU	30 buah buku		52,200,000	52,200,000					
9. Program Pasca Bencana	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan bencana dan rehabilitasi pasca bencana	potensi bencana dan rehabilitasi									
20. Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di HSU	BPBD Kab. HSU	koordinasi dan 20		103,600,000	103,600,000					
21. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan banjir		Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam penanggulangan banjir	BPBD Kab. HSU	438 orang		35,000,100	35,000,100					
10. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan bencana dan rehabilitasi pasca bencana	potensi bencana dan rehabilitasi									
22. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan		Arus Lalu Lintas Kepuasan Masyarakat	BPBD Kab. HSU	6 Buah Jembatan		-	-					

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam		Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan potensi bencana dan rehabilitasi pasca bencana									
23. Bantuan Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam				Cakupan layanan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial	BPBD Kab. HSU	20 Buah	-	-				
12. Perencanaan Pembangunan Daerah		Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan potensi bencana dan rehabilitasi pasca bencana									
24. Perencanaan Pembangunan Daerah				Implementasi Rencana dalam Dokumen RPI/MD, RKP, RTRW, RENSTRA dan Renja SKPD dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BPBD Kab. HSU	12 Kali Rapat/Exemplar	-	-				
12 24 JUMLAH ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							2.719.882,096	2.719.882,096	-	-	-	-
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA												
PERDAGANGAN												
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah									
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah	DPKT	95%	1.896.090.000	1.896.090.000	-	-	-	-
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Meningkatnya Ketersediaan Bersih dan Listrik	DPKT	100%	80.902.500	80.902.500	-	-	-	-
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Administrasi Keuangan	DPKT	90%	17.850.000	17.850.000	-	-	-	-
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor				Meningkatnya Keamanan dan Kebersihan Kantor	DPKT	90%	17.850.000	17.850.000	-	-	-	-
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Terpenunjnya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	DPKT	95%	61.372.500	61.372.500	-	-	-	-
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Terpenunjnya Ketersediaan Alat Tulis Kantor	DPKT	100%	6.762.000	6.762.000	-	-	-	-
7 Penyediaan Makanan dan Minuman				Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKT	90%	65.835.000	65.835.000	-	-	-	-
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Terpenunjnya Ketersediaan Makanan dan Minuman	DPKT	90%	22.008.000	22.008.000	-	-	-	-
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Terpenunjnya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi	DPKT	90%	262.500.000	262.500.000	-	-	-	-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor								
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor	DPKT	90%	63.000.000	63.000.000	-	-	-	-
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Meningkatnya Kualitas Kendaraan Dinas/Operasional	DPKT	90%	726.180.000	726.180.000	-	-	-	-
11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				Terpenunjnya Ketersediaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPKT	90%	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya Kemampuan SDM								
12	Pendidikan dan Pelatihan Formal				DPPT	90%	65.200.000	65.200.000	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Akses Pendidikan dan Pelatihan Pelaporan kinerja								
13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Meningkatnya Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	DPPT	95%	127.320.500	127.320.500	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Meningkatnya kualitas dan Efisiensi Pengelolaan Pasar								
14	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Pasar			Meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar	Kab. HSU	90%	3.852.486.864	3.852.486.864	-	-	-	-
6	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Meningkatnya Pengelolaan PKL								
15	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan			Meningkatnya Penataan PKL	Kab. HSU	90%	595.857.250	595.857.250	-	-	-	-
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Sistem Pengelolaan Persampahan								
16	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. HSU	90%	1.530.855.000	1.530.855.000	-	-	-	-
17	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			Meningkatnya Operasional Prasarana dan Sarana Persampahan	Kab. HSU	90%	814.243.335	814.243.335	-	-	-	-
18	Sosialisasi kebijakan Pengelolaan Persampahan			Meningkatnya Pemahaman tlg Kebijakan Persampahan	Kab. HSU	90%	100.250.000	100.250.000	-	-	-	-
8	Program Pemanfaatan Ruang	Pengembangan kota Amuntai	Terciptanya kawasan yang representatif dan layak huni	Meningkatnya Upaya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang								
19	Fasilitasi Perijinan IMB dan Reklame			Meningkatnya Keteraturan IMB dan Reklame	Kota Amuntai	90%	63.331.800	63.331.800	-	-	-	-
9	PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Meningkatnya Kualitas Lingkungan kota								
20	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			Meningkatnya Ketersediaan Saluran Drainase	Kota Amuntai	90%	335.995.800	335.995.800	-	-	-	-
10	PERHUBUNGAN Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Meningkatnya Estetika Ruang Kota								
21	Pengadaan Alat-Alat Penerangan Jalan			Meningkatnya Ketersediaan pju dan Lampu Hias	Kab. HSU	90%	615.438.800	615.438.800	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	LINGKUNGAN HIDUP										
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya RTH Ketersediaan RTH							
	22 Pemetaan RTH			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTH	90%	1.682.720.000	1.682.720.000	-	-	-	-
11	22 JUMLAH ANGGARAN DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA				90%	13.086.199.349	13.086.199.349	-	-	-	-
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks Kepuasan Pegawai	Kab. HSU						
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik			terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. HSU	0,75	70.000,000	70.000,000			
	2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			Terpenuhinya Asuransi Keselamatan Kerja	Kab. HSU	1	10.000,000	10.000,000			
	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Terbayarnya honor Kegiatan	Kab. HSU	1	75.000,000	75.000,000			
	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kebutuhan Perbaikan alat Kerja tercukupi dengan baik	Kab. HSU	0,9	20.000,000	20.000,000			
	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			Terpenuhinya sarana administrasi perkantoran yang baik	Kab. HSU	0,9	21.623.213	21.623.213			
	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Kab. HSU	0,9	105.000,000	105.000,000			
	7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. HSU	1	118.000,000	118.000,000			
	8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	Kab. HSU	0,75	24.500,000	24.500,000			
	9 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. HSU	1	340.000,000	340.000,000			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Kualitas Pelayanan Publik	Kab. HSU						
	10 Kegiatan Pemeliharaan Rutih / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. HSU	0,8	260.000,000	260.000,000			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Kualitas Pelayanan Publik	Kab. HSU						
	11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Keleengkapannya			Terpenuhinya pakaian dinas dan keleengkapannya	Kab. HSU	0,95	146.025,000	146.025,000			
	12 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional roda 2			Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	Kab. HSU	0,5	100.000,000	100.000,000			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Kab. HSU						
	13 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal			Meningkatnya sumber daya aparatur Dishukominfo	Kab. HSU	0,75	250.000,000	250.000,000			

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	Kab. HSU							
14	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic light, warning & Rambu lalu lintas					75%	125.000.000	125.000.000				
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	arus Penumpang, Kepuasan Masyarakat								
15	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya			Terciptanya ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan		100%						
	- Honor Tim raja Terpadu (4 angkatan)					100%	80.000.000	80.000.000				
	- Upah Petugas Pelaksanaan Transit (pengamanan Jalur)					100%	60.000.000	60.000.000				
	- Upah lembur Petugas Pelaksanaan Transit (Poskotis Lebaran & tahun Baru)					100%	40.000.000	40.000.000				
	- Upah Penertiban Mobil dan Parkir					100%	50.000.000	50.000.000				
	- Pembuatan tenda Poskotis Lebaran					100%	25.000.000	25.000.000				
	- Cetak spanduk dan balho Poskotis lebaran					100%	3.000.000	3.000.000				
	- Belajar Makan minum Petugas Poskotis Lebaran, Natal dan Tahun baru					100%	10.000.000	10.000.000				
16	Kegiatan Pencapaian Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal			Tercapainya kebersihan di lingkungan terminal dan demaga	Kab. HSU	100%	34.700.000	34.700.000				
7	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Angka Kecelakaan	Kab. HSU							
17	Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas			tercapainya pengguna jalan yang aman, terhib, lancar dan teratur								
	- Pengadaan Traffic Light					100%	428.090.000	428.090.000				
	- Pengadaan Warning Light					100%	100.000.000	100.000.000				
	- Pengadaan RPP					100%	105.000.000	105.000.000				
	- Pengadaan Guardril					100%	45.000.000	45.000.000				
	- Pengadaan Traffic cone					100%	150.000.000	150.000.000				
	- Pengadaan Deliniator					100%	15.000.000	15.000.000				
	- Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas					100%	250.000.000	250.000.000				
18	Pengadaan / Pembuatan Marka & Zebra cross			tercapainya pengguna jalan yang aman, terhib, lancar dan teratur	Kab. HSU	100%	175.000.000	175.000.000				
8	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	Kab. HSU	75%						
19	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Sungai					75%	100.000.000	100.000.000				
9	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	arus Penumpang, Kepuasan Masyarakat	Kab. HSU							
	20 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan sungai dan Pemeliharaan kebersihan Alur Sungai			Terciptanya ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan sungai	Kab. HSU	75%						
	- Upah Pembersihan Alur sungai				Kab. HSU	100%	150.000.000	150.000.000				
	- Upah Petugas Pelaksana ketertiban sungai				Kab. HSU	75%	20.000.000	20.000.000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Pembelian bahan baku bangunan (Galam, Bambu)				Kab. HSU	100%	25.000,000	25.000,000				
	- Belanja Perbaikan Dinas Dalam Daerah				Kab. HSU	75%	15.000,000	15.000,000				
	- Pembelian Mesin Speed Boat /60 PK				Kab. HSU	100%	50.000,000	50.000,000				
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Kepuasan Masyarakat, Arus Penumpang	Kab. HSU							
	21 Pembangunan sarana dan Prasarana Angkutan Sungai			Terlaksananya pembangunan / dermaga di kabupaten Hulu Sungai	Kab. HSU							
	- Rehab demaga perahu di Alabio				Kab. HSU	100%	200.000,000	200.000,000				
	- Pembuatan Garasi Apung Speed Boat				Kab. HSU	100%						
	- Pembuatan Halte/Tempat Istirahat Penumpang Dermaga Babirik				Kab. HSU	100%						
11	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Cakupan Sebaran Informasi	Kab. HSU							
	22 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah			Beroperasinya website Kabupaten Hulu Sungai Utara		100%	293.576,000	293.576,000				
	23 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat			Peningkatan kelancaran Informasi Pembangunan Daerah		1 thn	111.000,000	111.000,000				
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Cakupan Sebaran Informasi	Kab. HSU							
	24 Kegiatan Pembinaan Internet Sehat			Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat	Kab. HSU	100%	40.000,000	40.000,000				
	25 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah			Terselenggaranya kebijakan Pemerintah tentang komunikasi	Kab. HSU	100%	50.422,000	50.422,000				
	26 Kegiatan Pelayanan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-Plik)			Terpenuhinya kebutuhan Informasi dan komunikasi di kecamatan	Kab. HSU	50%	179.600,000	179.600,000				
12	26 JUMLAH ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.470.536.213	4.470.536.213				
DINAS PEKERJAAN UMUM												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel				1.075.000,000	1.075.000,000				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Terselenggaranya kegiatan administrasi	Kab. HSU		45.000,000	45.000,000				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik			Kegiatan administrasi komunikasi, air dan listrik	Kab. HSU		97.000,000	97.000,000				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. HSU		105.000,000	105.000,000				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap dipakai	Kab. HSU		96.000,000	96.000,000				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Peningkatan motivasi kerja pengelolaan	Kab. HSU		95.000,000	95.000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			keuangan Terjaganya kebersihan kantor	Kab.HSU		25,000,000	25,000,000				
Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor			Tersedianya alat tulis kantor	Kab.HSU		65,000,000	65,000,000				
Kegiatan : Penyediaan Beralatan dan Perlengkapan kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.HSU		95,000,000	95,000,000				
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.HSU		2,000,000	2,000,000				
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman			Mendukung kelancaran pekerjaan	Kab.HSU		70,000,000	70,000,000				
Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Peningkatan koordinasi dan informasi	Luar Daerah		380,000,000	380,000,000				
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai				180,000,000	180,000,000	-	-	-	-
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Terpeliharanya gedung kantor	Kab.HSU		50,000,000	50,000,000				
Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Tersedianya perlengkapan gedung	Kab.HSU		130,000,000	130,000,000				
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya	1					95,000,000	95,000,000	-	-	-	-
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah Diklat yang di ikuti	Dalam dan Luar daerah		35,000,000	35,000,000				
Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang			Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	Dalam dan Luar daerah		60,000,000	60,000,000				
9 Jumlah						1,350,000,000	1,350,000,000	-	-	-	-
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Pengurangan Longsor Tebing	Kab. HSU	20%	1,380,000,000	580,000,000	-	-	100,000,000	700,000,000
Kegiatan : Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun dan direhabilitasi			1,380,000,000	580,000,000	-	-	100,000,000	700,000,000
- Pembuatan String Beton Bronjong Desa				Kab. HSU	100%	700,000,000	-			-	700,000,000
- Pemintangan DR. Polder Muara Bayur				Kab. HSU	100%	100,000,000	-			-	100,000,000
- Bronjong Sungai Desa Sungai Turak DR. polder Muara Bayur				Kec. Amt. Tengah	100%	100,000,000	100,000,000			-	-
- Pemasangan Bronjong Desa Sungai Turak				Kec. Amt. Utara	100%	100,000,000	100,000,000			-	-
- Pemasangan Bronjong Desa Karas Dalam				Kec. Banjang	100%	200,000,000	200,000,000			-	-
- Pemasangan Bronjong Kelurahan Palwara				Kec. Amt. Tengah	100%	100,000,000	100,000,000			-	-
- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				Kab. HSU	100%	47,000,000	47,000,000			-	-
- Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				Kab. HSU	100%	33,000,000	33,000,000			-	-
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pemantauan Potensi Lokal Untuk Meningkatkan Nilai Rawa Untuk	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Rawa Untuk	Lancarnya Irigasi dan Jaringan Pengairan Untuk Kebutuhan Pertanian	Kab. HSU	30 Ha	22,700,000,000	7,690,000,000	3,550,000,000	355,000,000	7,255,000,000	3,850,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tambah Ekonomi	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Terlayannya Kebutuhan Kawasan Pertanian		40 Ha						
			Tercapainya Peningkatan Fungsi Irigasi/Rawa		15%						
			Bertungasnya Kembali Fungsi dan Kegunaan Pintu Air								
Kegiatan : Pembangunan Pintu Air				Kab. HSU	4 Bn	5.395.000.000	1.635.000.000	-	-	2.360.000.000	1.400.000.000
-	Pembuatan Pintu Air Desa Pasar Senin DR. Pinang Habang			Kec. Amt. Tengah	100%	2.360.000.000	-	-	-	2.360.000.000	-
-	Pembuatan Pintu Air Desa Padang Luar DR. Polder Pakancangan			Kab. HSU	100%	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000
-	Penggantian Pintu Saluran Air Desa Tayur DR. Polder Muara Bayur			Kec. Amt. Ubara	100%	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000
-	Rehab Total Pintu Air Desa Kamayahan DR. Polder Pakancangan			Kec. Amt. Utara	100%	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000
-	Pembuatan Tonggul / Pintu Air Desa Kamoyahan			Kec. Amt. Utara	100%	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-
-	Pembuatan Pintu Air Desa Murung Panggang			Kec. Amt. Selatan	100%	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-
-	Pembuatan Pintu Air Desa Teluk Limbung			Kec. Babirik	100%	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-
-	Pembuatan Pintu Air Desa Murung Kupang			Kec. Babirik	100%	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-
-	Pembuatan pintu plat saluran Irigasi Desa Palimbang Gusti			Kec. Haur Gading	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pintu air untuk pertanian Desa Waringin			Kec. Haur Gading	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pembuatan Pintu air Desa Karas Dalam			Kec. Banjang	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pembuatan Pintu Air Desa Rawalutan			Kec. Banjang	100%	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-
-	Belanja konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Pintu Air			Kab. HSU	100%	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-
-	Belanja Konsultasi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Pintu Air			Kab. HSU	100%	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-
	Kegiatan : Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai		Tertaksananya Normalisasi Saluran Sungai	Kab. HSU	4.200 m	3.580.000.000	2.400.000.000	-	-	1.080.000.000	100.000.000
-	Normalisasi Saluran Sungai Awang Landas DR. Polder Bakar			Kec. Babirik	100%	1.050.000.000	-	-	-	1.050.000.000	-
-	Pembuatan Tapir Desa Pakancangan DR. Polder Pakancangan			Kec. Amt Utara	100%	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-
-	Pengerukan Sungai Pihang Desa Pihang DR. Polder Muara Bayur			Kec. Haur Gading	100%	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
-	Pengerukan Anak Sungai ke Persawahan Desa Harusan			Kec. Amt Tengah	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Tenaga Baru Desa Tapus			Kec. Amt Tengah	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Aliran Sungai dan Pembersihan Desa Padang Darat			Kec. Amt Selatan	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Desa Teluk Betung			Kec. Sungai Pandan	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Desa Sungai Pandan			Kec. Sungai Pandan	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Desa Pakungan Hilir			Kec. Babirik	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Desa Sungai Nyur			Kec. Babirik	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Desa Pararain			Kec. Danau Panggang	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Desa Danau Panggang			Kec. Danau Panggang	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Desa Longkong			Kec. Danau Panggang	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Pengerukan Sungai Desa Sungai Binuang			Kec. Haur Gading	100%	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Pihaug Desa Pihaug			Kec. Haur Gading	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Tuhuran Desa Pihaug			Kec. Haur Gading	100%	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Binglu Desa Hilir Masjid			Kec. Haur Gading	100%	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan Sungai Mati di Sungai Harus Desa Sungai Haji			Kec. Haur Gading	100%	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
-	Belanja konsultasi Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai			Kab. HSU	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai			Kab. HSU	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi				Kab. HSU	8,000 m	1,055,000,000	1,055,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Saluran Irigasi Desa Kutai Kecil		Terbangun dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Kec. Amt Selatan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Saluran Desa Tambak Sari Panji			Kec. Haur Gading	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Saluran Desa Tebing Lereng			Kec. Amt Utara	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan Saluran Persawahan Desa Ilir Masjid			Kec. Amt Selatan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan Saluran Irigasi / Sungai Desa Telaga Sari			Kec. Amt Selatan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan saluran air sawah di sungai batu-batu Desa Warhgin			Kec. Haur Gading	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pengerukan Saluran Desa Sei Turuk			Kec. Amt Utara	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Saluran Desa Sungai Dalam			Kec. Babrik Kab. HSU	100%	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
-	Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi			Kab. HSU	100%	95,000,000	95,000,000	-	-	-	-
-	Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi			Kab. HSU	100%	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun				Kab. HSU	2,700 m	2,400,000,000	2,400,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Banyu Hirang		Terbangunnya Tidan Usaha Tani/Jembatan Peranian/Tangul	Kec. Amuntai Selatan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Murung			Kec. Amuntai Selatan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Penggantian Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Kandang Halang			Kec. Amuntai Tengah	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani/Jembatan Penyeberangan Desa Karas Dalam			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Murung Partii Hulu			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Pajukungan Hilir			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Kalumpang Luar			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Pajukungan Hulu			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Sungai Luang Hulu			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Sei Durait Hulu			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Tidan Usaha Tani Desa Murung Kumpang			Kec. Babrik	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Peninggian JUT Desa Tambalang				Kec. Sungai Pandan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Baru				Kec. Danau Panggang	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Sarang Burung				Kec. Danau Panggang	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Darussalam				Kec. Danau Panggang	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Pararain				Kec. Danau Panggang	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Sungai Parangah				Kec. Danau Panggang	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Danau Panggang				Kec. Danau Panggang	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Telaga Mas				Kec. Danau Panggang	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Penyambungan Jalan Usaha Tani Desa Teluk Cati				Kec. Sungai Tabukan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Nelayan				Kec. Sungai Tabukan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Pembuatan JUT Desa Pematang Benteng				Kec. Sungai Tabukan	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Optimalisasi Fungsi Lirangan Irigasi Yang Telah Dibangun				Kab. HSU	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
- Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Optimalisasi Fungsi Lirangan Irigasi Yang Telah Dibangun				Kab. HSU	100%	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
Kegiatan : Rehabilitasi dan Peningkatan Fungsi Lirangan Irigasi				Kab. HSU	100%	10,270,000,000	200,000,000	3,550,000,000	355,000,000	3,815,000,000	2,350,000,000
- Pembuatan Lining Saluran Desa Pangkalan DR. Polder Bakar				Kec. Sei Pandan	100%	300,000,000	-	-	-	300,000,000	-
- Pembuatan Lining Saluran Desa Pangkalan Sari DR. Polder Bakar				Kec. Sei Pandan	100%	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-
- Pembuatan Lining Saluran Desa Rantau Karau				Kec. Sei Pandan	100%	400,000,000	-	-	-	400,000,000	-
- Pembuatan Lining Saluran Desa Sungai Jam-Jam DR. Polder Bakar				Kec. Babirik	100%	250,000,000	-	-	-	250,000,000	-
- Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran DR. Polder Alabio				Kab. HSU	100%	2,350,000,000	-	-	-	-	2,350,000,000
- Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran DR. Polder Kaludun				Kec. Banjang	100%	1,020,000,000	-	-	-	1,020,000,000	-
- Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran DR. Polder Bakar				Kec. Babirik	100%	350,000,000	-	-	-	350,000,000	-
- Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Daerah Rawa Pinang Habang				Kec. Amit Tengah	100%	350,000,000	-	-	-	350,000,000	-
- Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran DR. Polder Pakancangan				Kab. HSU	100%	315,000,000	-	-	-	315,000,000	-
- Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran DR. Polder Muara Bayur				Kec. Haur Gading	100%	180,000,000	-	-	-	180,000,000	-
- Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran DR. Polder Simbang Empat				Kec. Amit Selatan	100%	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-
- Pembuatan Saluran Irigasi Desa Kutai Kecil				Kec. Amit Selatan	100%	275,000,000	-	250,000,000	25,000,000	-	-
- Pembuatan Lining Saluran Desa Hambuk Raya DP. Bakar				Kec. Babirik	100%	550,000,000	-	500,000,000	50,000,000	-	-
- Lining Saluran Sekunder Desa Sei Durait Tengah				Kec. Babirik	100%	550,000,000	-	500,000,000	50,000,000	-	-
- Pembuatan Lining Desa Teluk Limbung				Kec. Babirik Gading	100%	550,000,000	-	500,000,000	50,000,000	-	-
- Lining Saluran Desa Keramat				Kec. Haur Gading	100%	330,000,000	-	300,000,000	30,000,000	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	<i> Lanjutan Peningkatan Tanggul Keliling DP. Padang Gusti</i>				Kec. Haur Gading	100%	1.100.000,000	-	1.000.000,000	100.000,000	-	-
-	<i> Lanjutan Pembuatan Lining Saluran DP. Kaludan</i>				Kec. Banglang	100%	550.000,000	-	500.000,000	50.000,000	-	-
-	Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi				Kab. HSU	100%	100.000,000	100.000,000	-	-	-	-
-	Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi				Kab. HSU	100%	100.000,000	100.000,000	-	-	-	-
Program Pengendalian Banjir		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Percegahan Potensi Bencana dan Rehabilitasi Pasa Bencana	Peningkatan Sarana Peninggulangan Banjir	Kab. HSU	11,25%	985.000,000	835.000,000	-	-	-	150.000,000
Kegiatan : Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai				Terbangunnya Sarana Dek Penahan Banjir	Kab. HSU	800 m	985.000,000	835.000,000	-	-	-	150.000,000
-	Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Sel Tabalong Desa Palimbang				Kec. Haur Gading	100%	150.000,000	-	-	-	-	150.000,000
-	Pembuatan Dek Beton Penahan Banjir Desa Sungai Durait Tengah				Kec. Babirk	100%	200.000,000	200.000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Siring Beton Saluran Irigasi Desa Palimbang Gusti				Kec. Haur Gading	100%	200.000,000	200.000,000	-	-	-	-
-	Dek Penahan Banjir Desa Pulantani				Kec. Haur Gading	100%	100.000,000	100.000,000	-	-	-	-
-	Dek Penahan Banjir Desa Tambalang Kecil				Kec. Sel. Pandan	100%	100.000,000	100.000,000	-	-	-	-
-	Pembuatan Dek beton Desa Babirk Hulu				Kec. Babirk Kab. HSU	100%	100.000,000	100.000,000	-	-	-	-
-	Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai				Kab. HSU	100%	65.000,000	65.000,000	-	-	-	-
-	Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai				Kab. HSU	100%	45.000,000	45.000,000	-	-	-	-
-	Peleaksanaan Peninggulangan Banjir				Kab. HSU	100%	25.000,000	25.000,000	-	-	-	-
3	9	Jumlah II					25.065.000,000	9.105.000,000	3.550.000,000	355.000,000	7.355.000,000	4.700.000,000
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan												
		Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara	Kab. HSU	6,976 Km	16.360.000,000		14.871.090,000	1.488.910,000		
		Kegiatan : Peningkatan Ruas Jalan (DAK)					16.360.000,000	-	14.871.090,000	1.488.910,000		
-		Peningkatan Jalan Jumba - Rukam			Kec. Amt Selatan	1.600 m	2.500.000,000		2.272.000,000	228.000,000		
-		Peningkatan Jalan Pasar Selasa-Lok Suga			Kec. Amt Selatan	2.612 m	4.000.000,000		3.636.000,000	364.000,000		
-		Peningkatan Jalan K.H.A. Dahlan - Bihman Villa			Kec. Amt Tengah	0,491 m	1.000.000,000		909.000,000	91.000,000		
-		Peningkatan Bihman Villa - H. Ali			Kec. Amt Tengah	0,950 m	2.000.000,000		1.818.000,000	182.000,000		
-		Peningkatan Jalan Alamatan - Karfas			Kec. Amt Tengah	1,463 m	3.000.000,000		2.727.000,000	273.000,000		
-		Simpang 4 Benua Lima - K. H. A. Dahlan			Kec. Amt Tengah	1,300 m	2.860.000,000		2.600.000,000	260.000,000		
-		Rehab. Jalan dan Pembuatan Dinding Penahan Banjir Jalan Abd. Azis			Kec. Amt Tengah		1.000.000,000		909.090,000	90.910,000		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							6.870.000,000	6.870.000,000	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ekonomi										
Kegiatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			Panjang jalan yang dipelihara	Kab. HSU	52 Km	97,649,500,000	20,649,500,000	-	-	17,000,000,000	60,000,000,000
- Pemeliharaan ruas jalan palampitan - panangkajene				Kab. HSU	4,400 m	50,000,000,000					50,000,000,000
- Pemeliharaan ruas jalan muara tapus - negara				Kab. HSU	13,000 m	2,600,000,000				2,600,000,000	
- Pemeliharaan ruas jalan guntung - lamphong				Kab. HSU	9,800 m	2,400,000,000				2,400,000,000	
- Pemeliharaan ruas jalan Amuntai - Pantai hana bawah				Kab. HSU	20,000 m	4,000,000,000					4,000,000,000
- Pemeliharaan berkala ruas jalan Amuntai - Kelua				Kab. HSU	12,000 m	6,000,000,000					6,000,000,000
- Pemeliharaan ruas jalan Amuntai - Lamphong				Kab. HSU	9,000 m	1,800,000,000				1,800,000,000	
- Pemeliharaan berkala ruas jalan Palampitan - alabbu (jalan kabupaten)				Kab. HSU	8,000 m	3,200,000,000				3,200,000,000	
- Pemeliharaan ruas jalan Banjarang - Batumandi				Kab. HSU	7,000 m	7,000,000,000				7,000,000,000	
- Pemeliharaan Rutin Jalan :											
Khuripan - Mubajirih						20,000,000	20,000,000				
Kebun Sari - Bihman Villa						40,000,000	40,000,000				
Persahabatan - Basuki Rahmat						5,000,000	5,000,000				
Maskoni - K H A Dahlan						5,000,000	5,000,000				
Telkom - K H A Dahlan						20,000,000	20,000,000				
BPM - Alamanan						10,000,000	10,000,000				
BPM - Alamanan						20,000,000	20,000,000				
Palampitan Hilir - TVRI						30,000,000	30,000,000				
Paliwara - Empu Jatnika						15,000,000	15,000,000				
Pamintangan - Bayur						20,000,000	20,000,000				
Empu Jatnika - Pamintangan						10,000,000	10,000,000				
Penghulu Rasyid - Abd Aziz						5,000,000	5,000,000				
Temenjung Lalil - Abd Aziz						8,000,000	8,000,000				
Banna Lima - Patnraga						8,000,000	8,000,000				
Simp.Pamaragala I - Norman Umar						7,000,000	7,000,000				
Simp.Pamaragala II - Norman Umar						5,000,000	5,000,000				
Sei Barng - Simp Tiga Telaga Silaba						100,000,000	100,000,000				
Simp.Telaga - Pasar Telaga Silaba						30,000,000	30,000,000				
Jumba - Telaga Silaba						90,000,000	90,000,000				
Banyu Hirang - Pasar Sabtu						100,000,000	100,000,000				
Danau Panggang - Babrik						15,000,000	15,000,000				
Telaga Silaba - Partit Asuhan						40,000,000	40,000,000				
Pasar Selasa - Gelagah						50,000,000	50,000,000				
Abd Hamdhan - Bihman Villa						10,000,000	10,000,000				
Bihman Villa - Gusti Septera						10,000,000	10,000,000				
Ilir Masjid - Panyujan						80,000,000	80,000,000				
Alabio - Pematang Berteng						70,000,000	70,000,000				
Pasar Senin - Pinang Kara						40,000,000	40,000,000				
Pasar Sabtu - Danau Panggang						50,000,000	50,000,000				
Teluk Katuk - Haur Gading						40,000,000	40,000,000				
Banjang - Pulau Nyur II						90,000,000	90,000,000				
Guntung - Panaitan						80,000,000	80,000,000				
Komplik CRI I Teluk Parng						70,000,000	70,000,000				
Komplik CRI II Kota Raja						80,000,000	80,000,000				
Pasar Selasa - Sei Barng						90,000,000	95,000,000				
Sei Barng - Telaga Silaba						95,000,000	95,000,000				
Teluk Bertung - Pasar Selasa						60,000,000	60,000,000				
Sungai Turak - Sungai Durian						70,000,000	70,000,000				
Panangkajene - Sungai Tabuk						50,000,000	50,000,000				
- Perkerasan Jalan Danau Panggang - Pamnggir				Kec. Danau Panggang dan Pamnggir		3,500,000,000	3,500,000,000				
- Peningkatan jalan Sei Barng - Telaga Silaba (Km.0-000 s/d 2+400)				Kec. Amt Selatan	2400 m	900,000,000	900,000,000				
- Pengaspalan Jalan RT.18 Kel. Sei. Malang				Kec. Amt Tengah	150 m	60,000,000	60,000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Pengaspalan Jalan RT 1-2 Harusan				Kec. Amt Tengah	500 m	200,000,000	200,000,000				
- Peninggian Jalan Putera Setia - Jl. Putera Jaya Tambalangan				Kec. Amt Tengah	250 m	100,000,000	100,000,000				
- Peningkatan Jalan Hilmah Bihman Villa				Kec. Amt Tengah	250 m	300,000,000	300,000,000				
- Penyirangan jalan rawan longsor desa tangga ulin hulu				Kec. Amt Tengah	300 m	500,000,000	500,000,000				
- Pengaspalan Jalan Desa Sungai Karias				Kec. Amt Tengah	1400 m	500,000,000	500,000,000				
- Peningkatan jalan komplek CFS baru sei. Malang				Kec. Amt Tengah	1000 m	500,000,000	500,000,000				
- Penyirangan jalan rawan longsor RT01 Desa Harus				Kec. Amt Tengah		300,000,000	300,000,000				
- Pengaspalan Jalan Desa Dantau Cermin				Kec. Amt Tengah	150 m	60,000,000	60,000,000				
- Peninggulangan Longsor Desa Kandang Halang				Kec. Amt Tengah	150 m	300,000,000	300,000,000				
- Pengaspalan Jalan GerIya II Lambung Mangkurat Palampitan Hulu				Kec. Amt Tengah	1500 m	300,000,000	300,000,000				
- Pengaspalan jalan tembus Rukam Desa Kutai Kecil RT III				Kec. Amt Selatan	900 m	300,000,000	300,000,000				
- Pengaspalan Jalan Desa Murung Sari RT. I s/d III				Kec. Amt Selatan	2000 m	400,000,000	400,000,000				
- Pengaspalan Jalan Desa Mamar RT. I s/d II III				Kec. Amt Selatan	1500 m	500,000,000	500,000,000				
- Pengaspalan Jalan Desa Mamar RT. I s/d II				Kec. Amt Selatan	1000 m	300,000,000	300,000,000				
- Peningkatan jalan Tembuwa kedesa telaga hanyar dati teluk Parang RT. IV				Kec. Amt Selatan	750 m	200,000,000	200,000,000				
- Pengaspalan Jalan Desa Tabalong Mati				Kec. Amt Utara	400 m	150,000,000	150,000,000				
- Pengaspalan Jalan Desa Cakru				Kec. Amt Utara	1000 m	300,000,000	300,000,000				
- Perkerasan Jalan Desa Panyauangan RT 1-4				Kec. Amt Utara	1000 m	300,000,000	300,000,000				
- Perbaikan jalan desa padang luar				Kec. Amt Utara	1000 m	200,000,000	200,000,000				
- Perbaikan jalan desa kamayahan RT 1-7				Kec. Amt Utara	1200 m	200,000,000	200,000,000				
- Pembuatan sirring rawan longsor Desa Pilantani				Kec. Haur Gading		150,000,000	150,000,000				
- Peningkatan jalan desa Sungai Biruang				Kec. Haur Gading	1250 m	250,000,000	250,000,000				
- Pembuatan sirring rawan longsor Desa Waringin				Kec. Haur Gading	50 m	150,000,000	150,000,000				
- Pengaspalan Jalan bayur				Kec. Haur Gading	500 m	187,500,000	187,500,000				
- Pembuatan jalan tembus RT. 1 ke RT 2 Banjang				Kec. Banjang		75,000,000	75,000,000				
- Perbaikan jalan RT 2 ke RT 4 Desa Beringin				Kec. Banjang		100,000,000	100,000,000				
- Pembuatan sirring beton desa Baningin				Kec. Banjang		200,000,000	200,000,000				
- Pengaspalan jalan desa Baruh Tabing RT 1 s/d 4				Kec. Banjang	1800 m	300,000,000	300,000,000				
- Siring beton desa garunggang RT 1 s/d 3				Kec. Banjang		100,000,000	100,000,000				
- Pengaspalan jalan desa Tambalang Raya RT 3				Kec. Sei Tabukan	250 m	100,000,000	100,000,000				
- Pengaspalan jalan desa Hilir Mesjid				Kec. Sei Tabukan	350 m	130,000,000	130,000,000				
- Pengaspalan jalan desa dari desa tambalang kecll, tambalang tengah tambalang, hambuku hulu, hambuku raya, hambuku pasar, hambuku tengah s/d teuk sinar				Kec. Sei Pandan	9000 m	300,000,000	300,000,000				
- Pengaspalan jalan desa Banyu Tajun Dalam				Kec. Sei Pandan	1500 m	300,000,000	300,000,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Perbaikan jalan desa Rantau Karau Hulu RT. 2				Kec. Sei Pandan	700 m	200,000,000	200,000,000				
-	Pengaspalan Jalan Desa Banyu tujuh Pangkalan RT 2-4				Kec. Sei Pandan	1500 m	300,000,000	300,000,000				
-	Pengaspalan jalan desa Sungai Pandan Hilir RT 1				Kec. Sei Pandan	150 m	56,000,000	56,000,000				
-	Perkerasan dan peninggian jalan desa Putat Atas RT. 1, 2 dan 3				Kec. Sei Pandan	1500 m	200,000,000	200,000,000				
-	Perkerasan dan peninggian jalan desa Murung Asan RT 2				Kec. Sei Pandan	400 m	80,000,000	80,000,000				
-	Perkerasan dan peninggian jalan desa Padang bangkal RT 2				Kec. Sei Pandan	500 m	100,000,000	100,000,000				
-	Perbaikan jalan desa Tambalang				Kec. Sei Pandan	800 m	200,000,000	200,000,000				
-	Siring beton desa sungai papuyu				Kec. Babirik	1500 m	150,000,000	150,000,000				
-	Siring Beton desa sungai Nyiur				Kec. Babirik	1500 m	150,000,000	150,000,000				
-	Perbaikan jalan desa Munung panti Hulu				Kec. Babirik	1500 m	150,000,000	150,000,000				
-	Perbaikan jalan desa Sungai Jam Jam				Kec. Babirik	1000 m	200,000,000	200,000,000				
-	Pengaspalan jalan Desa Babirik Hilir				Kec. Sei Pandan	1500 m	250,000,000	250,000,000				
-	Siring pasangan batu desa paminggir				Kec. Paminggir	1000 m	200,000,000	200,000,000				
-	Siring pasangan batu desa paminggir seberang				Kec. Paminggir	500 m	100,000,000	100,000,000				
-	Siring pasangan batu desa Sapala				Kec. Paminggir	500 m	100,000,000	100,000,000				
-	Peningkatan jalan desa Pulantani				Kec. Amt Utara		100,000,000	100,000,000				
-	Pengaspalan Jalan Desa Panangian RT. 1- 3				Kec. Amt Utara	1600 m	523,000,000	523,000,000				
-	Peninggian jalan dan dek beton desa pimping RT 3-4				Kec. Amt Utara		200,000,000	200,000,000				
-	Perbaikan Jalan Desa Pembuatan Siring Kali Negara Rt.04-Rt.05 Desa Rantau Karau				Kec. Sei Pandan		200,000,000	200,000,000				
-	Pengaspalan Jalan dan Siring Beton Ds. Teluk Parang				Kec. Amt Selatan		200,000,000	200,000,000				
-	Urugan Tanah & Dek Beton Pandawanan				Kec. Amt Utara		100,000,000	100,000,000				
-	Pengerasan Peninggian Jalan dengan Dek Beton Ds. Datu Kuning				Kec. Amt Tengah		100,000,000	100,000,000				
-	Pengaspalan jalan banjang ke Pulau Damar				Kec. Banjang		200,000,000	200,000,000				
-	Pembuatan siring Dek Beton dan Urugan Badan Jalan Ds. Dantau Terati - Patarkan				Kec. Banjang		200,000,000	200,000,000				
-	Peninggian dan Siring Beton Jalan Ds. Pimping- Padang Luar				Kec. Amt Utara		100,000,000	100,000,000				
-	Pengerasan & Pengaspalan Jalan Komplek Perumahan Ds. Jumba				Kec. Amt Selatan		200,000,000	200,000,000				
-	Perbaikan dan Pelebaran jalan desa kayakah				Kec. Amt Selatan		100,000,000	100,000,000				
-	Pengaspalan Jalan Rt.II,Rt.III dan Rt. IV Ds. Teluk Buluh				Kec. Banjang		100,000,000	100,000,000				
-	Pengecoran Jalan Desa Sapala				Kec. Paminggir		100,000,000	100,000,000				
-	Peninggian jalan tembus Ds. Harusan-Ds. Tigarrun				Kec. Amuntai Selatan		100,000,000	100,000,000				
-	Peningkatan jalan Pimping				Kec. Amuntai Selatan	200 m	100,000,000	100,000,000				
-	Pengaspalan jalan Nurul Rahman Ds. Kota raja				Kec. Amuntai Selatan		50,000,000	50,000,000				
-	Perbaikan jalan penghubung Ds. Sapala-Ds. Bararwa				Kec. Paminggir		100,000,000	100,000,000				
-	Pemeliharaan Jalan Tersebar				Kab. HSU		1,000,000,000	1,000,000,000				
Kegiatan - Rehabilitasi/Pemeliharaan				Jumlah jembatan yang		36 Bh	4.332.000.000	4.332.000.000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Jembatan											
- Box Culvert Desa Telaga Sari (Km 3+875)			dipelihara	Kec. Amt Selatan	100%	300,000,000	300,000,000				
- Box Culvert Banyu Hirang - Pasar Sabtu (Jemb.V)				Kec. Sei Pandan	100%	342,000,000	342,000,000				
- Rehab Titian Ulin Desa Pandamaan				Danau Panggang	100%	150,000,000	150,000,000				
- Rehab Jembatan Ulin Desa Palukahan				Danau Panggang	100%	65,000,000	65,000,000				
- Rehab Jembatan Ulin Desa Darussalam				Danau Panggang	100%	90,000,000	90,000,000				
- Rehab Titian Ulin longkong				Danau Panggang	100%	50,000,000	50,000,000				
- Rehab Jembatan Ulin Desa Manarab Hulu				Danau Panggang	100%	90,000,000	90,000,000				
- Rehab Titian Ulin Bitin				Danau Panggang	100%	50,000,000	50,000,000				
- Rehabilitasi Jembatan menjadi box culvert RT. I Desa Simpang Empat				Kec. Amt Selatan	100%	300,000,000	300,000,000				
- Perbaikan jembatan desa Kota Raja RT. IV				Kec. Amt Selatan	100%	50,000,000	50,000,000				
- Rehab 4 buah jembatan desa teluk paring RT III dan IV				Kec. Amt Selatan	100%	120,000,000	120,000,000				
- Rehab Jembatan RT. I Desa Harusan Telaga				Kec. Amt Selatan	100%	100,000,000	100,000,000				
- Rehab Jembatan gantung desa ujung murung RT. II				Kec. Amt Selatan	100%	100,000,000	100,000,000				
- Rehab Jembatan Desa Kayakah RT VI ke RT. VIII				Kec. Amt Selatan	100%	100,000,000	100,000,000				
- Rehab Jembatan penghubung sungai turak dalam				Kec. Amt Utara	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung RT 3 Desa Tuhran				Kec. Haur Gading	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung Haur Gading				Kec. Haur Gading	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehan jembatan desa Sungai Limas				Kec. Haur Gading	100%	50,000,000	50,000,000				
- Rehab Jembatan gantung Teluk Serikat				Kec. Banglang	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung Garunggang				Kec. Banglang	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung Karas dalam				Kec. Banglang	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung Parikan				Kec. Banglang	100%	200,000,000	200,000,000				
- Pembuatan tian ulin desa danau terate				Kec. Sei Tabukan	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Titian Ulin Desa Gampa Raya				Kec. Sei Tabukan	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung RT. 3 Desa Gempa Raya				Kec. Sei Tabukan	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan bekubung RT 3 pematang benteng hilir				Kec. Sei Tabukan	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan RT 2 pematang benteng hilir				Kec. Sei Tabukan	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan desa Tambalang Raya RT. 3 dan 4				Kec. Sei Tabukan	100%	150,000,000	150,000,000				
- Rehab Jembatan RT 3 dan 4 Desa Banna Hamyar				Kec. Sei Tabukan	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung Desa Hambuku Baru				Kec. Babirik	100%	75,000,000	75,000,000				
- Rehab Jembatan gantung Desa Pamninggir dan Pamninggir Seberang				Kec. Pamninggir	100%	200,000,000	200,000,000				
- Rehab Titian RT.1 Ds. Pulantani				Kec. Haur Gading	100%	50,000,000	50,000,000				
- Rehabilitasi Jembatan Rt.03 Pulau tambak				Kec. Amt Selatan	100%	50,000,000	50,000,000				
- Pembuatan Jembatan Desa Tampakang				Kec. Pamninggir	100%	50,000,000	50,000,000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Rehab total jembatan sebelah rumah H. Jamri RT 2 Banna Hanyar				Kec. Sei Tabukan Kab HSU	100%	2.000.000,000	200.000,000				
- Pemeliharaan Rutin Jembatan					100%	500.000,000	500.000,000				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan						250.000,000	250.000,000				
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat				Kab.HSU	10 Buah	200.000,000	200.000,000				
Kegiatan : Pembuatan Sistem Informasi Jalan & Jembatan				Kab.HSU	1 s	50.000,000	50.000,000				
3	9	Jumlah III				125.461.500,000	32.101.500,000	14.871.090,000	1.488.910,000	17.000.000,000	60.000.000,000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor		Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya Infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Persentase gedung kantor yang layak pakai	Kab. HSU	6,05%	2.750.000,000	2.750.000,000			
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor				Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	1.300.000,000	1.300.000,000			
- Rehab. Rumah Camat Amuntai Tengah						1.000.000,000	1.000.000,000				
- Rehab. Kantor Camat Amuntai Selatan (Atap + Plapori)						300.000,000	300.000,000				
Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor				Jumlah gedung kantor yang bangun		2 Unit	1.450.000,000	1.450.000,000			
- Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup						1.250.000,000	1.250.000,000				
- Pembangunan Kantor Kepala Desa Tangkawong Kec. Hour Gading						200.000,000	200.000,000				
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Pengembangan kota Amuntai	Terciptanya kawasan permukiman representatif dan layak huni	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang		10%	21.730.000,000	7.730.000,000			3.000.000,000
Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur				Jumlah dan jenis Infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan		10 pkt	21.730.000,000	7.730.000,000			3.000.000,000
- Replikasi PAMSIMAS 4 Desa							230.000,000	230.000,000			
- Pembangunan Pasar Alabio Kec. Sungai Pandan							4.000.000,000	4.000.000,000			
- Pembangunan Gedung Olah Raga di Pusat Olah Raga Karas							3.500.000,000	3.500.000,000			
- Rehabilitasi/Pembangunan Saluran Drainase Komplek Perumahan Citra Permata Kec. Amuntai Selatan							3.000.000,000				3.000.000,000
- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kecamatan Perumahan Potensial Kec. Sungai Pandan							2.000.000,000				2.000.000,000
- Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kecamatan Bihit Kec. Danau Panggang							3.000.000,000				3.000.000,000
- Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kawasan Kota Amuntai							500.000,000				500.000,000
- Dukungan Prasarana dan sarana Ruang Terbuka Hijau Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah							3.000.000,000				3.000.000,000
- Pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya Candi Agung							2.500.000,000				2.500.000,000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Gang/Lingkungan Perumahan		Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	Aksesibilitas masyarakat	Kab. HSU	17,65%	9.751.625,000	8.751.625,000			1.000.000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Gang/Lingkungan Perumahan			panjang jalan gang/lingkungan perumahan yang dipelihara/direhabilitasi			4.464.625.000	3.964.625.000			500.000.000	
- Perbaikan Gang SDN Kebun Sari I Kec. Amuntai Tengah						133.625.000	133.625.000				
- Peningkatan jalan tembus Desa Haur Gading Kec. Haur Gading						90.000.000	90.000.000				
- Peninggian jalan dek batu Desa Paminggir Kec. Paminggir						130.000.000	130.000.000				
- Rehab. Titian Desa Pal Batu Kec. Paminggir						100.000.000	100.000.000				
- Rehab. Titian Desa Sapala Kec. Paminggir						100.000.000	100.000.000				
- Rehab. Titian Desa Ambahai Kec. Paminggir						100.000.000	100.000.000				
- Rehab. Titian Desa Barawa Kec. Paminggir						100.000.000	100.000.000				
- Rehab. Titian Ulin di Desa Pararan Kec. Danau Panggang						100.000.000	100.000.000				
- Rehab. Titian Ulin di Desa Baru Kec. Danau Panggang						50.000.000	50.000.000				
- Rehab. Lanjutan Jalan Gang Desa Pandaman Kec. Danau Panggang						100.000.000	100.000.000				
- Perbaikan / peningkatan jalan Desa Babirik Hulu Kec. Babirik						50.000.000	50.000.000				
- Perbaikan / peningkatan jalan Desa Hambuku Baru Kec. Babirik						100.000.000	100.000.000				
- Peninggian gang Desa Sungai Jamjam RT. II Kec. Babirik						50.000.000	50.000.000				
- Perbaikan Gang Soreta dan Gang Suhabbid Kec. Sungai Pandan						70.000.000	70.000.000				
- Pengaspalan dan peninggian jalan gang menuju MINU Al Yasriyah dan Gedung NU di RT. 1 Kec. Sungai Pandan						50.000.000	50.000.000				
- Peningkatan jalan Desa Tambalang Kec. Sungai Pandan						100.000.000	100.000.000				
- Perbaikan Gang Al-Khair RT. III di Kec. Sungai Pandan						40.000.000	40.000.000				
- Rehab. Titian Desa Murung Asam RT. 4 Kec. Sungai Pandan						50.000.000	50.000.000				
- Rehab. Titian Desa Tapus Dalam RT. 4 Kec. Sungai Pandan						50.000.000	50.000.000				
- Perbaikan Gang Desa Teluk Mesjid Kec. Sungai Pandan						150.000.000	150.000.000				
- Pelebaran jalan/string beton Desa Rantau Bujur Darat RT. 3 Kec. Sungai Tabukan						100.000.000	100.000.000				
- Pektelasan jalan Desa Hilir Mesjid Kec. Sungai Tabukan						75.000.000	75.000.000				
- Peninggian jalan Desa Air Tawar RT. 2 Kec. Amuntai Utara						100.000.000	100.000.000				
- Peninggian Jalan Desa Guntung RT. 3 Kec. Amuntai Utara						200.000.000	200.000.000				
- Pengaspalan jalan Desa Kutai Kecil Kec. Amuntai Selatan						100.000.000	100.000.000				
- Perbaikan Gang Teluk Dalam Desa Ilir Mesjid RT. 03 Kec. Amuntai Selatan						75.000.000	75.000.000				
- Pelebaran jalan Desa Murung Panggang RT. I - IV Kec. Amuntai Selatan						200.000.000	200.000.000				
- Peninggian Gang TPA Desa Ujung Murung RT. 03 Kec. Amuntai Selatan						50.000.000	50.000.000				
- Peningkatan jalan Desa Kota Raja Kec. Amuntai Selatan						100.000.000	100.000.000				
- Peningkatan Gang H. Yusfan Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah						100.000.000	100.000.000				
- Perbaikan Gang Nusa Kel. Kebun Sari RT.10 Kec. Amuntai Tengah						100.000.000	100.000.000				
- Peninggian Gang Mandani Desa Kota Raden Hilir Kec. Amuntai Tengah						150.000.000	150.000.000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Peninggian Gang Kurubi Desa Kota Raden Hilir Kec. Amuntai Tengah						100,000,000	100,000,000				
- Peninggian Gang Marwadi Desa Kota Raden Hilir Kec. Amuntai Tengah						100,000,000	100,000,000				
- Perbaikan Gang Cinta Damai Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah						30,000,000	30,000,000				
- Peninggian Jl. Depan Warung H. Amrullah Desa Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah						50,000,000	50,000,000				
- Penyelesaian Dek Beton Gang Sumber Rezeki Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah						146,000,000	146,000,000				
- Perbaikan Gang Al-Jihad Desa Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah						75,000,000	75,000,000				
- Rehab. Ttian Desa Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah						80,000,000	80,000,000				
- Rehabilitasi Gang Desa Tapus Kec. Amuntai Tengah						70,000,000	70,000,000				
- Rehab. Gang Mandiri RT. II Desa Kota Raden Hilir Kec. Amuntai Tengah						50,000,000	50,000,000				
- Perbaikan Gang Desa Kaludan Kecil Kec. Banjang						100,000,000	100,000,000				
- Peningkatan jalan lingkungan kawasan Pasar Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah						500,000,000				500,000,000	
- <i>Pengecoran Jalan Tanggul Desa Patarkan - Pakelang Kecamatan Amuntai Utara</i>						50,000,000	50,000,000				
- <i>Peningkatan Jalan Desa Pulantani Kec. Haur Gading</i>						50,000,000	50,000,000				
Kegiatan : Pembangunan Jalan Gang/ Lingkungan Perumahan			panjang jalan gang/lingkungan perumahan yang dibangun	Kab. HSU		5,287,000,000	4,787,000,000			500,000,000	
- Pembangunan jalan gang Desa Palimbangan Gusti RT. 01						150,000,000	150,000,000				
- Pembangunan Gang RT. 3 Desa Tuhanan						60,000,000	60,000,000				
- Pembuatan tian ulin menuju puskesmas Desa Haur Gading Kec. Haur Gading						80,000,000	80,000,000				
- Pembuatan rabat beton Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang						150,000,000	150,000,000				
- Pembangunan Ttian Ulin Desa Teluk Masjid Kec. Danau Panggang						300,000,000	300,000,000				
- Pembangunan Ttian Ulin Desa Longkong Kec. Danau Panggang						300,000,000	300,000,000				
- Pembangunan Ttian Ulin Desa Bitin Kec. Danau Panggang						45,000,000	45,000,000				
- Pembangunan Ttian Ulin Desa Manarap Kec. Danau Panggang						50,000,000	50,000,000				
- Pembuatan gang Desa Hambuku Lina Kec. Babirik						150,000,000	150,000,000				
- Pembuatan Gang Desa Sei. Durat Tengah Kec. Babirik						100,000,000	100,000,000				
- Pembangunan Gang Desa Sungai Jamjam Kec. Babirik						150,000,000	150,000,000				
- Pembuatan Gang Baru di Desa Banyu Tajun Pangkalan Kec. Sungai Pandan						75,000,000	75,000,000				
- Pembuatan jalan/gang beton RT. II Desa Galagah Hulu Kec. Sungai Tabukan						50,000,000	50,000,000				
- Pembuatan gang beton assandri RT. II Desa Galagah Kec. Sungai Tabukan						40,000,000	40,000,000				
- Pembuatan Gang Desa Tambalang Raya Kec. Sungai Tabukan						32,000,000	32,000,000				
- Pembuatan gang dan gorong gorong RT. 3 Desa Sungai Tabukan Kec. Sungai Tabukan						75,000,000	75,000,000				
- Pembuatan tian ulin Desa Teuk Daun Kec. Amuntai Utara						30,000,000	30,000,000				
- Pembuatan siring beton dan sinya Desa Sungai Tuak Dalam RT. 4 - 5 Kec. Amuntai Utara						120,000,000	120,000,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	Pembuatan jalan gang masyarakat Desa Pekapuran Kec. Amuntai Utara						100,000,000	100,000,000				
-	Pembuatan Siring Beton dan Cor Rabat Beton Jalan Desa Bajawit RT. I- II Kec. Amuntai Selatan					125,000,000	125,000,000					
-	Pembuatan Jalan Baru Desa Kota Raja RT. III Kec. Amuntai Selatan					50,000,000	50,000,000					
-	Pembuatan Gang Sampung Gang Damai Desa Jarang Kuantan RT. II Kec. Amuntai Selatan					45,000,000	45,000,000					
-	Pembuatan Jalan Gang Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan					200,000,000	200,000,000					
-	Pembuatan Siring Semen Jalan Tepi Kali Negara Desa Jarang Kuantan RT. I - IV Kec. Amuntai Selatan					300,000,000	300,000,000					
-	Pembuatan Dek + cor rabat beton jalan Desa Harusan Telaga RT. I - IV Kec. Amuntai Selatan					150,000,000	150,000,000					
-	Pembuatan Dek + cor beton Gang Barabai Desa Ujung Murung RT. V Kec. Amuntai Selatan					85,000,000	85,000,000					
-	Pembuatan Jalan Akaan Muslimin Desa Ilir Mesjid RT. 03 Kec. Amuntai Selatan					90,000,000	90,000,000					
-	Pembuatan Titian Ulin Desa Rukam Hulu RT. III Kec. Amuntai Selatan					100,000,000	100,000,000					
-	Pembuatan Siring Semen / Dek Desa Murung Panggang RT. IV Kec. Amuntai Selatan					150,000,000	150,000,000					
-	Pembuatan Titian / Gang Desa Cangkering RT. II Kec. Amuntai Selatan					75,000,000	75,000,000					
-	Pembuatan siring Desa Keramat RT. 01 - 04 Kec. Amuntai Selatan					200,000,000	200,000,000					
-	Pembuatan Titian Ulin Desa Teluk Parang Kec. Amuntai Selatan					100,000,000	100,000,000					
-	Pembuatan Jalan di Gang Nangka Desa Palampotan Hilir Kec. Amuntai Tengah					35,000,000	35,000,000					
-	Pembangunan Gang Bersama Desa Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah					200,000,000	200,000,000					
-	Pembangun Gang Beton dari Gang Kubah menuju SDN Tangga Ulin 2 Desa Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah					200,000,000	200,000,000					
-	Pembangunan Gang Beton dari Gang Langgar Sablil Muhardin Menuju SDN Tangga Ulin 1 Desa Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah					100,000,000	100,000,000					
-	Pembuatan jalan lingkungan kawasan Pasar Bitin Kec. Danau Panggang					500,000,000					500,000,000	
-	Pembuatan Gang Desa Sungai Bahadangan Kec. Bantang					100,000,000	100,000,000					
-	Pembuatan Gang Belakong SDN Sungai Malang 2 Kec. Amuntai Tengah					100,000,000	100,000,000					
-	Pembuatan Gang Mukmin Sungai Malang RT. 10 Kec. Amuntai Tengah					75,000,000	75,000,000					
-	Pembuatan Gang Baru Sungai Malang RT. 1 Kec. Amuntai Tengah					75,000,000	75,000,000					
-	Pembuatan Gang Baru Sungai Malang RT. 11 Kec. Amuntai Tengah					75,000,000	75,000,000					
-	Pembuatan Jalan Lingkungan RT. III Desa Pakcangan Kec. Amuntai Utara					100,000,000	100,000,000					
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Aksesibilitas antar desa	Kab. HSU	9.93%	2,647,002,000	-	2,397,317,000	249,685,000	-	-
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Pasarana Daerah Tertinggal				panjang jalan perdesaan yang dibangun		2,3 Km	2,647,002,000	-	2,397,317,000	249,685,000		
Program Lingkungan Sehat Perumahan				Percepatan								
				Tersedianya operasional	Kab. HSU	0.06%	3,559,470,000	-	959,520,000	349,950,000	-	2,250,000,000

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BIDANG EKONOMI												
BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, PERTERNAKAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN												
URUSAN												
BIDANG URUSAN WAJIB												
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Pentarotian</i>	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu layanan administrasi (indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan pegawai)	HSU	0.9	605,725,680	605,725,680				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Aparatur BAKPP	Tersedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		0.9	42,063,000	42,063,000				
3	Penyediaan Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional			Tersedia Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional		2 bh	31,500,000	31,500,000				
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tersedia Jasa Administrasi Keuangan		0.8	64,586,100	64,586,100				
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Tersedia Jasa Kebersihan Kantor		0.8	13,849,500	13,849,500				
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedia Alat Tulis Kantor		1	55,856,580	55,856,580				
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tersedia barang cetakan dan penggandaan		0.9	11,865,000	11,865,000				
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor		0.9	78,487,500	78,487,500				
9	Penyediaan makanan dan minuman			Mendukung kelancaran pekerjaan		0.95	32,130,000	32,130,000				
10	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah			Peningkatan koordinasi dan informasi		1	275,388,000	275,388,000				
11	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Mendukung kelancaran tugas	HSU		1,591,875,000	1,591,875,000				
12	Pembangunan gedung kantor			Tersedia lahan untuk Pembangunan Gedung Balai Penyuluh Kecamatan			1,500,000,000	1,500,000,000				
13	Pengadaan Mebleur			Mendukung kelancaran pekerjaan			70,875,000	70,875,000				
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor			21,000,000	21,000,000				
15	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Mendukung kelancaran tugas	HSU	90	65,100,000	65,100,000				
16	Pendidikan & pelatihan formal			Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan formal		1	56,700,000	56,700,000				
17	Pemilihan Angka Kredit Jafung Penyuluh			Terlaksananya Pemilihan Angka Kredit Jafung Penyuluh		57	8,400,000	8,400,000				
18	<i>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Laporan kinerja yg berkualitas	HSU	8	35,642,500	35,642,500				
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		BR4KP	Tersusunnya 8 buah dokumen/laporan kinerja dan keuangan yang berkualitas		8	35,642,500	35,642,500				
20	<i>Program Pengembangan Data/ Informasi</i>	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Data /Informasi yang akurat	HSU	10	31,250,000	31,250,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Pengumpulan, update, dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan		BPRKPP	Terusunnya 2 dok/laporan data informasi capaian target kinerja program/kegiatan dan 10 bh laporan tahunan BPK		10	31.250.000	31.250.000				
URUSAN												
BIDANG URUSAN PILIHAN												
6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Nilai Tukar Petani	HSU	100.2	649,425,000	649,425,000				
17	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis		Petani dan Penyuluh Swadaya yg aktif dim penyelenggaraan Penyuluhan	Terlaksananya SL - UT pada petani Terlaksananya Bimtek pada Penyuluh Swadaya. Terlaksananya kursus tani pada petani		225 40 360	198,450,000	198,450,000				
18	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis		Petani/Poktan	Terlaksananya sosialisasi kemitaan dan Pembinaan terhadap petani		200	26,145,000	26,145,000				
19	Peningkatan kemampuan lembaga petani		Penyuluh, Petani, Poktan dan Gapoktan	Ikut serta dalam Penas Tani di Jawa Timur Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani Terlaksananya Penilaian Gapoktan Terlaksananya Penilaian Penyuluh Terlaksananya Penilaian Pelaku Utama Pertemuan Gapoktan Terlaksananya Pendampingan Gapoktan Terlaksananya Pertemuan Apatekakan Terlaksananya Pertemuan RDK/RDKK Terlaksananya Pertemuan KTNA Terlaksananya temu lapang Terlaksananya Pertemuan P4S Terlaksananya Pertemuan Perhimpitan Terlaksananya Rembuk tani / kontak tani		39 9 9 9 9 321 107 150 870 60 60 60 60 148 200	109,620,000 277,410,000 277,410,000 277,410,000 277,410,000	109,620,000 277,410,000 277,410,000				
20	Pendampingan Dana LUEP*		Pengusaha Penggilingan Padi	Terlaksananya pendampingan Dana Kemandirian pangan	HSU	5	37,800,000	37,800,000				
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)												
21	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Pemantapan ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Energi Protein per kapita (%) Berdasarkan analisa NBM		13 5,245 / 161,97 87,34 94,4 94,4	1,813,710,100	788,670,100	861,333,000	163,707,000		
22	Analisis Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan			Diperolehnya Data/info tentang PPH konsumsi Diperolehnya Data/info tentang Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan		5,245 / 161,97	19,950,000	19,950,000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah *		Informasi Data Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terusunnya laporan SKRG dan FVSA (mendeteksi daerah rawan pangan)(%)		2 bh	75.000,000	75.000,000				
24	Pendampingan Desa Mandiri Pangan*		Desa	Teridentifikasi daerah rawan pangan di 10 kecamatan dan mewujudkan kemandirian pangan masyarakat miskin di 12 desa		13 ds	100.537.500	100.537.500				
25	Pengembangan cadangan pangan daerah*		Masyarakat	Tersedianya 100 ton beras sebagai cadangan pangan daerah		40	382.585.000	382.585.000				
26	Pengembangan Lumbung Pangan Desa		Gapoktan	Terbinanya Poktan yang menangani lumbung pangan		5	1.025.040.000		861.333.000	163.707.000		
27	Penguatan Cadangan Pangan (baru)		Kelompok	Terbinanya lumbung pangan desa		15	27.300.000	27.300.000				
28	Peningkatan mutu dan keamanan pangan		Masyarakat	Tersedianya informasi tentang mutu dan keamanan pangan di masyarakat		360	58.611.000	58.611.000				
29	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat		Stabilitas Harga & Pasokan Pangan (%); Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga & Akses Pangan di daerah	Tersedianya Data/informasi Pasokan, harga dan akses pangan (90% harga & pasokan terdata, 81,32% akses pangan tersedia)		12 bh	16.791.600	16.791.600				
30	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		Masyarakat/Desa	Tersedianya informasi tentang pemanfaatan pekarangan		10	34.561.800	34.561.800				
31	Pengembangan difersifikasi pangan (Baru)		Masyarakat/Desa	Tersedianya informasi tentang pengembangaran pangan di masyarakat		10						
8	Program Peningkatan Pemawasan hasil produksi pertanian/perkebunan		Meningkatnya pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM	Pangsa pasar produk Pertanian/Perkebunan	HSU	70	52.501.050	52.501.050				
32	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah		TP, PKK, Kec. Kel, Org. Wanita & Desa P2KP; Produk Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Terpromosikannya pangan lokal dan Produk Pertanian unggulan daerah		2 : 2 : 2	52.501.050	52.501.050				
9	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Produktivitas produk Pertanian/Perkebunan	HSU	3 : 3 : 4	171.110.000	171.110.000				
33	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Adopsi Teknologi Tepat Guna di Pelaku Utama	Dempulot/ kaji trap Pertanian, Perikanan dan Peternakan		3 : 3 : 4	121.110.000	121.110.000				
				Demca Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan di BPK		3 : 3 : 3						
				Facilitasi jasa Uji Air dan Tanah / tanaman		3 : 2						
34	Layanan Informasi Penyuluhan (baru)			Cetak Leaflet		2500	50.000.000	50.000.000				
				Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		30						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
10	<i>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</i>	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Pemantapan ketahanan pangan daerah	Kapasitas Penyuluh (Penyuluh bersertifikat)	HSU	3 org	1,658,028,000	825,859,000	638,667,000	193,502,000	-	-
35	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Penyuluh PNS, THL - TBPP dan Penyuluh Swadaya	Terlaksananya Pelatihan Penyuluh di BPK	4	288,336,350	288,336,350					
36	Peningkatan kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)	Terlaksananya Temu Teknis Penyuluh	4							
37	Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan		Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Penyuluh Kabupaten;	Fasilitasi Diklat	40							
38	Peningkatan Ketenagabagian Penyuluh pertanian /perkebunan*		Realisasi 24 Item rencana kerja penyuluh PZK	Dilaksanakannya Pengembangan Wawasan bagi Penyuluh Kab/Kec	5							
39	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/perkebunan*		BPK; Poktan; Gapokan	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Program Kecamatan	30							
40	Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian/perkebunan* (DAK)		Terfasilitasi sarana & Alat Baru Penyuluhan di BPK	Terdayanya Honor THL - TBPP	80	180,160,000	180,160,000					
			Baru Penyuluhan di BPK	Terusunnya PRA di setiap WKPP	28	41,362,650	41,362,650					
			gedung/kantor BPK	Terlaksananya Lokakarya program Kecamatan	9							
			gedung/kantor BPK	Terusunnya Program Kabupaten	2							
			gedung/kantor BPK	Telaksananya Supervisi, Monev, Penyelenggaraan dan Dampak Penyuluhan	2							
			gedung/kantor BPK	Terrastitasnya Operasional BPK (listrik, Air, ATK dan fotocopy)	9	61,800,000	61,800,000					
			gedung/kantor BPK	Terrastitasnya Sarana BPK (Pemeliharaan gedung/kantor BPK)	9	10,000,000	10,000,000					
			gedung/kantor BPK	Terrastitasnya Prasarana di BPK (Pemeliharaan Lahan BPK)	9	30,000,000	30,000,000					
			gedung/kantor BPK	Tersedianya sarana/Alat Baru Penyuluhan di BPK	9	214,200,000	214,200,000					
			gedung/kantor BPK	Disempurnakannya bangunan gedung/kantor BPK	1	832,169,000		638,667,000	193,502,000			
			gedung/kantor BPK	Terbangunnya gedung/kantor BPK	1							
10	JUMLAH ANGGARAN BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, PERTERNAKAN, PERKEBUNAN, KERTAJANAN DAN KETAHANAN PANGAN					6,674,367,330	4,817,158,330	1,500,000,000	357,209,000	-	-	
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA												
URUSAN PILIHAN PERTANIAN												
DINAS PERTANIAN TPH												
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan produksi sektor pertanian disertai pengolahan hasil	Produksi Pertanian	Seluruh Kecamatan	171,066 Ton	16,145,645,900	7,147,485,900	5,258,160,000	850,000,000	550,000,000	2,340,000,000
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian			Tersedianya sarana produksi pertanian	Seluruh Kecamatan	3 Paket	750,000,000	750,000,000	-	-	-	-
2	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian			Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Seluruh Kecamatan	15 Paket	9,287,485,900	6,397,485,900	-	-	550,000,000	2,340,000,000
3	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)			Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	Seluruh Kecamatan	2 Paket	6,108,160,000	-	5,258,160,000	850,000,000	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Pemantapan ketahanan pangan daerah	Ketersediaan distribusi dan konsumsi pangan	Seluruh Kecamatan	66.583 Ton	4.949.824.500	965.862.500	-	-	315.000.000	3.668.962.000
4	Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan			Tersedianya database potensi produksi pangan	Kabupaten	1 Tahun	195.000.000	120.000.000	-	-	75.000.000	-
5	Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok			Tersedianya harga pokok pangan	Kabupaten	1 Tahun	17.062.500	17.062.500	-	-	-	-
6	Pengangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian			Teraksananya bimbingan dan pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Seluruh Kecamatan	3 Paket	1.000.000.000	75.000.000	-	-	-	925.000.000
7	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija			Teraksanya intensifikasi tanaman padi, palawija	Seluruh Kecamatan	4 Paket	3.059.007.000	180.000.000	-	-	240.000.000	2.639.007.000
8	Pengembangan Perbenihan			Tersedianya benih unggul bermutu	Seluruh Kecamatan	616 Ton	329.955.000	225.000.000	-	-	-	104.955.000
9	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			Teraksananya pengembangan beras organik	Babirik	230 Ha	103.000.000	103.000.000	-	-	-	-
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Teraksanya Monitoring evaluasi dan pelaporan	Seluruh Kecamatan	1 Tahun	39.900.000	39.900.000	-	-	-	-
11	Perlindungan Tanaman dari Serangan OPT dan DPl			Memurnya tingkat kehilangan hasil	Seluruh Kecamatan	5%	205.900.000	205.900.000	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Nilai tukar petani	Seluruh Kecamatan	100	1.291.560.000	1.074.900.000	-	-	-	216.660.000
12	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis			Teraksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Seluruh Kecamatan	11 pelatihan	387.500.000	387.500.000	-	-	-	-
13	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis			Teraksananya penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Seluruh Kecamatan	13 Paket	565.160.000	348.500.000	-	-	-	216.660.000
14	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani			Meningkatnya kemampuan lembaga petani	Seluruh Kecamatan	5 Lembaga Petani	133.000.000	133.000.000	-	-	-	-
15	Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur			Teraksananya penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	Seluruh Kecamatan	6 Paket	205.900.000	205.900.000	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Produktivitas produksi pertanian	Seluruh Kecamatan	59,85 ku/ha	195.800.000	195.800.000	-	-	-	-
16	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna			Telaaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Seluruh Kecamatan	5 Paket	195.800.000	195.800.000	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM	Pangsa pasar komoditas pertanian	Luar Daerah	25%	52.500.000	52.500.000	-	-	-	-
17	Promosi Atas Hasil Pertanian Unggulan Daerah			Tersebarnya informasi hasil produksi pertanian unggulan daerah	Luar Daerah	3 Kali	52.500.000	52.500.000	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Kabupaten	100%	90.000.000	90.000.000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten	1 Buah	75.000,000	75.000,000	-	-	-	-
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	3 Buah	15.000,000	15.000,000	-	-	-	-
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur dan kinerja aparatur	Kabupaten dan Luar Kabupaten	100%	36.750.000	36.750.000	-	-	-	-
20	Pendidikan dan pelatihan formal			Terlathnya Aparatur dan Luar	Kabupaten dan Luar	5 Orang	10.500,000	10.500,000	-	-	-	-
21	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Terlathnya Aparatur dan Luar	Kabupaten dan Luar	10 Orang	26.250,000	26.250,000	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	Kabupaten	100%	46.200.000	46.200.000	-	-	-	-
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten	14 Paket	46.200,000	46.200,000	-	-	-	-
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	Kabupaten	100%	654.066.600	654.066.600	-	-	-	-
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			Tersedianya sarana komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kabupaten	12 Bulan	47.250,000	47.250,000	-	-	-	-
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tersedianya perijinan dan terpeliharanya kendaraan bermotor	Kabupaten	51 Buah	57.750,000	57.750,000	-	-	-	-
25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Terpeliharanya kebersihan kantor	Kabupaten	1 Paket	7.500,000	7.500,000	-	-	-	-
26	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Terpeliharanya peralatan kerja	Kabupaten	45 Buah	6.195,000	6.195,000	-	-	-	-
27	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten	50 Paket	32.434,500	32.434,500	-	-	-	-
28	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	Kabupaten	2 Paket	18.875,850	18.875,850	-	-	-	-
29	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kabupaten	1 Paket	6.500,000	6.500,000	-	-	-	-
30	Penyediaan Perengkapan dan Peralatan Kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	19 Paket	227.561,250	227.561,250	-	-	-	-
31	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Terperuhnya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	1 Tahun	250.000,000	250.000,000	-	-	-	-
9	31 JUMLAH ANGGARAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						23.462.347.000	10.263.565.000	5.258.160.000	850.000.000	865.000.000	6.225.622.000
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN												
	Usuran Pilihan											
	Usuran Pilihan Kelautan dan Perikanan											
	Dinas Perikanan dan Perikanan											
	Bidang Perikanan											
1	Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	Pemantapan ketahanan pangan	Ketersediaan distribusi, dan konsumsi pangan	Tersebar HSU	41 Kg/kepita	20.846.800	20.846.800	-	-	-	-
	Keg. Peningkatan mutu dan keamanan pangan			Tertaksananya pengujian laboratorium produk/produk hasil		5 sampel	20.846,800	20.846,800	-	-	-	-
2	Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Pemantapan potensi lokal untuk	Peningkatan produkti sektor pertanian disertai	Diversifikasi pengolahan dan pemasaran hasil	Tersebar HSU	4 produk di 3 kelompok	40.073.020	40.073.020	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Keg. Optimalisasi, Penanganan Pasca Panen & Pengolahan Hasil Perikanan	meningkatkan nilai tambah	pengolahan hasil	Terzosialisasinya diversifikasi olahan hasil		4 produk di 3 kelompok	40,073,020	40,073,020	-	-	-	-
3	Prog. Pengembangan Pengelolaan dan Pemastian Produk Perikanan (APBD Prov dan Keg. Optimalisasi, Pengelolaan dan pemastaran produksi perikanan			Hasil Perikanan lokal		26 macam	2,310,000,000	-	-	-	10,000,000	2,300,000,000
	- Peningkatan nilai tambah produk perikanan			Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)		38,4 kg/kapita	2,310,000,000	-	-	-	10,000,000	2,300,000,000
	- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia						5,000,000	-	-	-	5,000,000	
	- Peningkatan/kehidupan pasar ikan tradisional						2,300,000,000	-	-	-	2,300,000,000	
4	Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	Peningkatan produksi sektor pertanian disertai pengolahan hasil	Produksi perikanan	Tesebar HSU	23,770,927 ton	29,728,400	29,728,400	-	-	-	-
	Keg. Pelatihan dan Bimbingan Pengeoperasian Teknologi Perikanan Tepat Guna			Terlaksananya peletihan dan bintek pengolahan		23,770,927 ton	29,728,400	29,728,400	-	-	-	-
5	Prog. Pengembangan Pengelolaan & Pemastaran Hasil Perikanan (APBD Prov & APBN)	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM	Jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikat (unit pertanian)		34	615,000,000	-	-	-	15,000,000	600,000,000
	Keg. Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan						15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
	-Pembinaan di sentra PHP						-	-	-	-	-	-
	-Lomba Usaha Kecil Pengolahan Terbaik						15,000,000	-	-	-	15,000,000	-
	Keg. Fasilitas Pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan			Jumlah kelompok yang diberi penguatan modal (SABRAS PZHP)			600,000,000	-	-	-	-	600,000,000
6	-PUKM PZHP Pengolahan & pemastaran Prog. Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Perikanan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi	Pemberdayaan Kel. Usaha perikanan, Jumlah Terlaksananya temu usaha dan sosialisasi	Tesebar HSU	3 POKDAKAW, 3 KUB Tangkap, 3 KUB Tangkap, 3	600,000,000	78,988,000	78,988,000	-	-	600,000,000
7	Prog. Peningkatan Pemastaran Hasil Produksi Perikanan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	a). Meningkatkan pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM, b). Meningkatkan PAD	Persentase optimalisasi fungsi sarana prasarana Lanjutan operasional sarana prasarana	Tesebar HSU	5%	86,484,320	86,484,320	-	-	-	-
	Keg. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi perikanan					5%	86,484,320	86,484,320	-	-	-	-
8	Prog. Pengembangan Budaya Perikanan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	a). Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita b). Meningkatkan PAD dan penataan	Produksi perikanan budidaya Terperunya	Tesebar HSU	11,717,37 ton	8,563,795,389	2,069,592,448	5,610,446,400	883,756,541	-	-
	Keg. Pengembangan bibit ikan unggul			operasional pemeliharaan		100%	154,960,000	154,960,000	-	-	-	-
	Keg. Pendampingan pada kelompok tani			Meningkatnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang		5 kelompok	47,348,392	47,348,392	-	-	-	-
	Budidaya ikan			Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan		5%	657,284,056	657,284,056	-	-	-	-
	Keg. Pembinaan & Pengembangan perikanan			terbinaanya serta		5%	6,494,202,941	6,494,202,941	#####	883,756,541	-	-
	Keg. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana prasarana perikanan (DAK)			Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan			1,210,000,000	1,210,000,000	-	-	-	-
	Keg. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana prasarana perikanan (DAK Luncuran)			Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan			1,210,000,000	1,210,000,000	-	-	-	-
	Prog. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (APBD Prov & APBN)	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan produksi sektor pertanian disertai pengolahan hasil	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton/thn)	Tesebar HSU	282,832	2,880,000,000	-	-	-	195,000,000	2,685,000,000
10							30,000,000	-	-	-	-	30,000,000
	Keg. Pengembangan Sistem Perbenihan ikan						15,000,000	-	-	-	-	15,000,000
	-Pengadaan induk Unggul & pakan untuk UPTD Kabupaten/Kota						15,000,000	-	-	-	-	15,000,000
	-Penerapan GBIB						15,000,000	-	-	-	-	15,000,000
	Keg. Pengembangan Sistem Prasarana dan sarana pembudidaya ikan						80,000,000	-	-	-	-	80,000,000
	-Monitoring Prasarana dan Sarana Budidaya						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
	-Pewediaan sarana budidaya (mesin sedot lumpur & perengkapannya)						75,000,000	-	-	-	-	75,000,000
	Keg. Pengembangan Sistem Produksi						1,075,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000
	Pembudidaya ikan						1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000
	- Peningkatan produksi perikanan						1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Keg. Pengembangan budidaya ternak (APBD Prov)			Penyediaan sapi bakalan	Tersebar HSU	50 ekor	-	-	-	-	V	
Keg. Penyediaan sarana dan prasarana peternakan (APBD Prov)			Facilitasi sarana dan prasarana peternakan	Tersebar HSU	bahan baku keliang 10 paket, mesin tetas 5 unit dan tossa 1 unit	-	-	-	-	V	
Keg. Pengembangan pakan dan wilayah (APBD Prov)			Tersedianya hijauan pakan ternak	Tersebar HSU	30 Ha	-	-	-	-	V	
Keg. Pengembangan teknologi peternakan (APBD Prov)			Teknologi pakan	Tersebar HSU	2 orang	-	-	-	-	V	
			Teknologi budidaya	Tersebar HSU	2 orang	-	-	-	-	V	
			Teknologi pasca panen	Tersebar HSU	3 orang	-	-	-	-	V	
Prog. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan Yang Aman, Sehat, Uluh dan Halal (APBN)			Peningkatan produksi daging, telur dan susu			-	-	-	-		V
Keg. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal (APBN)			Peningkatan produksi bibit	Tersebar HSU	kelompok dan htk 2 kelompok	-	-	-	-		V
			Pengendalian sapi/kerbau betina produktif (penguatan kerbau betina bunting)	Tersebar HSU	1 kelompok	-	-	-	-		V
			Pengembangan pelayanan	Tampakang dan Paminggir	2 unit	-	-	-	-		V
Keg. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal (APBN)			Pengembangan POS IB	Paminggir		-	-	-	-		V
			Pengembangan sarana dan prasarana IB	Tampakang dan Paminggir	2 paket	-	-	-	-		V
			Pengembangan UIB	Tampakang dan Paminggir	2 paket	-	-	-	-		V
			Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui LM3	Tersebar HSU	1 paket	-	-	-	-		V
			Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (SMD)	Tersebar HSU	1 orang	-	-	-	-		V
			Pengembangan budidaya unggas lokal	Tersebar HSU	2 kelompok	-	-	-	-		V
			Optimisasi sumber benih bibit (HPT)	Tersebar HSU	1 paket	-	-	-	-		V
Keg. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal (APBN)			Optimisasi sumber benih bibit (HPT) dikelompok	Tersebar HSU	1 kelompok	-	-	-	-		V
			Pengembangan unit pengolahan pakan (UPP)	Tersebar HSU	1 paket	-	-	-	-		V
Keg. Penjaminan pangan asal hewan Yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (APBN)			Facilitasi RPH ruminausia	Tersebar HSU	1 paket	-	-	-	-		V
			Pembangunan kios daging	Tersebar HSU	1 paket	-	-	-	-		V
			Facilitasi alat transportasi daging	Tersebar HSU	1 buah	-	-	-	-		V
24 Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah			-	-	-	-		
Keg. Promosi atas hasil produksi peternakan			Peningkatan pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM	Tersebar HSU	-	100,110,400	100,110,400	-	-		
Keg. Penyuluhan kualitas dan teknis keamanan hasil produksi peternakan			Pangsa pasar produk hasil peternakan	Tersebar HSU	1 tahun	17,633,200	17,633,200	-	-		
Keg. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan			Terlekananya promosi hasil produksi peternakan	11 kali pertemuan	46,540,000	46,540,000	-	-	-		
Keg. Penyuluhan pemasaran hasil produksi peternakan			Terlekananya pengolahan hasil ternak	52 kali di televisi dan 52 kali	22,573,200	22,573,200	-	-	-		
25 Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi			Terlekananya pengembangan dan pembinaan teknis produktivitas produk	1 kali 40 orang	13,364,000	13,364,000	-	-	-		
			Pemanfaatan potensi peningkatan produksi			64,017,200	64,017,200	-	-		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik		Tersediajasa komunikasi, air dan listrik	Kab.HSU	95%	28.600,000	28.600,000	-	-	-	-
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang siap pakai	Kab.HSU	2 buah	36.300,000	36.300,000	-	-	-	-
	4	Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Peningkatan motivasi kerja	Kab.HSU	70%	45.887,000	45.887,000	-	-	-	-
	5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		pengelolaan keuangan Tersediajasa peralatan dan perlengkapan kerja	Kab.HSU	100%	63.650,000	63.650,000	-	-	-	-
	6	Penyediaan makanan dan minuman		Mendukung kelancaran pekerjaan	Kab.HSU	85%	12.000,000	12.000,000	-	-	-	-
	7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Peningkatan koordinasi dan informasi	Luar Daerah	85%	350.000,000	350.000,000	-	-	-	-
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersediajasa infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	65%						
	8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor	Kab.HSU	1 th	34.200,000	34.200,000	-	-	-	-
	9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Terpeliharanya peralatan kantor	Kab.HSU	75%	7.000,000	7.000,000	-	-	-	-
	3. Program Peningkatan Kapasitas		Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	75%						
	10	Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Diklat yang diikuti	Dalam dan luar daerah	4 diklat	35.000,000	35.000,000	-	-	-	-
	11	Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	Dalam dan luar daerah	100%	100.500,000	100.500,000	-	-	-	-
	4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	65%						
	12	kinerja dan kiktisar realisasi kinerja SKPD		Tersediajasa buku laporan capaian kinerja kiktisar realisasi kinerja	Kab.HSU	100%	30.000,000	30.000,000	-	-	-	-
	5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Luasan pengembangan dan	10 ha						
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Tersediajasa data pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Seluruh Kec.	70%	12.780,000	12.780,000	-	-	-	-

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6. Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Berkurangnya lahan kritis		2 ha						
	14	Pembuatan bibit/berth tanaman kehutanan	tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Tersedianya bibit tanaman kehutanan	Kec. Haur Gading	4000 phn	98.790.000	98.790.000	-	-	-	-
	15	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan		Tersedianya tanaman buah unggulan	Kec.H.G. BB,AS	2000 phn	34.290.000	34.290.000	-	-	-	-
	7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	- Kualitas ekosistem rawa - Berkurangnya lahan kritis		1.24%						
	16	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan		Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan Dampak kebakaran hutan	Ds.P. Damar	30 org	16.500.000	16.500.000	-	-	-	-
	17	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusahaan hutan		Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dim upaya pengurangan perusahaan hutan	Kec. Bahang	60 org	67.000.000	67.000.000	-	-	-	-
	18	Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana prasarana kehutanan (DAK)		Terpeulinnya sarana prasarana pengamanan hutan	HG	250 ha	403.272.548.000	1.540.000.000	332.548.000	400.000.000.000	1.400.000.000	
	8. Program Pembiayaan dan pemberian industri hasil hutan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Keterlibatan izin industri		2 buah izin						
	19	pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan industri hasil hutan		Terbnyanya peredaran hasil hutan	Kec	75%	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-
	9. Program Peningkatan Koordinasi antardaerah dan lintas instansi (sektor Publik dan sektor privat) pengamanaan sub-sub DAS	Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Kadar polutan pada sub-sub DAS		20%						
	Tabalng dan Balangan			Tabalong dan Balangan								
	20	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Forum DAS HSU		Mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan sub-sub DAS	dim dan luar daerah	20%	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-
	BIDANG PERKEBUNGAN											
	10. Program Peningkatan pemaasan hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Pangsa pasar komoditas pertanian/perkebunan		1						
	21	Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi		Tersedianya data dan pasar yang aktual	Seluruh Kec.	20 buku	7.500.000	7.500.000	-	-	-	-
	22	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Tersedianya laporan kegiatan	Seluruh Kec.	15 buku	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-
	11. Program Peningkatan	Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa	Kemampuan lembaga		8 org						

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan		berbasis potensi lokal	Tersedia alat-alat keelektrikan PLTS dan terlaksananya perawatan serta pemasangan bantuan unit baru	SP, BB, AS, BIG	7 Lokasi	372.000,000	72.000,000	-	-	300.000,000	-
	16. Program Pembiayaan, pengawasan & pengembangan bidang energi	Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Penggunaan energi alternatif dan migas sesuai harapan masyarakat		65%						
	31 Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif dan energi baru terbarukan			Tersedia tempat & alat reaktor pengolahan biogas dari ecing gon- dok/tempat penampung biogas dan kompor	HG, PMG, DP	12 buah	665.500,000	65.500,000	-	-	600.000,000	-
	32 Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Terpantainya tempat- tempat penjualan BBM bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat yang memang berhak menerima	AU, AT, SP	10 titik	38.950,000	38.950,000	-	-	-	-
	17. Program Perlindungan peningkatan kualitas pemantauan dan konservasi SDA dan LH	Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Cakupan masyarakat yang membutuhkan air bersih		70%						
	33 Survei dan penelitian air bawah tanah			Tersedia data dan peta potensi air tanah	AU, AT	10 titik	975.000,000	75.000,000	-	-	900.000,000	-
	34 PIPANISASI/pemasangan Jaringan pipa kerumah - rumah penduduk			Bertambahnya pendistribusian air bersih kemasyarakat	SP	1 lokasi	40.000,000	40.000,000	-	-	-	-
	17 JUMLAH ANGGARAN DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						406.967.995,000	1.679.947,000	1.540.000,000	332.548,000	402.015.500,000	1.400.000,000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu layanan administrasi	Kab HSU	1 Tahun	503.397,700	503.397,700				
	1 Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik			Tersedia sarana komunikasi air dan listrik	Kab HSU	1 Tahun	41.580,000	41.580,000				
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			Tersedia perizinan dan terpeliharanya kendaraan bermotor	Kab HSU	1 buah	21.997,800	21.997,800				
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan			Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan	Kab HSU	1 Tahun	66.000,000	66.000,000				
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor			Terpeliharanya kebersihan kantor	Kab HSU	1 Tahun	22.000,000	22.000,000				
	5 Penyediaan alat tulis kantor			Terlaksananya penyediaan/ pengadaan alat tulis kantor	Kab HSU	48 Jenis	51.819,500	51.819,500				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Kabupaten HSU	15 kali luar provinsi dan 30 kali dalam provinsi	3.000.000,000	3.000.000,000				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		75%	235.000,000	235.000,000				
7	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional			Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kab HSU	5 buah	80.000,000	80.000,000				
8	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab HSU	181 unit	80.000,000	80.000,000				
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Jumlah Bangunan gedung kantor yang mendapat rehabilitasi/ pemeliharaan	Kab HSU	1 buah	75.000,000	75.000,000				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Kab HSU	75%	80.000,000	80.000,000				
10	Pendidikan dan pelatihan Formal			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan / Diklat Formal lainnya	Kab HSU	2 orang	20.000,000	20.000,000				
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Jumlah aparatur yang mendapatkan/ mengikuti Bimbingan teknis atau sertifikasi	Kab HSU	14 orang	60.000,000	60.000,000				
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Kab HSU	85%	25.758.900	25.758.900				
12	Jumlah objek laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja			Jumlah objek laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja	Kab HSU	5 objek laporan	18.258.900	18.258.900				
13	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah objek laporan keuangan akhir tahun	Kab HSU	2 objek laporan	7.500,000	7.500,000				
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Jumlah koperasi aktif	Kab HSU	93 Kop	631.619.100	631.619.100				
14	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			Jumlah Rakornas, Rapat Regional, dan konsultasi yang diikuti	Kab HSU dan Luar Provinsi	Rakornas 1 kali Rapat Regional 2 kali Konsultasi 12 kali	55.000,000	55.000,000				
15	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman pekerjasama			Jumlah pelaksanaan sosialisasi pekerjasama	Kab HSU	10 kali	55.192,500	55.192,500				
16	Pembinaan, pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi			Jumlah koperasi yang dapat di data untuk penghargaan koperasi berprestasi	Kab HSU	75 kop	54.984,600	54.984,600				
17	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi			Jumlah peserta pengayaan wawasan tentang model-model pola pengembangan koperasi	Luar Kabupaten HSU	20 orang	76.340,000	76.340,000				
18	Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi			Jumlah peserta bimtek administrasi usaha koperasi	Kab HSU	80 Koperasi	47.382,500	47.382,500				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Kab HSU	55 Koperasi	60,417,500	60,417,500				
20	Bimtek Pengawasan bagi Pengawas Koperasi			Jumlah Pengawas Koperasi yang mengikuti Bimtek Pengawasan Koperasi	Kab HSU	120 orang	60,522,000	60,522,000				
21	Fasilitasi Penilaian Kesehatan dan fasilitasi pemeringkatan Koperasi			Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi penilaian koperasi dan fasilitasi pemeringkatan koperasi	Kab HSU	60 Koperasi	38,252,500	38,252,500				
22	Penilaian Kesehatan Koperasi			Jumlah KSP dan USP yang di nilai kesehatannya	Kab HSU	60 Koperasi	30,167,500	30,167,500				
23	Pemerinkkatan Koperasi			Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeringkatan oleh lembaga independen	Kab HSU	10 Koperasi	33,000,000	33,000,000				
24	HUT Koperasi			Teraksananya HUT Koperasi tingkat Kabupaten dan berpartisipasi dalam HUT Koperasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Kab HSU, Provinsi, dan Luar Provinsi	3 kali	60,060,000	60,060,000				
25	Penerapan Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur			Jumlah Koperasi yang mendapat pendampingan dalam penerapan SOM dan SOP	Prov. Kaltel	10 Koperasi	60,500,000	60,500,000				
6	Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Penyebaran informasi kebijakan, legalitas usaha dan validitas data UKM		10 Kecamatan	143.000.000	143.000.000				
26	Sosialisasi kebijakan tentang UKM			Jumlah KUKM yang mendapatkan sosialisasi	Kab HSU	180 orang	44,000,000	44,000,000				
27	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah			pelaksanaan Studi Banding UKM	Luar Kabupaten HSU	10 hari	55,000,000	55,000,000				
28	Fasilitasi Pengembangan UKM			Jumlah UKM dan pedagang kaki lima yang mendapatkan pelatihan	Kab HSU	40 orang	44,000,000	44,000,000				
7	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM	Koperasi / UKM yang mandiri		102 Koperasi aktif dan 110.011 UKM	213.774.000	213.774.000				
29	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM			Jumlah UMKM yang difasilitasi pertemuan kemitraan	Kab HSU	150 orang	44,000,000	44,000,000				
30	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Kab HSU	120 orang	60,500,000	60,500,000				
31	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD			Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	Kab HSU	120 orang	47,630,000	47,630,000				
32	Sosialisasi HAKI pada UMKM			Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi tentang HAKI	Kab HSU	300 orang	61,644,000	61,644,000				
8	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM	Bertumbuhnya UKM		1089 UKM	132.000.000	132.000.000				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah			UMKM yang mendapat pelatihan pengolahan pangan/ makanan	Kab HSU	80 orang	88.000,000	88.000,000				
34	Pemeliharaan promosi produk UMKM			Jumlah UMKM yang dikurseratkan ke pameran produk UMKM	Luar Kabupaten HSU	6 UMKM	44.000,000	44.000,000				
9	Program pengembangan Industri Kecil Menengah	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Kualitas Produk dan Omzet		Nilai produksi Rp. 292.434.093	1.378.421.000	1.378.421.000				
35	Facilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			Jumlah Pengrajin/ IKM yang mendapat pelatihan teknik produksi	Kab HSU	25.861 Orang	563.200,000	563.200,000			512.000,000	
36	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri			Jumlah Sentra yang mendapatkan pembinaan tentang klaster industri	Kab HSU	5 Sentra	132.000,000	132.000,000			120.000,000	
37	Pendataan industri kecil dan menengah			Jumlah tenaga pendataan yang mendapatkan sosialisasi pendataan dan jumlah IKM yang terdata	Kab HSU	20 orang dan 219 desy/kei	27.621,000	27.621,000				
38	Facilitasi akses produk industri kecil dan menengah			Jumlah pameran produk kerajinan yang di ikuti oleh IKM Binaan	Luar kab. HSU	3 kali	192.500,000	192.500,000				
39	Magang Industri kecil dan menengah			Jumlah IKM yang dikurseratkan magang	Luar kab. HSU	8 IKM	165.000,000	165.000,000			150.000,000	
40	Pembinaan Kerajinan oleh Dekranasda			Jumlah pameran dekransda/dekrans yang di ikuti dan jumlah anggota dekransda yang mengikuti Bimtek/ Penambahan wawasan	Luar kab. HSU	3 kali dan 10 orang	298.100,000	298.100,000				
10	Program Peningkatan Kemampuan Pembinaan Teknologi Industri	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Kapasitas dan kualitas Industri		10,90%	773.069.000	773.069.000				
41	Pembinaan kemampuan teknologi industri			Jumlah kecamatan yang mendapat Sosialisasi tentang pelayanan UPT kerajinan dan UPT kayu	Kab HSU	10 Kec	243.045,000	243.045,000				
				Jumlah IKM yang mendapat pelayanan	Kab HSU	219 Sentra						
42	Pengawasan produk dan peredaran garam			Jumlah kecamatan yang di ambil sampel garam nya	Kab HSU	10 Kec	22.000,000	22.000,000				
43	Bantuan bahan/ peralatan industri			Jumlah jenis peralatan yang diberikan kepada IKM	Kab HSU	13 jenis	508.024,000	508.024,000			1.200.000,000	
11	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Pasar dan produksi	Kab HSU	Nilai produksi Rp. 292.434.093	66.000,000	66.000,000				
44	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses oleh masyarakat			Jumlah booklet produk IKM yang di cetak	Kab HSU	350 buku	66.000,000	66.000,000				
				Jumlah komoditi yang dijadikan barang sampel	Kab HSU	5 komoditi						
				Jumlah leaflet profil IKM	Kab HSU	500 lembar						
12	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Perlindungan konsumen dan keamanan produk	Kab HSU	10 Kec	74.947.400	74.947.400				

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
45	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-pemmasalahan pengaduan konsumen			Jumlah Pengangan dan penyelesaian pengaduan konsumen	Kab HSU	5 Pengaduan	9.790.000	9.790.000				
46	Peningkatan dan pengawasan peredaran barang			Jumlah kecamatan yang dapat di awasi peredaran barangnya	Kab HSU	5 Kec.	1.7065.400	1.7065.400				
47	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian daerah			Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan kemetrolgian	Kab HSU	10 Kec	8.250.000	8.250.000				
48	Fasilitasi informasi barang dan harga			Jumlah informasi harga barang pokok lewat media	Kab HSU	48 kali	1.4.542.000	1.4.542.000				
49	Sosialisasi tentang kemetrolgian			Jumlah Kecamatan yang mendapat sosialisasi tentang kemetrolgian	Kab HSU	2 Kec	25.300.000	25.300.000				
13	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pemantauan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Pangsa pasar produk dalam negeri		10 Kec	3.752.048.408	570.337.500				
50	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk			Jumlah Pelaksanaan pasar muah di Kab. HSU	Kab HSU	10 kali	129.530.500	129.530.500				
51	Pengembangan promosi perdagangan			Jumlah pameran produk unggulan yang diikuti	Luar Kab. HSU	6 kali pameran	440.847.000	440.847.000				
52	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk (DAK)			Jumlah pengembangan/ rehabilitasi pasar desa	Kab HSU	10 Kec	3.181.710.908	-				3.181.710.908
13	JUMLAH ANGGARAN DIMAS KOPERASI, USAHA KECIL MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						11.190.986.416	4.827.564.600				3.181.710.908
DINAS PENDAPATAN DAERAH												
	Program Pelayanan Administrasi	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu layanan administrasi								
1	Perkantoran			Indeks kepuasan masyarakat								
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Dana	Kab.	85%	65.000.000	65.000.000				
				Jasa komunikasi sumber daya air & listrik								
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Dana	Kab.	85%	225.046.500	225.046.500				
				Jasa administrasi keuangan								
	3	Penyediaan alat tulis kantor		Dana	Kab.	85%	225.182.000	225.182.000				
				Alat Tulis kantor								
	4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Dana	Kab.	90%	580.105.000	580.105.000				
				Peralatan & perlengkapan kantor								
	5	Penyediaan makan dan minum rapat		Dana	Kab.	65%	45.300.000	45.300.000				
				Makan dan minum rapat								
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah		Dana	Kec, luar Kab.	80%	481.763.659	481.763.659				
				Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Luar Prov.							
	Program Peningkatan Sarana dan	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Peningkatan pelayanan dan								
2												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Prasarana Aparatur			kinerja aparatur								
7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			Dana Gedung Kantor	Kab.	1	47,850,000	47,850,000				
8 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional			Dana Kendaraan dinas	Kab.	3	150,000,000	150,000,000				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber - daya Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur								
9 Pendidikan dan Pelatihan formal			Dana Meningkatkan kualitas SDM	Kab. & luar kab.	20	85,575,000	85,575,000				
Program Peningkatan sistem Pelaporan capaian kinerja & keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah								
10 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan lhtsuar realisasi kinerja skpd			Dana Laporan Kinerja Dinas	Kab.	3	14,160,000	14,160,000				
11 Penyusunan Laporan keuangan semesteran			Dana Laporan Keuangan Dinas	Kab.	2	15,650,000	15,650,000				
12 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Dana Laporan Keuangan Dinas	Kab.	1	2,400,000	2,400,000				
13 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Dana Laporan Keuangan Dinas	Kab.	1	1,350,000	1,350,000				
Peningkatan & pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya PAD dan pentaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah								
14 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah			Dana Verifikasi, realisasi surat dan brg berharga	Kec, luar Kab.	90%	102,542,000	102,542,000				
15 Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah			Dana Laporan perkembangan PAD	Kec, luar Kab. Luar Prov.		89,650,000	89,650,000				
16 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah.			Dana Pajak, Retribusi, HKD yg dipisahkan Lain-PAD yang sah.	Kec, luar Kab. Luar Prov.	32,550,000,000.	443,497,500	443,497,500				
17 Pengalihan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain			Dana pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain	Kec. & luar		225,000,000	138,600,000				
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah.	Pemantapan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya PAD dan pentaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan Pendapatan PBB P2								
6											

BAB VI P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2014 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2014 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka menengah pada tahun 2014. Penetapan prioritas rencana pembangunan, mengacu pada isu – isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran melalui berbagai indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangun
2. Seluruh SKPD dan pelaku pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014, secara sinergis dan terintegrasi

3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2014, RKPD Tahun 2014 akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014, sebagai hasil kesepakatan bersama dengan DPRD
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2014, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati, melalui Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah serta BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Secara proaktif, Kepala BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara nantinya akan melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati

8. Pada akhir Tahun Anggaran 2014 setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2014, tentunya sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati, melalui Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah serta BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2014. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2014 akan menjadi dasar bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan dapat terwujud secara optimal.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



H. ABDUL WAHID. HK